



**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO RUMAH
TANGGA MISKIN (PUM-RTM) DI KELURAHAN JUMERTO
KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER**

*Evaluation of Lower Class Empowerment (PUM-RTM) in Jumerto Village of
Patrang Subdistric of Jember Regency*

SKRIPSI

Oleh

**Alfian Aji Wibowo
NIM 130910201037**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO RUMAH
TANGGA MISKIN (PUM-RTM) DI KELURAHAN JUMERTO
KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar sarjana sosial

Oleh

**Alfian Aji Wibowo
NIM 130910201037**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

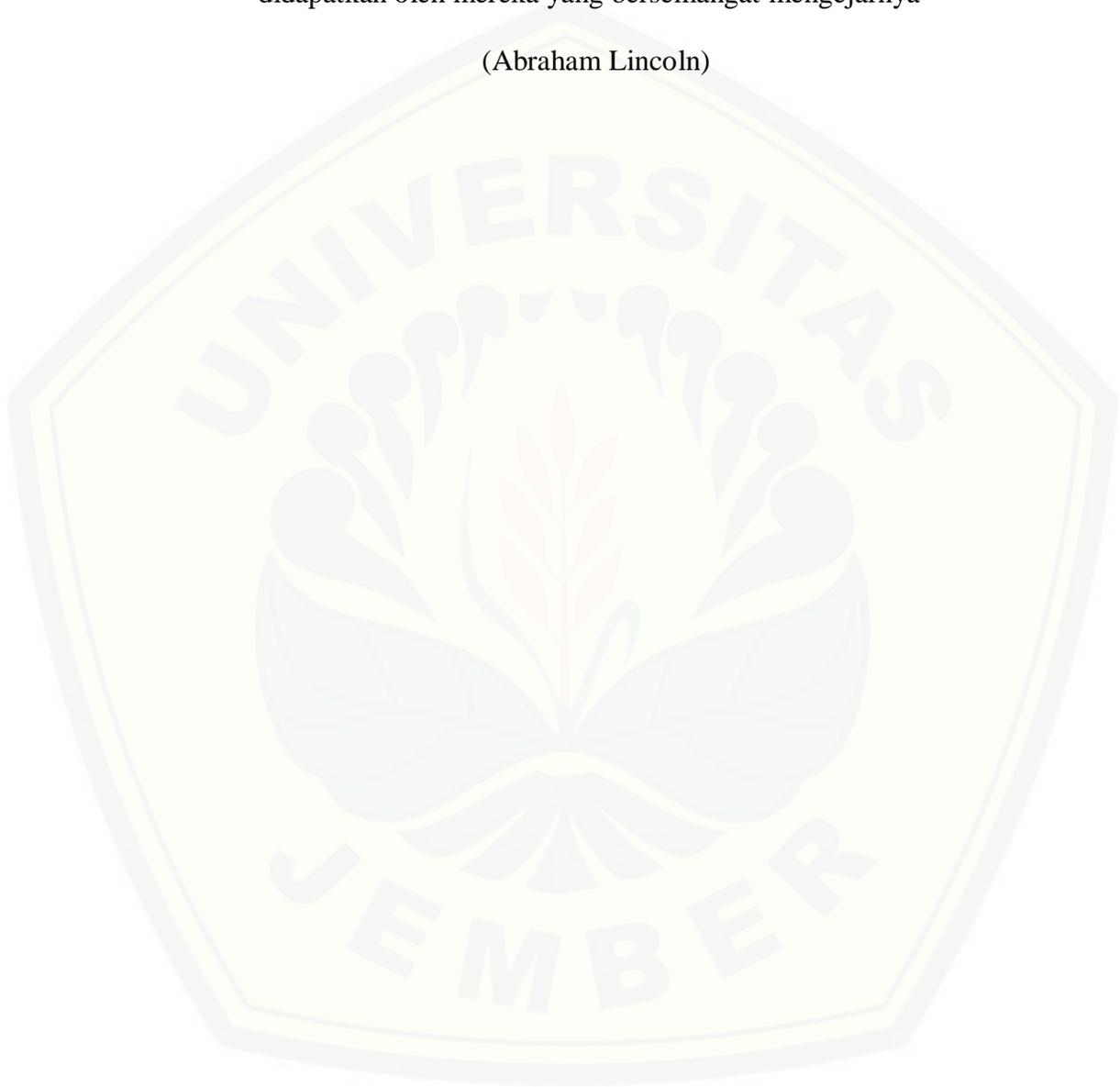
Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Almarhum Ayahanda Noor Kholik dan Ibunda Sukanti, Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, yang tidak mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna saya sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi untuk tetap bisa bermanfaat bagi orang lain, selalu mendoakan, selalu menasehati menjadi lebih baik.
2. Adikku, Farkan Timur dan Refan Bimantoro yang saya banggakan.
3. Almamater saya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya”

(Abraham Lincoln)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfian Aji Wibowo

NIM : 130910201037

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember” benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 November 2017

Yang menyatakan

Alfian Aji Wibowo

NIM 130910201037

SKRIPSI

**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO RUMAH
TANGGA MISKIN (PUM-RTM) DI KELURAHAN JUMERTO
KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER**

Oleh

**Alfian Aji Wibowo
NIM 130910201037**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr Sutomo M.Si

Dosen Pembimbing Pendamping : M. Hadi Makmur S.Sos. M.AP

PENGESAHAN

Skripsi berjudul ” Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember” karya Alfian Aji Wibowo telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji,
Ketua,

Dr. Selfi Budi Helpiastuti, M.Si
NIP. 197003221995122001

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dr. Sutomo, M.Si
NIP. 196501211991031003
Anggota I,

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP
NIP. 197410072000121001
Anggota II,

Drs. Supranoto, M.Si
NIP. 196102131988021001

Rachmat Hidayat, S.Sos, MPA., PhD
NIP. 198103222005011001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) Di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember ; Alfian Aji Wibowo, 130910201037, 2017: 106 Halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi program PUM-RTM yang ada di Kelurahan Jumerto. Tujuan dari program PUM RTM menurut Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan LKMM adalah (a) meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan Rumah Tangga Miskin (RTM), (b) menyediakan sumber permodalan untuk pengembangan usaha mikro, (c) mewujudkan kemandirian dan kapabilitas komunitas dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi, dan (d) memfasilitasi terbentuknya institusi ekonomi yaitu Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) serta terbentuknya institusi sosial yaitu kelompok masyarakat (Pokmas)

Sedangkan sasaran PUM-RTM menurut Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan LKMM adalah (a) lokasi program diprioritaskan pada desa / kelurahan dengan jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi termasuk juga wilayah yang terkena bencana, (b) wilayah pelayanan LKMM dan pembentukan Pokmas diprioritaskan pada lingkup dusun/lingkungan, hal ini dimaksudkan untuk membangun hubungan emosional para anggota serta membangun rasa solidaritas sosial untuk memajukan kampung halamannya, dan (c) sasaran Rumah Tangga Miskin (RTM) diprioritaskan pada RTM usia produktif, perempuan, menikah dan telah memiliki usaha atau pernah berusaha dan berencana membuka usaha baru atau RTM yang belum berpengalaman usaha tetapi memiliki motivasi tinggi untuk merintis usaha.

Kegiatan PUM-RTM terdiri dari 3 tahap yaitu tahap penguatan institusi, tahap penguatan modal usaha dan tahap peningkatan keterampilan. Ketiga aktivitas tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Pada Kelurahan Jumerto terdapat 2 (dua) LKMM yang menerima bantuan dana dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember yaitu LKMM Barokah pada tahun 2006 dan LKMM Jumerto Lor pada tahun 2010. Penguatan institusi pada LKMM Barokah mengalami perkembangan karena modal awal

yang diberikan Dinas digunakan untuk usaha dan ada perputaran modal yang dilakukan oleh pengurus dan anggota. LKMM Barokah juga mempunyai kelengkapan buku-buku administrasi untuk keperluan pengurus maupun anggota. Sedangkan penguatan institusi yang ada di LKMM Jumerto Lor tidak ada perputaran modal karena hanya berjalan 1 tahun. LKMM Barokah menerima bantuan modal dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember sebesar Rp 56.000.000 pada tahun 2006 sedangkan LKMM Jumerto Lor menerima bantuan modal dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember sebesar Rp 25.000.000 pada tahun 2010. Pada pengembangan keterampilan baik LKMM Barokah maupun LKMM Jumerto Lor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember melakukan pelatihan tata buku sederhana untuk pengurus LKMM. Hanya pengurus LKMM Barokah yang melakukan pengembangan keterampilan dengan mengadakan *outbound*. Pola pemanfaatan modal yang dilakukan pengurus LKMM Barokah maupun LKMM Jumerto Lor tidak ada jaminan yang ditetapkan untuk mendapatkan pinjaman. Pengurus LKMM Barokah memperbolehkan perempuan maupun laki-laki baik berkelompok maupun tidak berkelompok untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga 0,5%, sedangkan pengurus LKMM Jumerto hanya memperbolehkan perempuan yang berkelompok untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga 1%. Pola pemanfaatan modal oleh anggota LKMM Barokah banyak digunakan untuk keperluan usaha seperti berjualan kerupuk, berdagang di pasar, membuka toko di depan rumah dll. Sedangkan pola pemanfaatan modal oleh anggota LKMM Jumerto Lor banyak digunakan untuk non usaha seperti membeli pakaian, tambahan uang saku sekolah, memperbaiki motor dll. Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Artinya penelitian ini berusaha mengungkapkan secara obyektif dan sistematis.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT selalu penulis panjatkan karena dengan rahmat serta hidayah-Nya mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) Di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember” ini. Penyusunan skripsi ini guna melengkapi tugas akhir dan dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial di Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Edy Wahyudi S.Sos, MM. dan Bapak Drs. Supranoto, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Sutomo M.Si selaku dosen pembimbing yang telah berbagi waktu dan selalu dengan sabar membimbing sembari memotivasi sehingga pembuatan skripsi ini selesai.
5. Bapak M. Hadi Makmur S.Sos. MAP selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing dan membantu saya dalam memperkuat pemahaman saya terhadap skripsi ini..
6. Bapak Moelyono selaku operator Program Studi Administrasi Negara yang selalu dengan kesabarannya melayani kebutuhan administratif mahasiswa.
7. Bapak Ibu Dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Jember.
8. Ibu Sukamti yang tak kenal lelah menanyakan “Kapa Lulus Lee?”. Akhirnya saya lulus Buk !.

9. Kakak-kakak SkeTsa tercinta, Rhichy Kurnia Putra, Zeni Mustafa, Angga Juli Setiawan, Dayar yang selalu memberi dukungan yang bersifat finansial dan motivasi serta keceriaan sehingga skripsi ini selesai.
10. “Mary Palupi Setyorini” seseorang yang senantiasa memberi kebahagiaan yang tak terduga. Terima kasih atas suka duka dan menulis cerita panjang dalam hidup di setiap harinya serta selama proses pembuatan skripsi sampai selesai.
11. Adik-adikku Nada, Yusfi, Lia, Agung, Serly, Alpin, Rohim, Wiwil dan semua keluarga besar PMII Rayon Fisip teruslah menciptakan ruang manfaat bagi sesama dan terkecuali yang sudah lulus lampaulah kakakmu dengan lulus cepat.
12. UKMF LIMAS, Organisasi intra kampus yang menjadi ruang berproses bagi penulis dan mengerti bahwa seorang pemimpin yang baik harus mampu menciptakan pemimpin-pemimpin yang baru serta dalam belajar berorganisasi dan berberbagi pemikiran layaknya seorang organisatoris.
13. Bapak Agus Edhi Santoso selaku Kepala sie Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Jember, Ketua LKMM Barokah dan Jumerto Lor serta masyarakat desa yang tidak bisa di sebutkan satu-satu, yang banyak membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Sebagai penulis tentunya berharap semoga skripsi ini menjadi pengetahuan baru dan bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran selalu penulis terima demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 08 November 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Pembangunan	20
2.3 Kemiskinan	24
2.4 Pemberdayaan Masyarakat	29
2.5 Kebijakan Publik	32
2.6 Evaluasi Kebijakan	35
2.6.1 Pendekatan terhadap Evaluasi	39
2.7 Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) .	41
2.8 Kerangka Berfikir	44

BAB 3. METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Pendekatan Penelitian	46
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	47
3.3 Desain Penelitian.....	48
3.3.1 Fokus Penelitian.....	49
3.3.2 Penentuan Informan Penelitian	49
3.3.3 Data dan Sumber Data.....	51
3.4 Teknik dan Alat Perolehan Data.....	52
3.5 Teknik Menguji Keabsahan Data	55
3.5.1 Perpanjangan Keikutsertaan	55
3.5.2 Ketekunan Pengamat.....	56
3.5.3 Triangulasi	56
3.6 Tehnik Penyajian dan Analisis Data.....	57
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Deskripsi Daerah Penelitian	59
4.1.1 Peta, Letak Geografis, dan Keadaan Kelurahan Jumerto..	59
4.1.2 Keadaan Penduduk.....	60
4.1.3 Keadaan Sosial Ekonomi.....	61
4.1.4 Struktur Pemerintahan.....	62
4.2 Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) .	63
4.3 Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat	
(LKMM) di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang.....	70
4.4 Proses Pengelolaan Program PUM-RTM Di Kelurahan Jumerto	74
4.4.1 Tahap Penguatan Institusi.....	74
4.4.2 Tahap Penguatan Modal	81
4.4.3 Pengembangan Keterampilan Pengurus dan Anggota	
LKMM	86
4.5 Pola Pemanfaatan PUM-RTM	89
4.5.1 LKMM Barokah.....	90
4.5.2 LKMM Jumerto Lor.....	97
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	103

5.1 Kesimpulan 103

5.2 Saran 105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1.1 Penerima PUM-RTM di Kelurahan Jumerto	2
1.2 Klaster Program Penanggulangan Kemiskinan.....	3
1.3 Jumlah LKMM di Kabupaten Jember	6
1.4 Jumlah LKMM per-Kecamatan	7
2.1 Tipe-tipe Evaluasi Formal.....	39
3.1 Tehnik Menguji Keabsahan Data	55
4.1 Luas Wilayah Kelurahan Jumerto	59
4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
4.3 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Menurut Usia	60
4.4 Jumlah Penduduk Prasejahtera di Kecamatan Patrang	61
4.5 Kesejahteraan Keluarga	61
4.6 Alamat LKMM di Kelurahan Jumerto	70
4.7 Sejarah LKMM Di Kelurahan Jumerto.....	74
4.8 Penguatan Institusi.....	80
4.9 Penguatan Modal LKMM di Kelurahan Jumerto.....	85
4.10 Pengembangan Keterampilan LKMM di Kelurahan Jumerto.....	89
4.11 Perkembangan peminjam dan modal di LKMM Jumerto Lor	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
2.1 Perangkap Kemiskinan, Robert Chambers	29
2.2 Kerangka Berpikir	45
2.3 Monitoring dan Evaluasi dalam hubungannya dengan proses program .	47
2.4 Kerangka Berpikir	48
4.1 Struktur Pemerintahan Desa Jumerto	62
4.2 Proses Peminjaman di LKMM Barokah	93
4.3 Pola Pemanfaatan Pada LKMM Barokah	96
4.4 Proses Peminjaman pada LKMM Jumerto Lor	99
4.5 Pola Pemanfaatan Pada LKMM Jumerto Lor	102

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN 2 SK KEPALA DINAS KOPERASI UMKM JEMBER NOMOR
518/1371.A/436.313/2005

LAMPIRAN 3 SK KEPALA DINAS KOPERASI UMKM JEMBER NOMOR
518/128/UMKM/410/2010

LAMPIRAN 4 PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 14 TAHUN 2011

LAMPIRAN 5 KEPUTUSAN BUPATI JEMBER NOMOR 188.45/274/012/2011

LAMPIRAN 6 KEPUTUSAN KADINAS KOPERASI UMKM JEMBER
NOMOR 518/410/2010

LAMPIRAN 7 LAPORAN KINERJA LKMM

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang evaluasi program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) merupakan inovasi program pengentasan kemiskinan yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Jember serta dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember. Program ini mulai dikembangkan pada tahun 2005. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember pada tahun 2005 mengeluarkan Surat Keputusan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) Kabupaten Jember untuk mengembangkan dan mensukseskan Program Pengembangan Klaster Bisnis dalam rangka Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Mengingat Perda Nomor 23 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro kecil dan Menengah Kabupaten Jember, Keputusan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Keputusan Bupati Jember DASK TA. 2005 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jember sebagai acuan regulasi untuk program PUM-RTM.

Berdasarkan penuturan Kepala Sie Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember, Agus Edi saat di wawancarai pada 8 Desember 2017 pukul 09.00, mengungkapkan bahwa Inovasi PUM-RTM dirancang secara khusus dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga dengan mengembangkan usaha mikro sebagai alternatif usaha sampingan, berbasis pada penguatan institusi, berorientasi pada keberlanjutan usaha serta menyentuh langsung pada keluarga miskin dan memiliki 3 tahap yaitu tahap penguatan institusi, tahap penguatan modal usaha dan tahap peningkatan keterampilan. Ketiga aktivitas tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Aktivitas penguatan modal usaha dilaksanakan setelah penguatan institusi dilakukan secara benar. Kegiatan PUM-RTM akan bermuara pada terbentuknya dua institusi yaitu

institusi ekonomi yang bernama LKMM (Lembaga Keuangan Masyarakat Mikro) dan institusi sosial yang bernama Pokmas (kelompok masyarakat).

Tujuan dari program PUM RTM menurut Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan LKMM adalah sebagai berikut meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan Rumah Tangga Miskin (RTM), menyediakan sumber permodalan untuk pengembangan usaha mikro, mewujudkan kemandirian dan kapabilitas komunitas dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi, dan memfasilitasi terbentuknya institusi ekonomi yang bernama LKMM (Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat) serta terbentuknya Institusi social (Pokmas). Sedangkan syarat dan sasaran PUM-RTM menurut Petunjuk Teknis PUM-RTM tahun 2005 adalah (1) ibu Rumah Tangga Miskin (RTM) yang telah bergabung dalam wadah kelompok, (2) bersedia mengikuti pelatihan Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM), (3) memiliki usaha atau usaha sampingan (4) berdomisili dalam wilayah kerja Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM), (5) berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah menikah, (6) bersedia mengikuti petunjuk PK LKMM dan mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART), (7) Usahanya dibidang perdagangan/ industri rumah tangga yang layak diberikan pinjaman sehingga yang bersangkutan dapat melaksanakan upaya peningkatan hasil dan kesejahteraan keluarga, dan (8) mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu dan bersedia melaksanakan tanggung renteng kelompok.

Program PUM-RTM mempunyai sasaran utama yaitu ibu Rumah Tangga Miskin. Kelurahan Jumerto merupakan kelurahan yang menerima program PUM-RTM pada tahun 2006 pada LKMM Barokah dan tahun 2010 pada LKMM Jumerto Lor. Terdapat 60 orang penerima pada tahun 2006 dan 35 orang penerima pada 2010 yang digunakan untuk kegiatan usaha. Seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Penerima PUM-RTM di Kelurahan Jumerto

LKMM	Tahun Pertama	Jumlah Penerima PUM-RTM
LKMM Barokah	2006	60 orang
LKMM Jumerto Lor	2010	35 orang

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember

Tabel 1.1 menggambarkan bahwa masih banyaknya masyarakat terutama ibu Rumah Tangga Miskin yang memerlukan bantuan dari pemerintah untuk menambah penghasilan keluarganya. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut. Hal ini disebabkan pemerintah berperan sebagai penyelenggara sah dalam mengatur negara. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Artinya bahwa pemerintah dituntut untuk bertanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Tanggung jawab terhadap penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Melalui intervensi dari pemerintah diharapkan tercapai negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk memandirikan masyarakat dalam berusaha meningkatkan taraf hidupnya yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (2009:7) adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan yang tersedia dilingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dapat mengurangi ketergantungan masyarakat dalam memperoleh dana yang diberikan oleh pemerintah secara langsung kepada masyarakat yang sifatnya tidak produktif. Strategi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan difokuskan melalui klaster-klaster program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini,

Tabel 1.2. Klaster program-program penanggulangan kemiskinan

Jenis	Bentuk Program	Sasaran	Filosofi	Program
Klaster I	Bantuan dan Perlindungan sosial	Diperuntukan bagi mereka yang termasuk dalam kelas rumah tangga sangat miskin	Kelompok masyarakat yang seperti ini di beri “ikan” agar bisa	Contoh : Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Raskin,

			memenuhi kebutuhan hidupnya.	Jamkesmas, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Siswa Miskin(BSM)
Klaster II	Pemberdayaan Masyarakat	Diperuntukan kepada masyarakat miskin yang telah mendapatkan peningkatan, baik gizi, kesehatan, dan pendidikan.	Pada program ini masyarakat tidak diberikan melainkan pancing, dengan harapan mereka bisa mencari ikan sendiri	Contoh : PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri
Klaster III	Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah	Kelompok-kelompok masyarakat yang telah ditingkatkan dan diberdayakan kemandiriannya	Pada program ini, masyarakat diberi kail, jala dan perahu	Contoh : Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Sumber ; Sumodiningrat (2009:71)

Table 1.2 memperlihatkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat terletak pada kalster II dan III. PUM-RTM merupakan Klaster ketiga dari tiga klaster strategi pemerintah penanggulangan kemiskinan. Pada kalster III ini merupakan langkah lanjutan dari klaster I dan II. Masyarakat dalam klaster III ini menyadari bahwa mereka memiliki kemampuan dan potensi untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan mendorong mereka untuk ikut serta dalam proses pembangunan.

Prosedur program PUM-RTM berawal dari inisiatif bahwa permasalahan pada masyarakat yaitu kesulitan dalam mengakses permodalan. Masyarakat hanya mempunyai pilihan meminjam modal pada rentenir yang ada di lingkungannya. Ketika masyarakat terjebak pada rentenir, masyarakat sangat susah untuk

membangun kemampuan dirinya dalam permodalan karena bunga yang diberikan cukup tinggi dan kejadian ini berlarut-larut seperti hidupnya dipasung. Sementara program-program pemberdayaan yang selama ini ada hanya sebagai formalitas belaka dan tidak ada tanggung jawab dari semua pihak. Apalagi program yang melalui perangkat desa tidak menjamin program itu jalan dan tepat sasaran, karena terkadang perangkat desa juga hanya formalitas dalam memberikan program tanpa adanya penjelasan dan tanpa mengetahui permasalahan masyarakat yang ada. Sehingga program PUM-RTM yang dilakukan Dinas Koperasi dalam memilih pengurus LKMM pelaksanaannya dilakukan dan dipilih secara rahasia, tanpa calon dan tanpa kampanye yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya dan rasa memiliki serta bertanggung jawab untuk kemajuan masyarakatnya dibidang ekonom dan sosial. (Petunjuk Teknis PUM-RTM, 2005)

Perlu adanya institusi pra koperasi yang mampu mengelola keuangan untuk permodalan masyarakat agar masyarakat tidak terjebak secara terus menerus meminjam pada rentenir. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember mempunyai inovasi agar masyarakat mempunyai institusi yang mampu mengelola keuangan dimasyarakat yaitu dengan membentuk Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM). Pelaksanaan PUM-RTM di Kabupaten Jember menggunakan prinsip tanggung renteng yang berarti masyarakat atau kelompok yang terbentuk bertanggung jawab bersama baik dalam pinjaman dan menjamin secara bertimbang balik terhadap kerugian dari para anggotanya. Kelompok usaha yang terdiri atas 5 orang dapat mengajukan kredit usaha tanpa agunan antara Rp 50.000 hingga Rp 1.000.000,00. Dengan kucuran kredit berjangka waktu 10 minggu yang diangsur setiap minggu dengan bunga 0 sampai 10 persen, terobosan ini sangat membantu kelompok usaha kecil dan menengah.

Program PUM-RTM di Kabupaten Jember dapat dibilang berhasil karena telah diakui secara nasional. Hal ini terbukti dengan berbagai penghargaan yang diraih salah satunya adalah pada tahun 2008 dan 2009 Jember meraih Otonomi Award dari *The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi* (JPIP) dengan kategori kesinambungan inovasi ekonomi mengungguli kabupaten Bondowoso dan Blitar

(dalam <http://www.jpip.or.id/artikelview-345.html> diakses 6 maret 2017). Kemudian Metrotv MDGs Award Tahun 2008 dari PBB dan Metrotv sebagai Kabupaten terbaik dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pencapaian target Millenium Development Goals. Pada tahun 2010 Kabupaten Jember kembali mengukir prestasi dengan dipilihnya menjadi nominator peraih Innovative Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri bersama dengan 29 nominator lainnya dari Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Indonesia (dalam <http://umkm-jember.web.id/index.php/component/content/article/36-headline/72-kabupaten-jember-nominator-innovative-government-award-2010> diakses 6 Maret 2017). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan LKMM di Kabupaten Jember sangat cepat. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) di Kabupaten Jember 5 tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 1.3 Jumlah LKMM di Kabupaten Jember 5 tahun terakhir

No	Tahun	Jumlah LKMM
1	2012	248
2	2013	312
3	2014	433
4	2015	454
5	2016	480

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM

Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa perkembangan LKMM mengalami peningkatan tiap tahun. Pada tahun 2012 jumlah lembaga sebanyak 248. Tahun 2013 terdapat 312 lembaga, tahun 2014 jumlah lembaga sebanyak 433, tahun 2015 terdapat 454 lembaga dan pada tahun 2016 sebanyak 480 lembaga yang tersebar di seluruh Kabupaten Jember. Kecamatan Patrang merupakan kecamatan dengan LKMM terbanyak di Kabupaten Jember, berikut ini merupakan jumlah LKMM terbanyak setiap kecamatan di Kabupaten Jember :

Tabel. 1.4 Jumlah LKMM terbanyak per-Kecamatan se-Kabupaten Jember

No	Kecamatan	Jumlah LKMM
1	Kaliwates	29
2	Patrang	33
3	Sumbersari	30
4	Bangsalsari	19
5	Jelbuk	21

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Jember

Tabel 1.4 menjelaskan bahwa Kecamatan Patrang merupakan kecamatan dengan jumlah LKMM terbanyak yaitu 33 lembaga dibandingkan dengan kecamatan lain. Kelurahan Jumerto merupakan salah satu kelurahan yang menerima dan menjalankan program PUM-RTM di Kecamatan Patrang. Kelurahan Jumerto memiliki 2 LKMM yang mendapat dana hibah dari Dinas Koperasi yaitu LKMM Barokah dan LKMM Jumerto Lor. LKMM Barokah menerima bantuan dana sebesar Rp 56.000.000 pada tahun 2006 untuk dikelola dan dikembangkan sedangkan LKMM Jumerto Lor menerima bantuan dana sebesar Rp 25.000.000 pada tahun 2010.

Hasil wawancara dengan Ibu Latifa Ketua Koperasi Wanita “Barokah” Kelurahan Jumerto pada tanggal 6 Maret 2017 pukul 09.30 WIB mengatakan bahwa LKMM Barokah dalam perkembangannya sudah berjalan selama 3 tahun yaitu mulai tahun 2006-2009, pada LKMM Barokah telah berubah institusi menjadi Koperasi Wanita dikarenakan pengurus serta anggota dalam proses pengembalian atau pada saat meminjam dilakukan secara tertib, akan tetapi pada proses peminjaman masyarakat boleh tidak berkelompok saat meminjam serta banyak masyarakat lain yang menganggap bahwa PUM-RTM ini merupakan bantuan hibah sehingga tidak wajib untuk dikembalikan sehingga banyak yang menggunakan bantuan untuk keperluan lain seperti membeli kasur, pakaian dan lain-lain disisi lain ada juga masyarakat yang menggunakan modal untuk usaha seperti berjualan sayur dipasar, berjualan kerupuk, dan usaha toko.

Sedangkan perkembangan LKMM Jumerto Lor berbeda dengan LKMM Barokah, LKMM Jumerto Lor banyak mengalami permasalahan sehingga mengakibatkan matinya LKMM pada tahun 2011. Salah satu penyebab matinya

LKMM Jumerto Lor yaitu tidak ada perputaran modal yang dilakukan karena banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa pinjaman yang diberikan merupakan uang hibah, sehingga tidak wajib untuk dikembalikan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurul selaku Koordinator LKMM Jumerto Lor pada tanggal 6 Maret 2017 pukul 13.45 WIB bahwa, LKMM Jumerto Lor pada proses peminjaman mewajibkan anggota untuk berkelompok akan tetapi hanya 1 tahun LKMM Jumerto Lor berjalan tidak ada kegiatan yang disebabkan tidak berputarnya modal karena masyarakat menganggap bantuan hibah sehingga tidak wajib untuk dikembalikan hanya ada satu kelompok yang menggunakan untuk usaha yaitu kelompok mawar.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang sama antara LKMM Barokah dan LKMM Jumerto Lor yaitu tafsir masyarakat terhadap pinjaman yang menganggap modal tersebut adalah dana hibah serta beranggapan tidak perlu dikembalikannya pinjaman mengakibatkan seretnya pengembalian bahkan matinya LKMM. Pada proses peminjaman yang ada di LKMM Barokah diperbolehkan meminjam secara tidak berkelompok hal ini tidak sesuai dengan petunjuk teknis PUM-RTM tahun 2005 yang menyatakan penerima bantuan harus bergabung dalam wadah kelompok. Akan tetapi LKMM Barokah mengalami perkembangan dan perubahan institusi ekonomi dari LKMM menjadi Koperasi Wanita karena proses peminjaman dan pengembalian tertib yang berakibat adanya perputaran modal yang dilakukan pengurus dengan anggota sedangkan LKMM Jumerto Lor mati. Pemanfaatan pinjaman pada kedua LKMM yang seharusnya untuk usaha tapi ada juga untuk keperluan lain seperti membeli kasur, pakaian serta perabotan rumah tangga. Akan tetapi dalam pemanfaatan program PUM-RTM banyak juga masyarakat yang menggunakan modal tersebut untuk berwirausaha. Hal tersebut menggambarkan bahwa adanya perbedaan upaya yang dilakukan antara LKMM Barokah dengan LKMM Jumerto Lor, baik antara pengurus LKMM dan anggota untuk mengembangkan modal yang ada.

Evaluasi program perlu dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu program yang telah dijalankan. Dengan evaluasi akan diketahui faktor

keberhasilan, penghambat dan faktor penyebab kegagalan sehingga segera dapat diketahui solusi untuk perkembangan program tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti evaluasi program PUM-RTM pada Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang dengan harapan untuk mengetahui apakah dengan perubahan institusi ekonomi juga berimplikasi pada perkembangan anggota kelompok yang baik pula. Sebab apabila dalam perkembangan institusi ekonomi baik, maka *outcome* program PUM-RTM terhadap kelompok dapat dikatakan tercapai. Penulis mengambil judul “Evaluasi Program Pengembangan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah adalah kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi (Usman dan Akbar, 2005:16). Masalah penelitian dapat muncul akibat adanya keraguan, kesangsian, kebingungan atas adanya suatu fenomena. Sedangkan rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2011:35). Rumusan masalah adalah usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahan masalahnya. Berdasarkan latar belakang dan definisi rumusan masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana proses pengelolaan program PUM-RTM di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan target yang hendak diraih dari pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian menyampaikan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dirumuskan. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui proses pengelolaan program PUM-RTM di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan gambaran kegunaan suatu penelitian tersebut baik bagi kepentingan ilmu pengetahuan (akademik), pemerintah, dan kehidupan masyarakat secara luas. Manfaat penelitian didasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Peneliti

Melatih diri dan menambah wawasan peneliti melalui pengimplementasian teori yang diterima di bangku kuliah, sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka kegiatan menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi administrator publik dalam membuat kebijakan yang lebih baik. Sehingga pelaksanaan program yang dibuat dapat berjalan secara optimal, efektif dan tepat sasaran.

3. Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi maupun sumbangsih terhadap pengembangan ilmu Administrasi Negara, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, khususnya terkait konsep evaluasi kebijakan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Setiap penelitian yang dilakukan haruslah memiliki kerangka berfikir, keberadaan kerangka berfikir adalah untuk memudahkan perumusan permasalahan di dalam penelitian. Dalam membangun kerangka berfikir diperlukan landasan teori yang relevan untuk membangun argumentasi yang logis dan sistematis. Pengertian teori menurut Kerlinger yang dikutip oleh Sugiyono (2011:41) bahwa, “teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, proposisi, yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.” Selanjutnya menurut Sitirahayu yang dikutip Sugiyono (2011:41), menyatakan, “suatu teori akan memperoleh arti penting, bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada”.

Definisi selanjutnya dijelaskan oleh Marx dan Goodson yang dikutip oleh Sugiyono (2011:57) bahwa teori ialah aturan yang menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan fenomena alamiah yang terdiri atas representasi simbolik dari (1) hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian (yang dapat diukur), (2) mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian, dan (3) hubungan-hubungan yang disimpulkan serta manifestasi hubungan empiris apapun secara langsung.

Konsep memberikan kerangka berfikir untuk membahas dan mengkaji masalah yang menjadi inti pokok suatu penelitian. Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep diantaranya adalah.

1. Penelitian Terdahulu;
2. Pembangunan;
3. Kemiskinan;

4. Pemberdayaan masyarakat;
5. Evaluasi Kebijakan;
6. Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM).

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung kajian yang akan dilakukan. Penyajiannya dapat dalam bentuk narasi atau matriks. Penelitian terdahulu dijadikan penulis sebagai acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang diajukan.

Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
Fajri Maulana 2014	Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2014	Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) pada pelaksanaan, output, outcome dan dampak program	Hasil evaluasi dari penguatan Institusi bahwa tidak semua kelompok menjalankan fungsi yang ditetapkan oleh dinas. Dari hasil evaluasi penguatan modal dana hanya dikururkan diawal program saja yakni sebesar Rp 25 juta tanpa ada tambahan dana lagi. Dari hasil evaluasi pengembangan keterampilan di Kelurahan LKMM , masing-masing LKMM tidak melakukan kegiatan yang bersifat pengembangan keterampilan
Nuria Inni Izatika 2016	Evaluasi Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) Di Kabupaten Jember	1. hasil capaian Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin dengan tujuan	1. Akses, Pada pelaksanaan Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di

		<p>Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di Kabupaten Jember</p> <p>2. evaluasi efektivitas pelaksanaan Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di Kabupaten Jember</p>	<p>Kabupaten Jember akses untuk mendapatkan program ini mudah. Akses yang mudah tersebut diketahui dari temuan yang menyatakan bahwa sangat mudah untuk mendapatkan program tersebut dengan cara mendaftar sebagai anggota Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) melalui pengurus LKMM terdekat. Persyaratan yang mudah serta jumlahnya tidak banyak menjadikan program tersebut sangat mudah diakses bagi kalangan rumah tangga miskin. Kemudahan akses program juga ditunjukkan dengan adanya kemudahan bagi kelompok sasaran untuk menghubungi secara langsung pengurus LKMM sebagai implementator program karena tinggal di lingkungan yang sama.</p> <p>2. Cakupan, pelaksanaan Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di Kabupaten Jember dilakukan di setiap kecamatan yang</p>
--	--	---	--

		<p>berada di dusun/lingkungan tertentu. Namun dalam perkembangannya, tidak semua LKMM yang didirikan tersebut dapat terus berjalan. Dana bantuan modal usaha yang dipinjamkan tidak dapat kembali sehingga menghambat kondisi keuangan LKMM. Adanya sistem tanggung renteng belum dapat menjamin adanya pertanggungjawaban dalam pengembalian dana pinjaman sehingga anggota lain yang belum mendapatkan pinjaman tidak mendapatkan layanan pinjaman. Dengan demikian rumah tangga miskin yang ada di wilayah tersebut tidak dapat terjangkau dalam program.</p> <p>3. Frekuensi, dalam Pelaksanaan Pogram Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) terdapat pelatihan yakni kepemimpinan, kewirausahaan dan administrasi bagi para pengurus LKMM. hal tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola bantuan</p>
--	--	---

		<p>modal usaha yang dilakukan secara rutin 6 bulan sekali. Sedangkan pada frekuensi pelayanan simpan pinjam anggota LKMM dilakukan secara rutin seminggu sekali. Dengan demikian kegiatan yang ada dalam program dilaksanakan secara rutin dan terjadwal sehingga dapat dikatakan berkelanjutan.</p> <p>4. Bias, terdapat penyimpangan atau bias dalam pelaksanaan program usaha mikro rumah tangga miskin (PUM-RTM). Hal ini dapat dilihat pada penggunaan dana bantuan pinjaman modal usaha yang tidak dialokasikan untuk kepentingan usaha oleh anggota LKMM. Dana bantuan usaha tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau merupakan kegiatan konsumtif. Hal ini bertentangan dengan tujuan program yakni mendorong produktifitas dan peningkatan pendapatan keluarga miskin diperlukan infrastruktur ekonomi berupa</p>
--	--	--

		<p>Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) di dusun/ lingkungan yang berperan melayani pinjaman modal usaha secara bergulir dengan pola tanggung renteng. Di sisi lain, pengurus LKMM juga memberikan izin untuk meminjam dana tersebut untuk keperluan sehari-hari sehingga dana bantuan pinjaman modal tersebut tidak sepenuhnya digunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>5. Akuntabilitas, Pertanggungjawaban pelaksanaan program usaha mikro rumah tangga miskin (PUM-RTM) dilakukan oleh pengurus LKMM kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember dengan menyerahkan laporan hasil kegiatan melalui fasilitator atau pendamping PUM-RTM. Dalam pelaksanaannya pengurus LKMM tidak seluruhnya melaporkan secara rutin kepada Dinas Koperasi dan UMKM meskipun pihak fasilitator atau pendamping PUM-RTM telah</p>
--	--	---

		<p>melakukan monitoring terhadap LKMM yang didampinginya secara rutin. Hal ini menyebabkan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember kesulitan untuk mengetahui perkembangan seluruh LKMM yang ada di lapangan. Dengan demikian akuntabilitas pengurus LKMM dalam menjalankan Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di Kabupaten Jember masih belum maksimal.</p> <p>6. Kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, pelaksanaan Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di Kabupaten Jember sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini karena program tersebut menyediakan dana bantuan pinjaman modal usaha bagi rumah tangga miskin. Ketersediaan modal usaha yang terbatas bagi rumah tangga miskin menjadikan program ini membantu untuk mendapatkan modal</p>
--	--	--

			dengan bunga rendah. Program ini juga merupakan alternatif yang lebih baik untuk melakukan pinjaman dari pada kepada rentenir yang meminjamkan dana dengan bunga yang tinggi.
Dewi Fajar Dening Aprilliya 2011	Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) Di Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) Amanah Desa Biting Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Tahun 2011	Pelaksanaan mekanisme simpan pinjam dari tahap pengajuan, tahap realisasi dan tahap pengembalian pinjaman	<p>1. Tahap Pengajuan</p> <p>Dalam program PUM-RTM yang menjadi tahap pengajuan adalah konsultasi tata cara penajuan kredit, menerima dan mencatat permohonan kredit, meneliti kelayakan kredit, minta persetujuan pada rapat kelompok. Ke empat tahap itu dinilai tidak berjalan lancar. Karena dari ke empat tahap tersebut hanya satu saja yang dilaksanakan sesuai dengan buku Pedoman Petunjuk</p> <p>Pelaksanaan.</p> <p>2. Tahap Realisasi</p> <p>Tahap realisasi yang dicapai masih sama seperti pada tahap pengajuan, karena dari ke empat tahap pada tahap realisasi ini berjalan tidak lancar. hasil yang di dapat di nilai tidak</p>

		<p>sesuai dengan buku Pedoman Petunjuk Pelaksanaan. Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) Amanah desa Biting Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember mempunyai alasan tersendiri terkait tidak melaksanakan pedoman yang ada. Itu semua melihat kondisi anggota dan untuk kelancaran Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat itu sendiri.</p> <p>3.Tahap Pengembalian</p> <p>Pada tahap pengembalian pinjaman tidak berjalan dengan lancar karena dari keenam tahap tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Banyak pula sasaran program tidak mengetahui akantahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan</p>
--	--	---

2.2 Pembangunan

Menurut Bryan dan White (1982) dalam Surjono dan Nugroho (2008:2) pembangunan memiliki arti sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya, yang kemudian hal tersebut memiliki lima implikasi utama di antaranya:

1. pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*),
2. pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai, dan kesejahteraan (*equity*),
3. pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai kemampuannya. Kepercayaan dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuatan untuk memutuskan (*empowerment*),
4. pembangunan berarti membangkitkan kemampuan membangun secara mandiri (*sustainability*), dan
5. pembangunan berarti mengurangi ketergantungan, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati (*interdependence*).

Pembangunan berpusat pada manusia merupakan paradigma yang berkembang di era 80-an akibat respon terhadap kegagalan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi. Menurut Midgley (1995) pembangunan yang dilakukan oleh seluruh Negara menggunakan instrumen ekonomi dalam mencapai tujuan dari pembangunan. Namun hal tersebut kemudian menimbulkan distorsi dari hakikat dasar pembangunan yaitu mewujudkan kesejahteraan manusia. Sehingga Midgley percaya bahwa pembangunan yang berorientasi pada ekonomi harus dilengkapi dengan keberpihakan pada sisi sosial kemanusiaan, yang perlu dilakukan secara sinergis oleh pemerintah, masyarakat dan individu. Asumsi dasar dari pembangunan berpusat pada manusia (rakyat) menurut Korten yaitu dasar pembangunan yang berpusat pada rakyat itu menginginkan alternatif paradigma pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada produksi dan

kebutuhan dasar tetapi juga pada potensi manusia. Alasannya karena menurut Chambers (1987) setiap manusia memiliki potensi dan daya untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik (Surjono dan Nugroho, 2008:3).

Menurut UNDP (1998) (dalam Marsuki, 2006:8) konsep pembangunan yang menekankan pada pendekatan pembangunan manusia terdiri atas empat pilar:

1. pemberdayaan yaitu upaya untuk mendinamisir kelompok masyarakat yang mempunyai kapasitas produktif tapi kesempatan untuk akses lingkungan hidup dan usaha yang bersifat modern dengan tanpa harus menjadi korban transplanasi nilai dan kelembagaan asing,
2. aspek pemerataan mengandung makna tersedianya kesempatan merata, berimbangdan adil dalam pemanfaatan sumber daya mereka guna peningkatan taraf hidupnya,
3. produktivitas yaitu upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian yang harus ramah terhadap tenaga kerja (*employment-friendly growth*), dan
4. kesinambungan yaitu pentingnya kegiatan pembangunan diarahkan pada pencapaian kondisi kegiatan yang berkembang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi kesejahteraan generasi mendatang.

Pembangunan manusia merupakan suatu pendekatan yang menempatkan manusia sebagai faktor kunci yang memainkan peran penting dalam segala segi. Pembangunan berbasis manusia mencakup pembangunan masyarakat (*community based development*) dan pembangunan manusia (*people centered development*). Dalam paradigma ini berusaha mengangkat martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki harga diri, kemampuan, intelegensi dan perasaan. Manusia tidak disamakan dengan alat produksi untuk melipat gandakan hasil semata, hendaknya manusia dihargai dan dihormati dengan cara meningkatkan kualitas SDM sehingga menempatkan manusia pada martabat yang lebih baik (Surjono dan Nugroho, 2008:13). Menurut Tjokrowinoto (dalam Mardikanto dan Soebiato,

2013:18) memberikan deskripsi mengenai ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat (manusia) di antaranya:

1. prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri,
2. fokus di antaranya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka,
3. pendekatan ini mentoleransi variasi vokal dan karenanya sifatnya fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal,
4. pendekatan ini menekankan pada proses *social learning* yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar, dan
5. proses pembentukan jejaring (*Networking*) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat serta satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri.

Pembangunan berpusat pada rakyat (manusia) adalah asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis. Karena itulah pembangunan tersebut dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta untuk mengerahkan minat masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan tentang berbagai hal yang memiliki dampak bagi masyarakat, dan mencoba mempromosikan kekuatan manusia bukan mengabadikan ketergantungan antara birokrasi dengan masyarakat (Mardikanto, 2013:18). Pembangunan berpusat pada manusia juga harus berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya serta potensi apa yang dimiliki oleh masyarakat untuk dapat dikembangkan. Oleh karena itu, dalam pembangunan tersebut diperlukan studi dan analisis kebutuhan serta potensi masyarakat (Anwas, 2013:41).

Selanjutnya Korten (1984) mengkritik paradigma kebutuhan dasar karena kurang perhatian terhadap keterpuasan dari posisi umat manusia dalam keterpuasan. Hal tersebut mengingatkan bahwa “terwujudnya masyarakat mencapai

kemakmuran yang melimpah, yang menjadikan si miskin menerima secara pasif pelayanan apapun yang dipilih serta diberikan oleh birokrasi pemerintah berdasar kearifan yang waktu dan tempatnya ditentukan pula oleh birokrasi pemerintah adalah tidak dapat diterima”. Inilah yang kemudian memunculkan sebuah paradigma baru sebagai bagian dari alternatif pembangunan yaitu pembangunan yang berpusat pada manusia.

Menurut Korten (1984) pembangunan yang berpusat pada manusia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut .

- a. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat di tingkat lokal, yang di dalamnya rakyat memiliki identitas dan peran yang dilakukan sebagai partisipan yang dihargai.
- b. Fokus utamanya adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengawasi dan mengarahkan aset-aset untuk memenuhi kebutuhan yang khas menurut daerah mereka sendiri.
- c. Paradigma ini mempunyai toleransi terhadap perbedaan dan karenanya mengakui arti penting pilihan nilai individual dan pembuatan keputusan yang terdistribusi.
- d. Di dalam melaksanakan pembangunan, paradigma ini menekankan pada proses belajar sosial “*sosial learning*” yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri pada saling belajar.
- e. Budaya kelembagaan ditandai adanya organisasi yang mengatur diri sendiri dan lebih terdistribusi yang menandai unit-unit lokal yang mengelola diri sendiri, yang berinteraksi satu sama lain guna memberikan umpan balik pelaksanaan yang cepat dan kaya kepada semua tingkat organisasi yang membantu tindakan koreksi diri. Dengan demikian keseimbangan yang lebih baik antara struktur vertikal dan horizontal dapat diwujudkan.
- f. Jaringan koalisi dan komunikasi pelaku (aktor) lokal dan unit-unit lokal yang mengelola diri sendiri yang mencakup kelompok-kelompok penerima manfaat lokal, organisasi pelayanan daerah, pemerintah daerah, bank-bank

pedesaan dan lain-lain akan menjadi basis tindakan-tindakan lokal yang diarahkan untuk memperkuat pengawasan lokal yang mempunyai dasar yang luas atas sumber-sumber dan kemampuan lokal untuk mengelola sumber mereka.

Pembangunan yang berpusat pada manusia memandang manusia sebagai warga masyarakat baik sebagai fokus utama maupun sumber utama pembangunan. Pembangunan yang berpusat pada manusia akan dapat mengubah peranan masyarakat sebagai penerima pasif pelayanan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi anggota masyarakat yang mampu berperan aktif di dalam pembangunan. Seperti pembangunan melalui pendekatan *bottom up*, dimana strategi pembangunan yang dilaksanakan dengan asumsi bahwa masyarakat telah memiliki kemampuan untuk memikirkan dan mengerjakan kebutuhannya sendiri serta pemerintah hanya turut serta dalam sistem administrasi. Bukan melalui pendekatan *top down* yang dilaksanakan berdasarkan jalan pikiran bahwa masyarakat belum bisa memikirkan dan mengerjakan apa yang baik untuk mereka. Jadi semua dirancang dan diturunkan dari pemerintah. Melalui pembangunan manusia yang bersifat *bottom up* akan menghasilkan pembangunan yang efektif dan efisien serta member hasil yang optimal dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi atau sumber daya yang ada.

Berbagai konsep mengenai pembangunan di atas menunjukkan bahwa dalam perkembangannya konsep pembangunan mengalami pergeseran paradigma. Ini menunjukkan bahwa paradigma pembangunan bersifat dinamis. Apa yang pada masa lalu dipandang sebagai sebuah paradigma yang baik ternyata sudah tidak relevan pada saat ini dan muncullah paradigma baru sebagai kritik dan koreksi dari paradigma sebelumnya.

2.3 Kemiskinan

Bank Dunia (dalam Maipita, 2014) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketiadaan tempat tinggal, sakit dan tidak mampu untuk berobat ke dokter, tidak

mampu untuk bersekolah, dan tidak tahu baca tulis. Kemiskinan adalah bila tidak memiliki pekerjaan sehingga takut menatap masa depan, tidak memiliki akses akan sumber air bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, kurangnya representasi dan kebebasan.

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Menurut Cox (2004) dalam Suharto (2014:132), kemiskinan dibagi kedalam beberapa dimensi, berikut.

a. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi.

Di negara-negara berkembang seringkali orang yang miskin semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.

b. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan.

Kemiskinan subsisten (kemiskinan yang diakibatkan oleh pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan di perkotaan).

c. Kemiskinan sosial.

Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dalam kelompok minoritas.

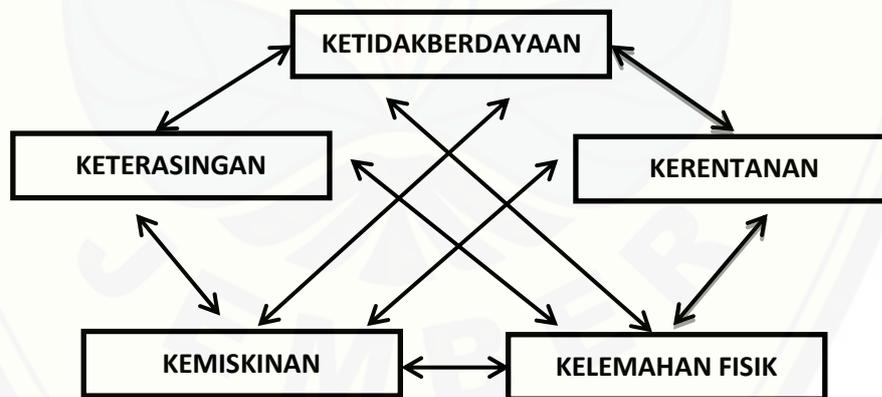
d. Kemiskinan konsekuensial.

Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, dan kerusakan lingkungan.

Dari berbagai definisi kemiskinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan memiliki dimensi yang luas. Tidak hanya pada ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya), tetapi kemiskinan juga mencakup aspek sosial, politik, budaya, dan partisipasi dalam masyarakat.

Penyebab kemiskinan diungkapkan oleh Sumodiningrat (2004:15) sebagai berikut; (1) kemiskinan alami, yaitu kemiskinan yang disebabkan keterbatasan kualitas sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Sebagai akibatnya, sistem produksi beroperasi tidak optimal dengan efisiensi rendah; (2) kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan; (3) kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan.

Chambers (dalam Soetrisno, 2001:25) berasumsi bahwa inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan, satu dan lainnya terjalin dalam suatu kerangka yang disebutnya *deprivation trap* sebagaimana dijelaskan dalam bagan di bawah ini.



Gambar 2.1 Perangkap Kemiskinan, Robert Chambers (Sumber: Soetrisno, 2001:26)

Perangkap kemiskinan yang terdiri dari lima unsur di atas saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam suatu jalinan interaksi timbal-balik, dari kelima unsur tersebut kerentanan dan ketidakberdayaan mendapatkan perhatian utama. Karena menurut Chambers (dalam Soetrisno, 2001:27) kerentanan adalah suatu kondisi dimana keluarga miskin tidak memiliki kesiapan mental maupun

material sehingga menyebabkan perilaku keluarga miskin untuk menjual harta benda serta aset mereka. Sedangkan ketidakberdayaan tercermin dalam perilaku penguasa yang melakukan kecurangan sehingga berimplikasi pada masyarakat miskin misalnya dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin pihak penguasa mengambil keuntungan (Soetrisno, 2001:27). Hal ini mengakibatkan masyarakat miskin semakin tidak berdaya dan bantuannya menjadi bias, karena bantuan yang seharusnya diperuntukkan kepada masyarakat miskin jatuh kepada kelas di atasnya yang seharusnya tidak berhak memperoleh subsidi tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, perangkap kemiskinan tidak dimaknai jauh dari lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle poverty*). Sebagaimana dalam lingkaran setan kemiskinan yang menggunakan produktivitas sebagai kunci untuk memutuskan rantai tersebut, maka dalam perangkap kemiskinan ini, ketidakberdayaan dan kerentanan menjadi kunci untuk keluar dari perangkap. Tentunya dapat kita lihat dari berbagai program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun secara substansi belum menyentuh pada akar persoalan kemiskinan.

Secara ekonomis, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks ini menyangkut aspek finansial dan jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsepsi ini maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang disebut garis kemiskinan. Definisi kemiskinan yang menggunakan pendekatan kebutuhan dasar seperti ini diterapkan oleh depsos terutama dalam mendefinisikan fakir miskin. Bahwa yang disebut fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga mengeluarkan ukuran rumah tangga miskin. BKKBN mengelompokan tingkat

kesejahteraan keluarga ke dalam lima kelompok, yaitu: (1) keluarga prasejahtera atau sangat miskin, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, dan kesehatan; (2) keluarga sejahtera I atau miskin, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologis, seperti kebutuhan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi; (3) keluarga sejahtera II, yaitu keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung, dan memperoleh informasi; (4) keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial-psikologis, dan pengembangan keluarga, tetapi belum dapat memberi sumbangan yang teratur bagi masyarakat; (5) keluarga sejahtera IV, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial-psikologis, dan pengembangannya serta telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan (Maipita, 2014.hal 52).

Kemiskinan tidak timbul dengan sendirinya, banyak faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan hal itu terjadi. Isdjoyo dalam Maipita (2014) membedakan penyebab kemiskinan di desa dan di kota. Kemiskinan di desa terutama disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

- a. Ketidakberdayaan. Kondisi ini muncul karena kurangnya lapangan kerja, rendahnya harga produk yang dihasilkan mereka, dan tingginya biaya pendidikan.
- b. Keterkucilan. Rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, sulitnya transportasi serta ketiadaan akses terhadap kredit menyebabkan mereka terkucil dan menjadi miskin.
- c. Kemiskinan materi. Kondisi ini diakibatkan karena kurangnya modal dan minimnya lahan pertanian yang dimiliki.
- d. Kerentanan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan, pekerjaan musiman, dan bencana alam. Membuat mereka menjadi rentan dan miskin.

- e. Sikap. Sikap yang menerima apa adanya dan kurang termotivasi untuk bekerja keras membuat mereka jatuh miskin.

Kemiskinan di kota pada dasarnya disebabkan oleh faktor-faktor yang sama dengan di desa. Perbedaannya adalah penyebab dari faktor-faktor tersebut, misal faktor ketidakberdayaan di kota cenderung disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja dan tingginya biaya hidup.

Menurut Maipita (2014) perangkat kemiskinan merupakan penyebab dari kemiskinan. Perangkat kemiskinan merupakan suatu mekanisme yang membuat orang miskin tetap miskin atau bahkan lebih miskin. Nurske (dalam Maipita, 2014:84) juga menjelaskan bahwa kapasitas yang kecil dalam tabungan mengakibatkan pendapatan riil yang rendah. Pendapatan riil yang rendah berkaitan dengan produktivitas yang rendah pula sehingga berdampak pada kekurangan modal kapital. Kekurangan modal selanjutnya mengakibatkan investasi yang rendah dan tingkat kapasitas tabungan yang rendah pula. Akibat dari investasi yang rendah maka dalam jangka panjang penduduk miskin tidak mampu untuk mengembangkan kehidupannya karena kurangnya modal kapital. Dalam hal ini, penduduk miskin sulit untuk keluar dari kemiskinan.

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Definisi pemberdayaan dalam arti sempit, yang berkaitan dengan sistem pengajaran antara lain dikemukakan oleh Merriam Webster dan Oxford English Dictionary kata "empower" dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power of authority* dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan, dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan (Cholisin, 2011).

Dari pengertian di atas, kemudian Cholisin secara lebih taktis menjelaskan konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu:

“Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah **obyek** penerima

manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai **subyek** (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. (Cholisin, 2011)”

Dari pendapat yang disampaikan oleh Cholisin menunjukkan bahwa konsep pemberdayaan yang memang tepat adalah dengan melibatkan peran masyarakat secara lebih aktif dalam upaya pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan, kesenjangan dan ketidakberdayaan.

Suharto (2005:59) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Penjelasan tentang pemberdayaan mengenai proses dan tujuan tersebut adalah

“pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses”.

Selanjutnya menurut Adi (2008:84), “pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan (*on-going*) sepanjang

komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja”.

Dalam setiap pemberdayaan yang dilakukan suatu pihak tentu di dalamnya mengandung maksud dan tujuan yang jelas. Suharto (2005:60) menyatakan, “tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil)”.

Adapun tujuan secara spesifik dari pemberdayaan usaha mikro menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah,
- b. Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah,
- c. Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif, dan
- d. Meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tanggung jawab, profesional, dan mandiri sebagai basis pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk membantu pihak yang lemah menjadi lebih berdaya dengan cara meningkatkan kemampuan, kekuasaan, hingga keterampilan mereka agar mereka menjadi lebih mandiri dan sanggup menentukan sikap. Dalam hal ini agar mereka mampu mengambil keputusan serta tindakan dalam menghadapi hambatan baik dari diri mereka maupun dari luar yang mengganggu

dan menghambat mereka dalam upaya melepaskan diri dari masalah kemiskinan yang dialaminya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa tujuan dari pemberdayaan itu mengarah kepada tercapainya masyarakat yang berdaya. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa sasaran dari suatu pemberdayaan adalah masyarakat yang tidak berdaya. Menurut Suharto (2005:60) bahwa terdapat beberapa kelompok yang bisa dimasukkan kedalam kategori sebagai kelompok tidak berdaya. Pertama adalah kelompok lemah secara struktural. Adapun contoh yang termasuk di dalam kelompok ini adalah lemah secara kelas dan gender. Kemudian yang kedua adalah kelompok lemah khusus semisal anak-anak, manula, dan masyarakat terasing. Terakhir adalah kelompok lemah secara personal yaitu mereka yang mengalami permasalahan pribadi dan/atau keluarga.

Adapun sasaran pemberdayaan dalam Program PUM-RTM itu secara spesifik dikhususkan kepada masyarakat miskin yang menjalankan usaha mikro, hal tersebut sesuai dengan materi pemberdayaan dalam Program PUM-RTM yang di dalamnya memasukkan unsur penguatan institusi, peningkatan keterampilan, dan penyediaan bantuan permodalan. Adapun institusi yang dibangun dalam Program PUM-RTM ini adalah institusi ekonomi berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat dan institusi sosial yang bernama Pokmas. Kemudian untuk peningkatan keterampilan sasaran program itu dilakukan melalui pembekalan dan pembelajaran dalam hal cara memanfaatkan peluang usaha, cara mengelola modal yang mereka terima, hingga cara *manage* usaha mereka. Selanjutnya adalah bantuan permodalan yang berguna bagi pengusaha mikro untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.

2.5. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut pandangan Agustino (2012;8) memiliki karakteristik utama. Pertama, kebijakan publik perhatiannya di tujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan

yang terpisah-pisah. Ketiga, Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya di kerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Keempat, Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Kelima, Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Hal ini cukup jelas yaitu bagaimana suatu kebijakan publik di tujukan untuk mengatur kehidupan bersama dan mengikat, sehingga pada tataran pelaksanaannya menimbulkan kenyamanan.

Menurut Anderson dalam Winarno (2002:18), kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang di tetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Mengenai konsep tersebut dianggap tepat karena dalam suatu kebijakan tidak hanya berkenaan dengan apa yang di usulkan tetapi berisi pula apa tindakan dan bagaimana menilai kebijakan tersebut.

Secara substantif, kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Sejalan dengan pengertian diatas, Riant Nugroho (2014:129) mendefinisikan kebijakan publik sebagai:

“keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada massa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat di tarik benang merahnya bahwa kebijakan publik merupakan segala keputusan yang diambil oleh pemerintah dan keputusan tersebut didasarkan atas permasalahan yang ada di masyarakat dalam rangka tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat sesuai tujuan bernegara.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu proses yang kompleks, karena melibatkan beberapa proses dan variabel yang harus dikaji terlebih dahulu. Beberapa variabel adalah sebagai berikut.

- a. Tujuan yang akan dicapai. Mencangkup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana maka semakin mudah untuk mencapainya.
- b. Preferensi nilai seperti apa yang perlu di pertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung banyak variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- c. Sumberdaya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan di tentukan oleh sumberdaya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
- d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Hal tersebut akan ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integrasi moralnya.
- e. Lingkungan yang mencangkup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik, tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top-down approach* atau *bottom-up approach*, otoriter atau demokratis (Subarsono, 2005:7-8).

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis, aktivitas inilah yang dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan publik (Dunn, 2000:22). Sangkaian aktivitas ini dibagi atas beberapa tahap yang diatur menurut urutan waktu sebagai berikut.

- 1) Tahap penyusunan agenda. Pada tahap ini, suatu masalah tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.
- 2) Tahap formulasi kebijakan. Pada tahap ini, masalah yang masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah kemudian

didefinisikan untuk dicari pemecahannya. Pemecahan tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada.

- 3) Tahap adopsi kebijakan. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.
- 4) Tahap Implementasi kebijakan. Pada tahap ini, suatu program hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen pemerintah tingkat bawah.
- 5) Tahap penilaian kebijakan. Suatu kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai untuk melihat sejauhmana kebijakan yang telah dibuat mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan (Winarno, 2002:28-30).

Dari beberapa tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh Budi winarno diatas, penulis memfokuskan penelitian pada tahap evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Penulis memfokuskan gambaran pelaksanaan kegiatan program dan pola pemanfaatan program.

2.6 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. *Pertama*, evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat di percaya mengenai kinerja kebijakan, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. *Kedua*, evaluasi menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target (Dunn,2000:609-610). Dari pendapat pertama dapat disimpulkan bahwa evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu dapat di capai.

Dalam hal ini melihat apakah nilai yang mendasari tujuan merupakan nilai yang berhubungan dengan masalah yang dituju.

Salah satu bidang kajian dalam Analisis Kebijakan, yaitu Evaluasi Kebijakan. Evaluasi Kebijakan dilakukan karena setiap kebijakan negara mengandung resiko untuk mengalami kegagalan. Abdul Wahab (2008:47-48), mengutip pendapat Hogwood dan Gunn (1986), menjelaskan bahwa penyebab dari kegagalan suatu kebijakan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) karena “non implementation” (tidak terimplementasi), karena “unsuccessful” (implementasi yang tidak berhasil), atau memang kebijakannya yang buruk. Tidak terimplementasinya suatu kebijakan maka dapat diartikan lembaga (organisasi) tidak memiliki kapasitas atau kemampuan dalam melaksanakan kebijakan tersebut yang dalam hal ini anggaran yang digunakan tidak maksimal, maupun kelemahan dalam hal regulasi yang bertentangan dengan peraturan atasannya. Implementasi yang tidak berhasil dapat dilihat pada kondisi eksternal (lingkungan) yang tidak mendukung suatu kebijakan sehingga kebijakan tersebut sulit atau tidak mencapai hasil yang diharapkan, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana, dan SDM pelaksana tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebijakan yang ada.

Evaluasi dipandang sebagai proses yang saling berkesinambungan dan berkembang, menilai dari awal munculnya masalah hingga menjadi sebuah konsep, melihat berjalannya implementasi dan model yang digunakan, hingga pada intervensi program terhadap sarasannya. Dari pengertian tersebut, evaluasi dapat dimaknai sebagai penentuan indikator-indikator atau kriteria keberhasilan suatu kebijakan. Dengan adanya penentuan nilai maka suatu kebijakan dapat di simpulkan mengenai kinerja dari kebijakan tersebut.

Pada dasarnya, evaluasi berkenaan dengan penetapan baik-buruk terhadap sesuatu berdasarkan pada kriteria tertentu. Dalam melakukan proses evaluasi, terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi dasar dalam proses mengevaluasi. Menurut Winarno (2002:165) mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat. Dengan kata lain, evaluasi berkenaan dengan kegiatan penilaian yang menyangkut substansi, implementasi, dan dampak yang

ditimbulkan dari adanya program tersebut, apakah bermanfaat/statis/tidak bermanfaat.

Lebih lanjut, Nugroho (2014:717-732) memaknai proses evaluasi memiliki empat lingkup makna, yaitu sebagai berikut.

a. Evaluasi Perumusan Kebijakan

Melihat apakah pendekatan yang digunakan sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan, mengarah pada inti permasalahan, mengikuti prosedur yang diterima bersama, penggunaan sumber daya seoptimal mungkin.

b. Evaluasi Implementasi Kebijakan

Melihat pada pelaksanaan kebijakan publik apakah telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, melihat perubahan faktor-faktor yang di pengaruhi proses implementasi, dan strategi meningkatkan kinerja implementasi.

c. Evaluasi Kinerja Kebijakan

seberapa jauh kebijakan mencapai hasil yang diharapkan, bagaimana dan seberapabanyak sumberdaya yang digunakan, perkembangan organisasi, dan melihat apa yang belum dicapai.

d. Evaluasi Lingkungan Kebijakan

Melihat pengaruh-pengaruh lingkungan seperti :ekonomi, sosial, budaya, sejarah, politik, alam, teknologi, dan kebijakan lain yang mempengaruhi kebijakan.

Maka dari itu, evaluasi kinerja kebijakan merupakan langkah yang diambil dalam penelitian ini. Karena tujuan secara umum dalam analisis dampak sebuah kebijakan yaitu melihat seberapa jauh hasil yang diharapkan tercapai dan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan tersebut.

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang kompleks, yaitu mencari faktor-faktor yang berhubungan dengan performa dan keefektifan maupun efisiensi dari program dengan tujuan untuk menentukan kemungkinan keberhasilan, solusi, dan membangun atau merencanakan program yang lebih efektif di masa depan. Proses evaluasi bukanlah suatu hal yang di maknai sebagai ajang untuk menyalahkan yang lebih di dominasi untuk mencari kesalahan dan hal-hal negatif, tetapi proses

evaluasi merupakan suatu langkah pembangunan yang dari proses tersebut akan di temukan solusi-solusi dalam memecahkan masalah tertentu.

Evaluasi terdiri dari tiga tipe ;

- 1) *Pre-program evaluation* (evaluasi yang dapat dilakukan sebelum program berjalan seperti penentuan inti masalah dengan cara penanggulangan, formulasi);
- 2) *On-going evaluation* (evaluasi yang dilakukan pada saat program berjalan);
- 3) *Ex-post evaluation* (evaluasi yang dilakukan setelah program selesai).

Pre program evaluation dijalankan sebelum program diimplementasikan. Pada tahap ini biasanya untuk melihat kesesuaian apakah masalah yang dihadapi sesuai dengan cara yang akan dilakukan dan melihat model perumusan apa yang digunakan dalam melihat suatu masalah karena penentuan model sangat penting dalam memetakan masalah yang ada.

On-going evaluation merupakan penilaian yang dilakukan pada saat program berjalan, yaitu menilai apakah proses implementasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sedangkan *ex-post evaluation* merupakan tahap pengevaluasian pada akhir program. Artinya, menilai pencapaian dengan harapan, dampak yang di berikan program kepada target group maupun non-target group, maupun perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dari adanya program tersebut.

Kiranya perlu untuk membedakan antara output program dan outcome program. Karena kedua hal tersebut memiliki makna yang sangat berbeda. Pada studi evaluasi kebijakan telah dibedakan antara “policy impact/outcome dan policy output. Policy impact/outcome menurut Islamy (1986:hal.114-115) adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan

dilaksanakannya suatu kebijakan. Sedangkan “policy output”, ialah dari apa yang dihasilkan dengan adanya program.

Pengertian tersebut sebangun dengan apa yang diungkapkan oleh Leo Agustino (2012:hal.190-191) bahwa output kebijakan adalah sesuatu, biasanya berupa benda-yang dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan outcome kebijakan lebih memfokuskan atau mencoba menentukan pengaruh dari kebijakan dalam kondisi kehidupan yang sesungguhnya.

2.6.1 Pendekatan terhadap Evaluasi

Mengingat beberapa aspek dan kurang jelasnya arti evaluasi di dalam analisis kebijakan, merupakan hal yang sangat penting untuk membedakan beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan : evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi teoritis keputusan. Berikut pendekatan evaluasi dalam analisis kebijakan menurut William N. Dunn.

a. Evaluasi Semu

Pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi dari evaluasi semu bahwa manfaat atau nilai akan terbukti dengan sendirinya.

b. Evaluasi Formal

Pendekatan dengan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator kebijakan. Tipe-tipe evaluasi formal akan dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1. Tipe-tipe evaluasi formal

Kontrol terhadap Aksi Kebijakan	Orientasi terhadap Proses Kebijakan	
	Formatif	Sumatif

Langsung	Evaluasi perkembangan	Evaluasi eksperimental
Tidak Langsung	Evaluasi proses retrospektif	Evaluasi hasil retrospektif

Pertama, evaluasi perkembangan. Menunjuk pada kegiatan/aktivitas evaluasi yang secara eksplisit diciptakan untuk melayani kebutuhan sehari-hari staf program. Evaluasi ini berguna untuk mengalihkan staf dari kelemahan yang baru dimulai atau kegagalan yang tidak diharapkan dari program dan meyakinkan layak tidaknya operasi yang dilakukan mereka yang bertanggung jawab terhadap operasinya.

Kedua, evaluasi proses retrospektif. Pemantauan dan evaluasi program setelah program tersebut diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Evaluasi ini lebih memusatkan pada masalah dan kendala yang terjadi selama implementasi program, tidak diperkenankan memanipulasi langsung terhadap masukan dan proses. Evaluasi proses retrospektif lebih menggantungkan pada *ex post facto* (retrospektif) tentang program yang berjalan, yang selanjutnya berhubungan dengan keluaran dan dampak.

Ketiga, evaluasi eksperimental. Meliputi pemantauan dan evaluasi hasil dibawah kondisi kontrol langsung terhadap masukan dan proses kebijakan. Syarat evaluasi eksperimental cukup berat, yaitu (a) serangkaian variabel yang dimanipulasi secara langsung dan terdefinisi secara jelas; (b) kesimpulan yang dapat digeneralisasikan secara maksimum menyangkut kinerja terhadap target group (validitas eksternal); (c) strategi evaluasi yang dapat mengurangi kesalahan sekecil mungkin dalam menginterpretasikan kinerja kebijakan (validitas internal); (d) Menghasilkan data yang *reliable* tentang hubungan timbal balik antar kondisi awal yang kompleks, kejadian yang tidak tampak, masukan, proses, keluaran, dan efek.

Keempat, evaluasi hasil retrospektif. Pemantauan dan evaluasi hasil tetapi tidak disertai kontrol langsung terhadap masukan dan proses kebijakan yang

dapat dimanipulasi. Evaluator berusaha mengisolasi pengaruh dari banyak faktor lainnya dengan menggunakan metode kuantitatif.

c. Evaluasi Keputusan Teoritis

Pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Evaluasi teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari para pelaku kebijakan, baik yang tersembunyi maupun dinyatakan.

2.7 Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM)

Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) merupakan inovasi program pengentasan kemiskinan yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten Jember. Program ini dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember. LKMM dikenal dengan istilah Bank Gakin oleh para anggotanya. Bank Gakin adalah sebutan yang diberikan sendiri oleh warga miskin yang menjadi anggotanya. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh beberapa pengurus dan anggota Lembaga Keuangan Masyarakat Mikro (LKMM) sebagai antitesis terhadap bank formal yang selama ini tidak pernah mau peduli dengan ekonomi keluarga miskin. Program ini mulai dikembangkan pada tahun 2005. Tujuan utamanya adalah perempuan miskin dan produktif. Inovasi PUM-RTM dirancang secara khusus dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga dengan mengembangkan usaha mikro sebagai alternatif usaha sampingan, berbasis pada penguatan institusi, berorientasi pada keberlanjutan usaha serta menyentuh langsung pada keluarga miskin. Kegiatan PUM-RTM terdiri dari 3 tahap yaitu tahap penguatan institusi, tahap penguatan modal usaha dan tahap peningkatan keterampilan. Ketiga aktivitas tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Aktivitas penguatan modal usaha dilaksanakan setelah penguatan institusi dilakukan secara benar. Kegiatan PUM-

RTM akan bermuara pada terbentuknya dua institusi yaitu institusi ekonomi yang bernama LKMM (Lembaga Keuangan Masyarakat Mikro) dan institusi sosial yang bernama pokmas (kelompok masyarakat).

Pada awalnya program ini akan diimplementasikan pada tingkat desa. Namun karena wilayah desa dianggap masih terlalu luas, wilayah kerja Keuangan Mikro Masyarakat dipersempit menjadi tingkat dusun. Semakin sempit wilayah kerja diprediksi akan semakin efektif. Modal yang berasal dari dana hibah dari Dinas Koperasi dan UMKM sebesar dua puluh lima juta rupiah dan simpanan sukarela anggota, diharapkan mampu dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan usahanya.

Bank Gakin di kabupaten Jember menggunakan prinsip tanggung renteng di antara para anggotanya. Kelompok usaha yang terdiri atas 5-10 orang dapat mengajukan kredit usaha tanpa agunan antara Rp 50.000 hingga Rp 1 juta. Masyarakat yang mengajukan kredit tidak perlu menyerahkan proposal usaha, apalagi melalui survei yang berbelit. Proposal bisa diajukan secara lisan. Dana kredit bisa langsung cair setelah diadakan *survey* sekilas terhadap usaha yang dijalankan. Dengan kucuran kredit berjangka waktu 10 minggu yang diangsur setiap minggu dengan bunga 0,5 persen, terobosan ini sangat membantu kelompok usaha kecil dan menengah. Anggota satu Bank Gakin maksimal 200 orang warga miskin. Jika lebih dari 200 orang, bank akan mengalami kesulitan dari sisi pengelolaan. Bank ini dikelola sendiri oleh warga miskin, di mana 90% pengurusnya adalah perempuan. Sebanyak 46% di antaranya adalah lulusan sekolah dasar dan 5% tidak melewati pendidikan sekolah formal (Handayani, 2010).

Program PUM-RTM ini merupakan program pengentasan kemiskinan yang berbasis kepada pemberdayaan masyarakat. Program ini juga mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas. Adapun tujuan secara spesifik dari program PUM-RTM ini adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan Rumah Tangga Miskin (RTM)
2. Menyediakan sumber permodalan untuk pengembangan usaha mikro.

3. Mewujudkan kemandirian dan kapabilitas komunitas dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi.
4. Memfasilitasi terbentuknya institusi ekonomi yang bernama LKMM serta terbentuknya institusi sosial (PokMas). (Petunjuk Pelaksanaan pengelolaan LKMM)

Adapun sasaran program PUM-RTM ini adalah sebagai berikut.

1. Lokasi PUM-RTM diprioritaskan pada desa/kelurahan dengan jumlah penduduk miskin yang relative tinggi termasuk juga wilayah yang terkena bencana.
2. Wilayah pelayanan LKMM dan pembentukan Pokmas diprioritaskan pada lingkup dusun/lingkungan.
3. Sasaran Rumah Tangga Miskin (RTM) diprioritaskan pada RTM usia produktif, perempuan, menikah, dan telah memiliki usaha atau pernah berusaha dan berencana membuka usaha baru atau RTM yang belum berpengalaman usaha tetapi memiliki motivasi tinggi untuk merintis usaha (Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 2008:7).

Program PUM-RTM ini mempunyai kegiatan pokok yaitu penguatan institusi sosial-ekonomi kemasyarakatan. Wujud dari kegiatan tersebut adalah pembentukan dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat atau Pokmas dan pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat atau LKMM (Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 2009:2). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa institusi sosial yang dibentuk dalam program ini bernama Pokmas Rumah Tangga Miskin. Adapun penjelasannya secara rinci adalah sebagai berikut.

“Pokmas-RTM atau Kelompok Masyarakat Rumah Tangga Miskin adalah kelompok masyarakat yang dibentuk untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara bekerja sama dalam kelompok dan menguatkan anggota kelompok, beranggotakan maksimal 5 (lima) orang ibu-ibu rumah tangga miskin dalam suatu wilayah tertentu terutama berdomisili berdekatan antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya.” (Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 2005:2).

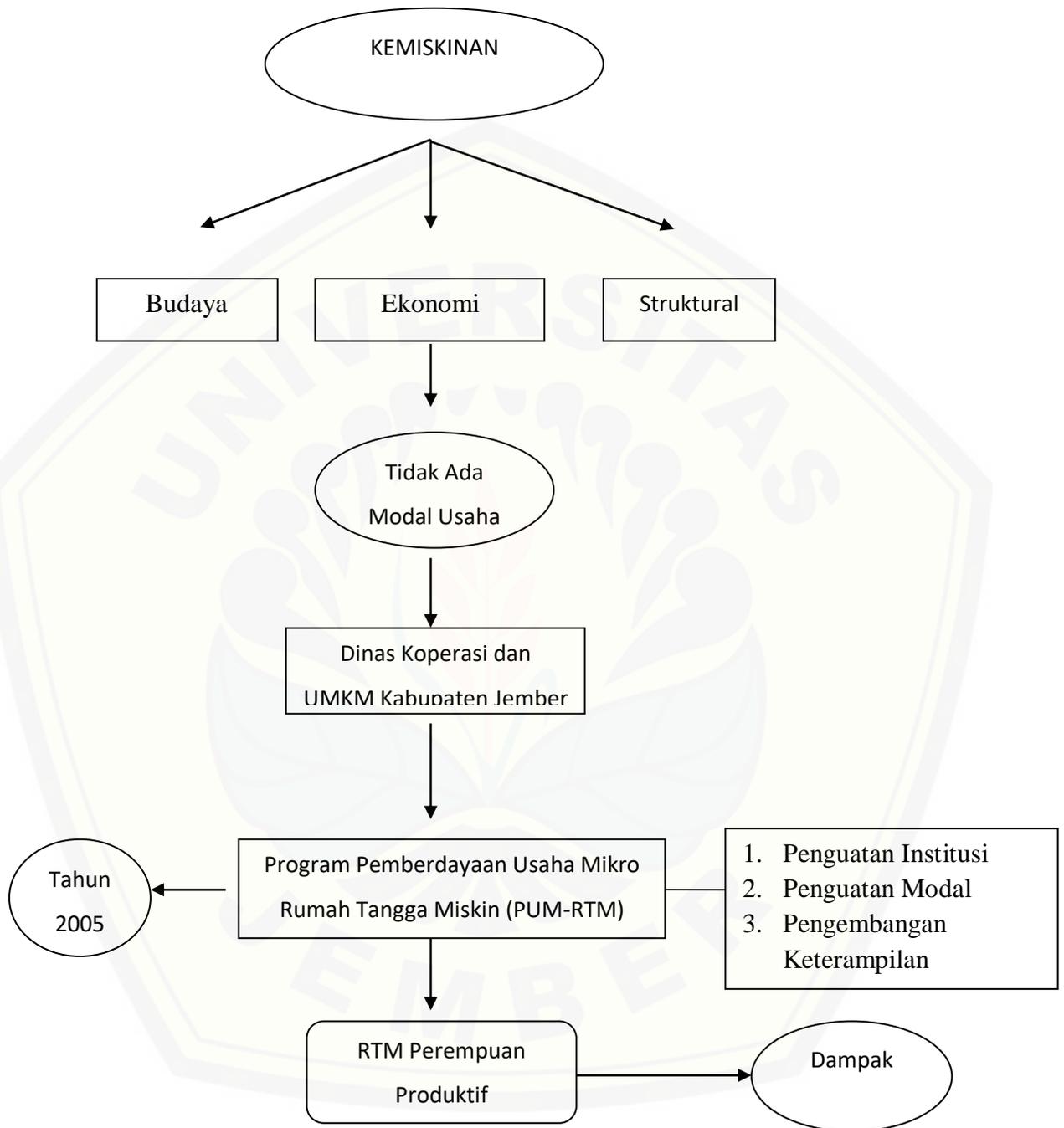
Adapun tujuan dari kegiatan pembentukan Pokmas adalah sebagai berikut.

1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kapital sosial.
2. Mendorong warga masyarakat untuk dapat lebih dinamis dalam mengembangkan kegiatan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan.
3. Mendorong proses pemberdayaan berjalan secara efektif dan efisien.
4. Mendukung terjadinya proses saling asah-saling asuh antar sesama anggota.
5. Terjadinya konsolidasi kekuatan bersama baik antar yang lemah maupun antar yang kuat dan lemah didalam satu Pokmas (konsep sapu lidi)
6. Mengembangkan dan melembagakan tanggung renteng, membangun jaminan karakter antar anggota, wada proses belajar/interaksi antar anggota, menggerakkan keswadyaan dan modal, meningkatkan, dan menertibkan angsuran pinjaman, menguatkan dan mengembangkan usaha anggota (Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 2007:25-26)

Kemudian yang kedua adalah intitusi ekonomi yang bernama Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat. Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat atau LKMM adalah “lembaga keuangan informal prakoperasi yang mengelola simpan pinjam yang melayani pengusaha mikro perempuan dari keluarga miskin dengan pola tanggung renteng” (Dinas Koperasi UMKM Kabupetan Jember, 2010 : 37). Berdasarkan pada penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa LKMM merupakan lembaga keuangan yang mengelola dan menyediakan dana bagi para anggota Pokmas yang membutuhkan dan mengakses permodalan ditempat tersebut.

2.8 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha merangkai pokok pemikiran yang dirancang dalam suatu kerangka berpikir yang diharapkan dapat memberi jalan bagi proses menjawab dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, sehingga peneliti mampu mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Kerangka berpikir dibuat oleh peneliti dalam bentuk bagan seperti di bawah ini :



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

BAB 3. METODE PENELITIAN

Suatu penelitian diawali dengan pembentukan argumen-argumen publik yang ditemukenali di lapangan, yaitu masalah yang terjadi di masyarakat. Dalam mengenali suatu fenomena maupun peristiwa diperlukan dasar teoritis untuk berpijak agar mampu mengungkap definisi permasalahan yang sebenarnya. Karena itu, tinjauan pustaka menjadi penting dalam proses penelitian. Kemudian, sebelum terjun untuk melakukan penelitian dilapangan, diperlukan alat maupun cara untuk menangkap permasalahan yang sebenarnya dilapangan. Karena itu, metode penelitian menjadi syarat yang tidak kalah penting dalam proses penelitian. Metode penelitian berkenaan dengan cara memperoleh data dan mengolah data dalam rangka mencari kebenaran atas masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan penelitian
2. Tempat dan waktu penelitian
3. Desain penelitian atau rancangan penelitian kualitatif
4. Teknik dan alat perolehan data
5. Teknik penyajian data

3.1 Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sudut pandang yang digunakan penulis untuk melihat masalah penelitian ketika di lapangan dan cara yang ditempuh untuk menemukan kebenaran ilmiah. Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2008:14) mengistilahkannya dengan “paradigma”. Melihat masalah penelitian di lapangan diperlukan alat-alat yang mendukung untuk menangkap gejala-gejala sosial yang ada. Dengan pendekatan penelitian, akan menentukan bagaimana langkah-langkah peneliti dalam menjalankan penelitian di lapangan. Dalam

penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Menurut Moleong (2008:50) ada macam-macam paradigma, tetapi yang mendominasi ilmu pengetahuan adalah paradigma ilmiah dan paradigma alamiah. Paradigma ilmiah bersumber dari pandangan *positivisme*. Sedangkan paradigma alamiah bersumber pada pandangan *fenomenologis*. Menurut Patton (2006:13) rancangan kualitatif itu bersifat *naturalistik* (alamiah). Lebih lanjut, Moleong (2008:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2011:11) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Sedangkan, tujuan dari penelitian deskriptif menurut Bungin (2001:48) adalah untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan dua komponen yang penting untuk di perhatikan, karena tempat dan waktu penelitian akan mempengaruhi proses serta hasil penelitian. Penulis memilih kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang sebagai lokasi penelitian. Terdapat berbagai alasan dalam pemilihan lokasi penelitian tersebut, diantaranya: a) kelurahan Jumerto merupakan salah satu desa penerima manfaat dana Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) sejak tahun 2006 ; b) kelurahan Jumerto memiliki 2 LKMM yang menerima dana dari program PUM-RTM yaitu LKMM Barokah dan LKMM Jumerto Lor.

Dalam penelitian ini, waktu penelitian dilakukan oleh peneliti ada pada tahun 2017 diharapkan peneliti mampu mendiskripsikan program PUM-RTM di Kelurahan Jumerto. Sedangkan peneliti membatasi rentang waktu pada tahun 2016 laporan kinerja LKMM Kabupaten Jember untuk memberikan gambaran dinamika yang terjadi terkait program PUM-RTM terhadap kelompok sasaran program tersebut.

3.3 Desain Penelitian atau rancangan penelitian kualitatif

Menurut Echols dan Hasan shadily (1976) dalam Moleong (2008:384) bahwa *design* ialah rencana, namun apabila dikaji lebih lanjut, kata itu dapat berarti pula pola, potongan, bentuk, model, tujuan, dan maksud. Lebih lanjut, rancangan pada dasarnya merencanakan sesuatu kegiatan sebelum dilaksanakan. Kegiatan merencanakan itu mencakup komponen-komponen penelitian yang diperlukan (Moleong, 2008:385). Rancangan penelitian kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Penelitian ini menggunakan metode (*desain*) studi kasus. Menurut Creswell (2015:135) penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan-nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi, misalnya wawancara, pengamatan, bahan audiovisual, dukumen dan berbagai laporan serta melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Satuan analisis dalam studi kasus bisa berupa kasus majemuk (studi *multi-situs*) atau kasus tunggal (studi *dalam-situs*).

Menurut Craswell (2015:139) studi kasus dapat dibedakan dalam hal tujuan dari analisis kasusnya. Terdapat tiga variasi dalam hal tujuan, yaitu: studi kasus instrumental tunggal, studi kasus kolektif atau majemuk, dan studi kasus intrinsik. Dalam studi kasus instrument tunggal, peneliti memfokuskan pada isu

atau persoalan, kemudian memilih satu kasus terbatas untuk mengilustrasikan persoalan ini. Untuk studi kasus kolektif, satu isu atau persoalan dipilih, tetapi peneliti memilih beragam studi kasus untuk mengilustrasikan isu atau persoalan tersebut. Peneliti juga dapat mempelajari satu program dari beberapa tempat riset atau beragam program di satu tempat tertentu. Sedangkan, studi kasus intrinsik memiliki fokus pada kasus itu sendiri, misal: mengevaluasi program atau mempelajari seorang siswa yang memiliki kesulitan.

Dalam penelitian studi kasus ini, kasus yang mampu diungkap penulis dari lapangan adalah tipe studi kasus instrumen tunggal, yaitu peneliti memfokuskan pada permasalahan kemudian memilih satu kasus terbatas untuk mengilustrasikan persoalan tersebut. Studi kasus ini tidak bisa dipandang sebagai studi kasus intrinsik karena permasalahan dalam penelitian ini sudah pernah terjadi pada beberapa tempat.

3.3.1 Fokus penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian berfungsi untuk memberikan batasan permasalahan yang diteliti, sehingga kajian dalam penelitian ini menjadi lebih spesifik dan jelas. Adapun beberapa fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Evaluasi pada pelaksanaan program dan output .
2. Cara masyarakat penerima program dalam mengelola PUM-RTM, yaitu dalam pengelolaan modal: 1) LKMM 2) masyarakat penerima program.

3.3.2 Penentuan informan penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian, ia juga berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal (Moleong, 2008:132).

Lebih lanjut, pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring (Moleong, 2008:132).

Menurut Faisal dan Sugiyono (2011:221) seorang informan dalam penelitian harus memiliki ciri-ciri, yaitu:

- a. Mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan;
- b. Berkecimpung dalam masalah yang diteliti;
- c. Memiliki waktu yang memadai untuk diwawancarai; dan
- d. Mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan sifat subjektivitasnya atas masalah yang diteliti.

Maka dari itu, penelitian ini menggunakan informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2011:85) teknik *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang didasari atas pertimbangan tertentu. Penentuan dan pengambilan sampel dalam teknik *purposive sampling* didasarkan pada pertimbangan informan yang benar-benar mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Sedangkan, teknik *snowball sampling* menurut Silalahi (2012:272) merupakan prosedur pemilihan sampel secara bertahap. *Pertama*, menentukan orang yang dianggap mampu memberikan informasi terkait masalah yang dikaji dan menjadikan orang tersebut sebagai *key Informant* yang mampu memberikan gambaran siapa saja yang layak menjadi informan selanjutnya. *Kedua*, teknik sampling ini digunakan dalam penelitian kualitatif karena tujuan penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya terkait masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan yang terpilih melalui teknik *sampling purposive* seperti penjelasan di atas dengan pertimbangan bahwa beberapa informan ini merupakan aktor-aktor yang terlibat langsung dan mengetahui latar belakang dalam program PUM-RTM di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Beberapa informan tersebut sebagai berikut.

1. Bapak Agus Budi Santoso selaku Kepala sie bagian UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember
2. Ibu Latifa selaku ketua LKMM Barokah yang telah menjadi Koperasi Wanita
3. Ibu Nurul Hotimah ketua LKMM Jumerto Lor
4. Anggota kelompok LKMM Barokah dan LKMM Jumerto Lor

3.3.3 Data dan sumber data

Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2008:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dari pengertian tersebut dapat disederhanakan bahwa sumber penelitian dapat dijadikan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Bungin (2001:129) sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan, sumber data sekunder menurut Silalahi (2012:289) dijelaskan sebagai objek atau data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Maka, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini berkenaan dengan data hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan kegiatan program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup studi literatur, dokumen penerima manfaat program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang dan dokumen-dokumen yang dimiiki.

3.4 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini akan disesuaikan dengan jenis penelitian, tujuan penelitian, dan masalah penelitian. Adapun penulis dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Observasi/pengamatan

Menurut Bungin (2001:142) observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya, seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.

Menurut Moleong (2008:174) terdapat beberapa ruang lingkup dalam proses pengamatan, yaitu sebagai berikut.

1) alasan pemanfaatan pengamatan

Pengamatan ini didasarkan pada pengalaman secara langsung, lalu dapat memungkinkan melihat dan mengamati sendiri (mencatat perilaku dan kejadian), ketidakpercayaan pada data yang cenderung bias, mampu memahami situasi-situasi yang rumit;

2) Macam-macam pengamatan dan derajat peranan pengamat

Terdapat berbagai peran peneliti dalam melakukan pengamatan, diantaranya: peneliti dapat berperanserta secara penuh yaitu dengan mengikuti secara penuh semua kegiatan, pemeran serta sebagai pengamat, yaitu tidak sepenuhnya sebagai pemeranserta tetapi melakukan fungsi pengamatan, pengamatan sebagai peranserta, pengamat penuh, yaitu biasanya dilakukan pada pengamatan eksperimen di laboratorium. Dalam penelitian ini, penulis memposisikan diri sebagai peneliti yang tidak sepenuhnya sebagai pemeranserat tetapi larut dalam pengamatan di lapangan;

3) Pengamatan dan pencatatan data

Peneliti dalam hal ini melakukan kegiatan mulai dari membuat catatan lapangan, buku harian lapangan, catatan kronologis, peta konteks, jadwal, dan alat elektronika yang disembunyikan;

4) Pengamatan yang diamati

Terdapat dua kemungkinan: pertama, peranan pengamat pasif, diam, hanya mencatat, dan tidak memperhatikan ekspresi muka apa-apa. Peranan pasif tidak akan efektif dalam penjarangan data. Kedua, bertindak aktif tidak hanya mengamati, tetapi dalam keadaan tertentu berbicara, berkelakar, dan sebagainya. Hal ini perlu didasari dengan sikap yang baik, karena dengan sikap yang baik akan mudah mendapatkan data yang diperlukan.

Dalam penelitian ini, observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan tidak sepenuhnya sebagai pemeranserta tetapi melakukan fungsi pengamatan. Dalam penelitian ini pula, peneliti berusaha bertindak wajar dan tidak berlebihan. Bersikap seadanya dan tetap menjaga berlangsungnya sebuah peristiwa yang sedang diamati.

b. Wawancara

Menurut Moleong (2008:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara. Menurut Patton (2006:182) melakukan wawancara menjadi sebuah seni dan ilmu yang membutuhkan kecakapan, kepekaan, konsentrasi, pemahaman interpersonal, wawasan, ketajaman mental, dan disiplin. Jadi, dari pemahaman tersebut dapat dimengerti bahwa dalam melakukan wawancara, seni dalam menangkap fenomena/peristiwa baik dalam pembicaraan maupun lingkungan saat wawancara merupakan hal yang sangat penting, karena kedua-duanya saling merangkai informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian.

Terdapat tiga pendekatan dalam melakukan wawancara secara kualitatif yang dikemukakan oleh Patton (2006:185), yaitu: 1) wawancara percakapan informal; 2) pendekatan pedoman wawancara umum; 3) wawancara terbuka yang dibakukan. Pertama, selama wawancara percakapan informal, orang yang bercakap-cakap dengan penelitibahkan mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang di wawancarai. Hubungan pewawancara dengan terwawancara adalah dalam suasana yang tenang, biasa saja, wajar bahkan seperti berbicara sehari-hari.

Kedua, pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan atau soal yang dicari selama berjalannya wawancara. Pedoman wawancara menyajikan topik atau

wilayah subjek dimana pewawancara bebas untuk menguaknya, mendalami, dan mengajukan pertanyaan yang akan menguraikan dan menjelaskan subjek tertentu. Hal ini bermanfaat untuk membantu dalam melakukan wawancara dengan orang yang berbeda agar lebih sistematis dan menyeluruh.

Ketiga, wawancara terbuka yang dibakukan yaitu penyusunan kata-kata dan urutan pertanyaan yang persis ditentukan di muka. Semua orang diwawancarai dengan pertanyaan dasar yang sama dalam aturan yang sama. Tujuannya yaitu untuk memperkecil efek pewawancara ketika menanyakan pertanyaan yang sama untuk setiap responden.

Maka dari itu, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara yang dikemukakan oleh Patton, yaitu dengan melakukan percakapan informal yaitu percakapan antara penulis dengan informan yang berlangsung bebas namun tetap dalam kerangka yang telah disusun peneliti yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan sebelum melakukan wawancara, peneliti juga membuat pedoman wawancara sebagai garis besar dalam melakukan wawancara.

c. Dokumentasi

Secara umum dapat dipahami bahwa dokumentasi merupakan sekumpulan informasi-informasi yang berkenaan dengan suatu kegiatan yang telah atau tengah dikerjakan. Menurut Moleong (2008:217) dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal, dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Lebih lanjut, Patton (2006:150) menjelaskan bahwa dokumentasi ialah informasi tentang kegiatan dan proses program dan dapat memberikan peneliti ide tentang pertanyaan penting selanjutnya melalui pengamatan dan wawancara yang lebih langsung. Penelitian ini membutuhkan beberapa dokumentasi yang berkenaan dengan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM), yaitu dokumen penerima manfaat dana Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM), data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember, foto-foto yang berkenaan dengan

aktivitas program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM), catatan harian, yang nantinya juga turut mendukung penelitian ini.

3.5 Teknik Menguji Keabsahan Data

Dalam menetapkan keabsahan data, diperlukan teknik untuk pemeriksaan data tersebut. Moleong (2008:324) membagi menjadi beberapa teknik dalam pemeriksaan data. teknik pemeriksaan keabsahan data akan dikemukakan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Teknik menguji keabsahan data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikutsertaan
	2. Ketekunan pengamat
	3. Triangulasi
	4. Pengecekan sejawat
	5. Kecukupan referensial
	6. Kajian kasus negative
	7. Pengecekan anggota
Kepastian	8. Uraian kunci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastian

Sumber: Moleong (2008:324)

Berdasarkan sepuluh teknik pemeriksaan keabsahan data seperti disebutkan diatas. Maka dalam penelitian ini, penulis memilih beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data, diantaranya:

3.5.1 Perpanjangan Keikutsertaan

Kerja lapangan adalah aktivitas sentral dari metode kualitatif. Masuk ke lapangan berarti melakukan kontak langsung dengan orang dalam suatu program di lingkungan mereka (Patton, 2006:18). Artinya, Peneliti dalam penelitian kualitatif ini merupakan salah satu instrumen penting dalam menghasilkan

informasi yang kaya makna. Keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam menguji keabsahan data. Oleh karena itu, peneliti tidak hanya dua atau tiga kali untuk terjun ke lapangan, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan. Menurut Moleong (2008:327) perpanjangan keikutsertaan peneliti akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan karena perpanjangan keikutsertaan dapat mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin merusak data, memastikan pemahaman konteks dan membangun kepercayaan subjek.

3.5.2 Ketekunan Pengamat

Menurut Patton (2006:119), tujuan data evaluasi pengamatan adalah menggambarkan program secara menyeluruh dan hati-hati. Termasuk menggambarkan kegiatan yang berlangsung dalam program, orang yang berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan itu, dan makna bagi orang-orang mengenai apa yang telah diamati.

Secara garis besar, menurut pemahaman Patton bahwa Peneliti harus tekun dalam merinci setiap kegiatan program, menceritakan orang-orang yang berpartisipasi pada program (penerima manfaat maupun pihak-pihak kepentingan), dan menggambarkan pula bagaimana pendapat mereka mengenai program. Hal ini perlu di catat untuk dapat di jadikan sebuah informasi dalam menyusun laporan penelitian. Peneliti harus tekun dalam pengumpulan data dan analisis data sehingga peneliti dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang diperoleh sekaligus analisisnya agar hasil yang diperoleh dapat dipahami. Maka dari itu, Moleong (2008:330) menekankanpeneliti agar melakukan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian, hasil dari pengamatan tersebut dianalisis secara rinci sehingga hasilnya dapat dipahami.

3.5.3 Triangulasi

Menurut Moleong (2008:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi data juga berguna untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi

kenyataan yang ada dalam proses pengumpulan data. Moleong (2008:332) menyatakan bahwa peneliti dapat melakukan triangulasi dengan tiga cara, yaitu mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Moleong (2008:247) mengemukakan bahwa proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Kemudian data tersebut dipelajari dan ditelaah agar dapat dilakukan proses reduksi data.

Reduksi data dilakukan dengan cara melakukan abstraksi, yaitu dengan membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan dalam penelitian. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menyusun satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan sekaligus melakukan coding. Tahap akhir dari analisis data yaitu dengan pemeriksaan keabsahan data.

Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:339) kegiatan analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang membentuk siklus dan dilaksanakan secara bersamaan, yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Reduksi data dapat diartikan sebagai analisis data dengan cara menyederhanakan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atas data yang direduksi tersebut (Silalahi, 2012:340). Artinya, ketika data diperoleh dari lapangan, lalu dituangkan kedalam uraian-uraian yang lengkap dan terperinci. Uraian-uraian tersebut kemudian di reduksi yaitu dengan memilah-milah dan memiliki pokok-pokok bahasan yang dianggap penting.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Menurut Silalahi (2012:340) penyajian data merupakan kegiatan dalam proses analisis data yang ditempuh

untuk memahami data-data yang disajikan sehingga peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang di sajikan tersebut. Sebelum data disajikan, terlebih dahulu melakukan proses pengkodean (coding). Menurut Craswell (2015:257), proses koding dimulai dengan mengelompokkan data teks dan visual menjadi kategori informasi yang lebih kecil. Secara tidak langsung, proses penyajian data ini memudahkan peneliti dalam melihat secara gambaran keseluruhan dari data-data yang dikumpulkan. Kemudian, penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan grafik, teks naratif, jaringan, bagan, dan sebagainya.

Tahap terakhir yakni penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi atas kesimpulan yang diambil peneliti dilakukan setelah data terkumpul dan terjaring dengan melakukan proses reduksi data yang kemudian disajikan kedalam bentuk grafik, bagan, matrik, dan sebagainya. Menurut Silalahi (2012:341) verifikasi merupakan proses pengujian kebenaran, kekukuhan, dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data sehingga terbukti validitas data tersebut. Pada saat peneliti melakukan proses pengumpulan data, peneliti tersebut mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proporsi untuk menarik kesimpulan awal yang mula-mula tidak begitu jelas atau terperinci namun kemudian terus mengikat menjadi lebih terperinci (Silalahi, 2012:341). Kesimpulan harus menjawab asumsi awal yang dibangun peneliti terkait masalah yang diteliti. Maka, penarikan kesimpulan bergantung pada kemampuan peneliti dalam mengumpulkan data-data dan informasi lapangan lalu melakukan reduksi, lalu penyajian data juga menentukan alur berjalannya cerita dalam penelitian sehingga dengan penyajian data tersebut dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Daerah Penelitian

Deskripsi daerah penelitian merupakan suatu gambaran mengenai lokasi dimana penelitian itu dilaksanakan. Lokasi yang dijadikan tempat untuk mengadakan penelitian yaitu Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Dengan memperlihatkan deskripsi lokasi penelitian akan membantu penulis dalam memahami Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di Kelurahan Jumerto tersebut. Deskripsi daerah penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan serta informasi guna memahami keadaan senyatanya mengenai daerah penelitian sehingga mampu menambah pengertian, wawasan dan memudahkan penjabaran.

4.1.1 Peta, Letak Geografis, dan Keadaan Kelurahan Jumerto

Kelurahan Jumerto merupakan salah satu dari 8 Kelurahan di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Kelurahan Jumerto terletak di selatan ibu kota kabupaten, dengan luas wilayah 292,5 ha yang penggunaannya dapat dirinci pada tabel di bawah.

Tabel 4.1 Luas wilayah Kelurahan Jumerto

No	Uraian	Luas (ha)
1	Luas pemukiman	46,6
2	Luas persawahan	144
3	Luas lading/tegalan	89,725
4	Luas perkebunan	0
5	Luas hutan	0
6	Luas taman dan olahraga	1,06
7	Luas bangunan	6,147
	Luas prasarana umum	5
8	lainnya	
Total luas wilayah		292,532

Sumber: Profil Kelurahan Jumerto 2010

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa lahan untuk pertanian merupakan lahan terluas yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Jumerto yakni areal persawahan seluas 144 ha dan lading/tegalan seluas 89,725 ha sehingga dapat

disimpulkan bahwa sumber mata pencaharian terbesar yakni dalam bidang pertanian. Adapun batas wilayah Kelurahan Jumerto yakni berbatasan sebelah utara dengan Desa Kelungkung Kecamatan Sukorambi. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bintoro, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Slawu, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Banjarsengon Patrang.

4.1.2 Keadaan Penduduk

Data profil Kecamatan Patrang tahun 2010 berdasarkan hasil sensus penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang seluruhnya adalah 2.727 jiwa dengan rincian penduduk perempuan berjumlah 1.410 jiwa dan penduduk laki-laki berjumlah 1.317 jiwa serta jumlah kepala keluarga sebanyak 896 kepala keluarga. Adapun rincian jumlah penduduk tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-Laki	1.317 jiwa
2	Perempuan	1.410 jiwa
3	Kapala Keluarga	896 KK
Jumlah Penduduk		2.727 jiwa

Sumber : Profil Kelurahan Jumerto Tahun 2010

Sedangkan jumlah penduduk Kelurahan Jumerto berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010 jumlah penduduk berdasarkan usia memiliki rincian bahwa penduduk usia 0-12 bulan sebesar 40 jiwa, 1-5 tahun sebesar 194 jiwa, 6-10 tahun sebesar 283 jiwa, 11-26 tahun sebesar 772 jiwa, 27-40 tahun 473 jiwa, 41-58 tahun sebesar 748 jiwa dan penduduk diatas 58 tahun sebesar 217 jiwa.

Tabel 4.3 Rekapitulasi jumlah penduduk menurut usia

No	Uraian	Keterangan
1	0-12 Bulan	40 jiwa
2	1-5 Tahun	194 jiwa
3	6-10 Tahun	283 jiwa
4	11-26 Tahun	772 jiwa
5	27-40 Tahun	473 jiwa
6	41-58 Tahun	748 jiwa
7	>58 Tahun	217 jiwa
Jumlah Penduduk		2.727 jiwa

Sumber: Profil Kelurahan Jumerto Tahun 2010

4.1.3 Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi penduduk merupakan suatu gambaran umum terhadap keadaan penduduk di suatu daerah. Gambaran tersebut dapat digunakan untuk menilai kesejahteraan penduduk di daerah tersebut. Di Kecamatan Patrang keadaan sosial ekonominya masih tergolong rendah dengan jumlah 9.118 penduduk prasejahtera. Sehingga secara ekonomi relatif berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah RTSM terkecil di Kecamatan Patrang yakni sebesar 328 Kepala Keluarga dan jumlah RTSM terbesar di Kecamatan Patrang sebesar 2.168 Kepala Keluarga yang berada dalam golongan prasejahtera. Perbandingan jumlah keluarga prasejahtera di Kecamatan Patrang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4 Jumlah penduduk prasejahtera di Kecamatan Patrang

No.	Kelurahan	Penduduk Prasejahtera
1.	Jumerto	328
2.	Baratan	1964
3.	Slawu	850
4.	Bintoro	2168
5.	Jemberlor	427
6.	Patrang	989
7.	Gebang	788
8.	Banjarsengon	1550
Jumlah		9118

Sumber: Profil Kecamatan Patrang 2010

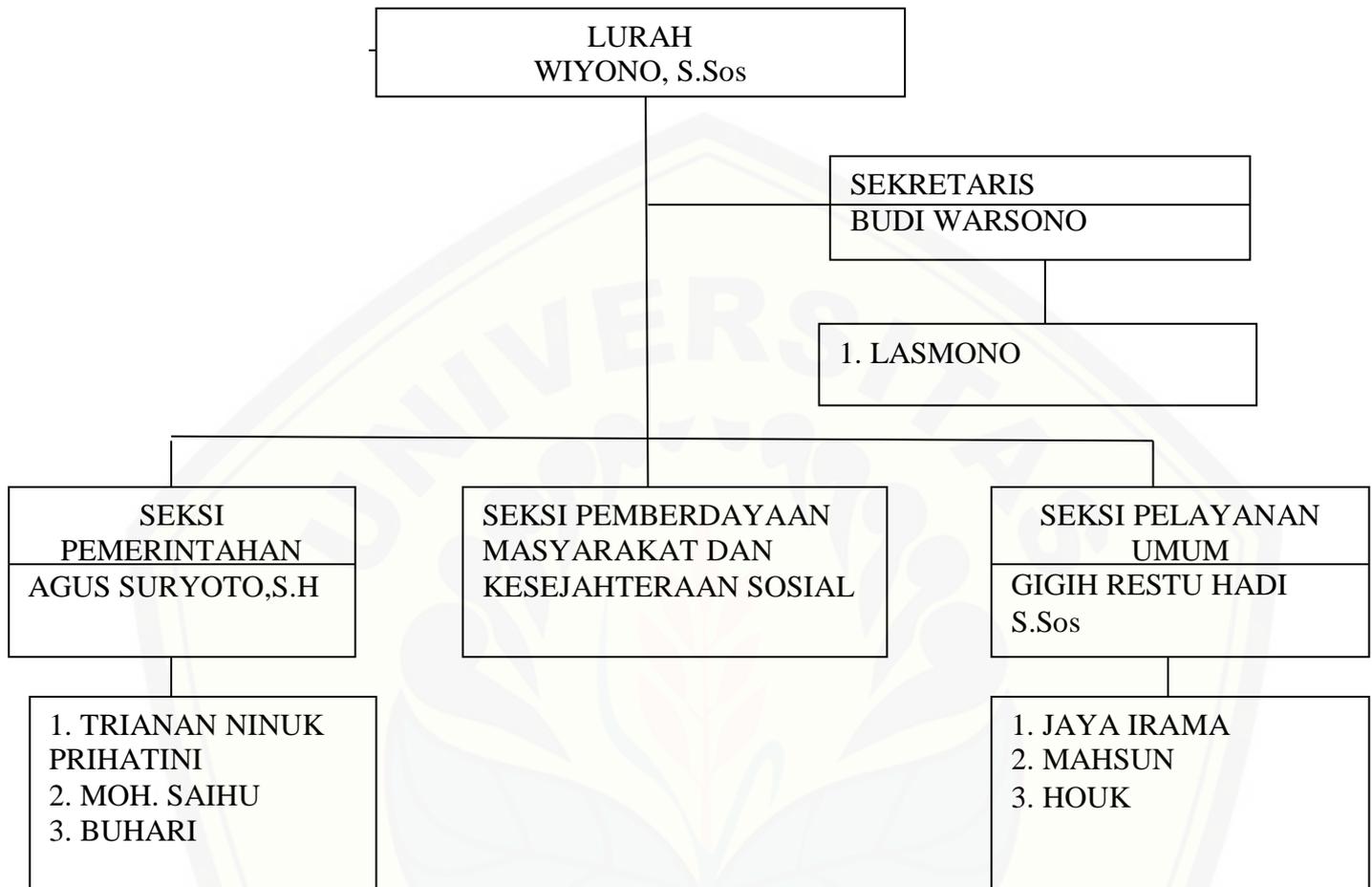
Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 8 kelurahan di Kecamatan Patrang, Kelurahan Jumerto merupakan jumlah keluarga terkecil yakni sebanyak 328 kepala keluarga masih berada pada tingkat kemiskinan. Adapun kesejahteraan keluarga di Kelurahan Jumerto Kecamatan patrang dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.5 Jumlah keluarga sejahtera

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah keluarga prasejahtera	462 KK
2	Jumlah keluarga sejahtera 1	226 KK
3	Jumlah keluarga sejahtera 2	94 KK
4	Jumlah keluarga sejahtera 3	71 KK
5	Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	39 KK

Sumber : Profil Kecamatan Patrang 2010

4.1.4 Struktur Pemerintahan



Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Jumerto

4.2 Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM)

Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) merupakan inovasi program pengentasan kemiskinan yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Jember serta dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember. Program ini mulai dikembangkan pada tahun 2005. Inovasi PUM-RTM dirancang secara khusus dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga dengan mengembangkan usaha mikro sebagai alternatif usaha sampingan, berbasis pada penguatan institusi, berorientasi pada keberlanjutan usaha serta menyentuh langsung pada keluarga miskin. Kegiatan PUM-RTM terdiri dari 3 tahap yaitu tahap penguatan institusi, tahap penguatan modal usaha dan tahap peningkatan keterampilan. Ketiga aktivitas tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Aktivitas penguatan modal usaha dilaksanakan setelah penguatan institusi dilakukan secara benar. Kegiatan PUM-RTM akan bermuara pada terbentuknya dua institusi yaitu institusi ekonomi yang bernama LKMM (Lembaga Keuangan Masyarakat Mikro) dan institusi sosial yang bernama Pokmas (kelompok masyarakat).

Prosedur PUM-RTM berawal dari inisiatif bahwa permasalahan pada masyarakat yaitu kesulitan dalam mengakses permodalan. Masyarakat hanya mempunyai pilihan meminjam modal pada rentenir yang ada di lingkungannya. Ketika masyarakat terjebak pada rentenir, masyarakat sangat susah untuk membangun kemampuan dirinya dalam permodalan karena bunga yang diberikan cukup tinggi dan kejadian ini berlarut-larut seperti hidupnya dipasung. Sementara program-program pemberdayaan yang selama ini ada hanya sebagai formalitas belaka dan tidak adanya tanggung jawab dari semua pihak. Apalagi program yang melalui perangkat desa tidak menjamin program itu jalan dan tepat sasaran, karena terkadang perangkat desa juga hanya formalitas dalam memberikan program tanpa adanya penjelasan dan tanpa mengetahui permasalahan masyarakat yang ada. Sehingga PUM-RTM dalam pelaksanaannya menggunakan istilah *grounded* dengan cara turun kelapisan masyarakat mencari tokoh masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial tinggi. Setelah itu perlu adanya institusi pra koperasi yang mampu mengelola keuangan untuk permodalan masyarakat agar

masyarakat tidak terjebak secara terus menerus meminjam pada rentenir. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember mempunyai inovasi agar masyarakat mempunyai institusi yang mampu mengelola keuangan dimasyarakat yaitu dengan membentuk Lembaga Keuangan Masyarakat Mikro (LKMM). Dalam bentuk Peraturan Bupati Jember tahun 2011 dengan mendasarkan pada UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian berkaitan dengan pembentukan Lembaga Keuangan Masyarakat Pra Koperasi yang memiliki semangat otonomi daerah dan kearifan lokal. Pelaksanaan PUM-RTM di Kabupaten Jember menggunakan prinsip tanggung renteng yang berarti masyarakat atau kelompok yang terbentuk bertanggung jawab bersama baik dalam pinjaman dan menjamin secara bertimbal balik terhadap kerugian dari para anggotanya. Kelompok usaha yang terdiri atas 5 orang dapat mengajukan kredit usaha tanpa agunan antara Rp 50.000 hingga Rp 1.000.000,00. Dengan kucuran kredit berjangka waktu 10 minggu yang diangsur setiap minggu dengan bunga 0 sampai 10 persen, terobosan ini sangat membantu kelompok usaha kecil dan menengah. Tujuan dari program PUM RTM menurut Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan LKMM adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan Rumah Tangga Miskin (RTM).
2. Menyediakan sumber permodalan untuk pengembangan usaha mikro.
3. Mewujudkan kemandirian dan kapabilitas komunitas dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi.
4. Memfasilitasi terbentuknya institusi ekonomi yang bernama LKMM (Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat) serta terbentuknya Institusi sosial (Pokmas) (Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan LKMM).

Sedangkan sasaran PUM-RTM menurut Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan LKMM adalah

1. lokasi program diprioritaskan pada desa / kelurahan dengan jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi termasuk juga wilayah yang terkena bencana;
2. wilayah pelayanan LKMM dan pembentukan Pokmas diprioritaskan pada lingkup dusun/lingkungan, hal ini dimaksudkan untuk membangun hubungan emosional diantara para anggota serta membangun rasa solidaritas sosial untuk memajukan kampung halamannya;

3. sasaran Rumah Tangga Miskin (RTM) diprioritaskan pada RTM usia produktif, perempuan, menikah dan telah memiliki usaha atau pernah berusaha dan berencana membuka usaha baru atau RTM yang belum berpengalaman usaha tetapi memiliki motivasi tinggi untuk merintis usaha.

Adapun nilai-nilai dan prinsip dasar yang dikembangkan dalam PUM-RTM menurut Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan LKMM adalah

1. mengembangkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, kesetaraan dan kebersamaan
2. mengembangkan pengelolaan institusi masyarakat yang dilakukan secara demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif
3. mengembangkan proses pemberdayaan yang hakiki melalui penanaman nilai-nilai kerjasama kelompok

Tujuan, sasaran, dan prinsip dasar dari program PUM-RTM adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan harapan mampu memutus rantai kemiskinan sehingga keluar dari belenggu kemiskinan serta mengajarkan dan menguatkan nilai nilai kerjasama kelompok berprinsip pada kejujuran, demokratis, akuntabel, partisipatif. Adapun dasar hukum PUM-RTM adalah sebagai berikut.

1. Undang Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, tambahan lembaran Negara nomor 3502)
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
4. Undang Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2008, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747)

6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi UMKM

Proses dan pengelolaan program menurut Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Modal LKMM 2010 dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yang terdiri dari a) penguatan institusi, b) penguatan modal, c) peningkatan ketrampilan. Ketiga aktifitas tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

a. Tahap Pertama: Penguatan Institusi

Penguatan institusi dilaksanakan melalui 9 langkah kegiatan yang merupakan prosedur baku sebagai tahap pemberdayaan untuk mencerdaskan RTM, membangun kerja sama kelompok serta mengembangkan sistem yang akan disepakati bersama. Pada aktivitas ini terdapat 2 institusi yang akan dibentuk yaitu institusi sosial berupa Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang didefinisikan bahwa lembaga atau sekumpulan warga diwilayah sasaran yang memenuhi kriteria sebagai warga miskin yang ditetapkan masyarakat sendiri yang bertujuan agar proses pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dengan bertumpu pada konsep sapu lidi dimana timbulnya konsolidasi antara yang kuat dan lemah didalam satu kelompok serta timbulnya rasa gotong-royong didalam kelompok tersebut (Juklak pengelolaan LKMM Tahun 2010). adalah dalam bentuk Kelompok Masyarakat (PokMas) RTM dan institusi ekonomi dalam bentuk LKMM. Adapun langkah penguatan institusi dimaksud adalah sebagai berikut.

Langkah 1: Identifikasi tokoh relawan sebagai calon pengelola lembaga keuangan mikro masyarakat. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember mencari tokoh relawan pada setiap Desa/Dusun dengan cara terjun langsung ke masyarakat tanpa berpakaian Dinas dan menyamar seperti seorang peneliti atau mahasiswa. Setelah berada di Desa/Dusun Dinas Koperasi tidak menanyakan tokoh relawan pada perangkat desa melainkan dengan cara bertanya dari pintu ke pintu mencari orang yang memiliki

cacat sosialnya rendah serta suka membantu. Identifikasi tokoh relawan dilakukan oleh jajaran dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember melalui cara-cara *silent cooperation*. Tokoh relawan tersebut terdiri dari tokoh masyarakat yang memiliki jiwa sosial tinggi dan bertanggung jawab, sehingga mereka benar-benar menjadi panutan yang diharapkan mampu mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat yang terdiri dari 5 orang. Dinas Koperasi UMKM Jember tidak langsung membocorkan bahwa Program ini ada bantuan modalnya melainkan bagaimana melihat keseriusan masyarakat tanpa adanya bantuan dari Pemerintah.

Langkah 2: Identifikasi calon peserta kegiatan dilakukan dengan mendaftar para pengusaha mikro rumah tangga miskin yang nanti akan dibina menjadi anggota LKMM tersebut.

Langkah 3: Refleksi Kemiskinan. Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember bersama pengurus LKMM dan peserta kegiatan yang terdaftar melakukan proses diskusi dengan menanyakan permasalahan apa yang menyebabkan masyarakat miskin sehingga nantinya menemukan rumusan permasalahan.

Langkah 4: Penyusunan rancangan kepengurusan LKMM dan pembentukan pokmas-pokmas Rumah Tangga Miskin (RTM). Kepengurusan terdiri dari para tokoh relawan yang terjaring kemudian mereka membagi tugas dan wewenang yang nanti akan dilakukan oleh mereka sebagai pengelola LKMM.

Langkah 5: Penyusunan rancangan anggaran dasar LKMM dan melakukan pemetaan swadaya untuk melihat sejauh mana kelompok-kelompok masyarakat tersebut dapat melakukan eksplorasi atau penggalian atas potensi yang dimiliki dalam rangka mengupayakan peningkatan kehidupan yang lebih baik.

Langkah 6: Penyusunan rancangan anggaran rumah tangga LKMM dan sekaligus memberikan pembekalan sistem tanggung renteng kepada masing-masing kelompok masyarakat.

Langkah 7: Pembekalan prosedur administrasi peminjaman dan analisis kelayakan mikro.

Langkah 8: Penetapan pengurus LKMM dan sekaligus mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKMM.

Langkah 9: Menjalankan simulasi prosedur pinjaman atau angsuran sebagai tahap akhir dalam kesiapan memberikan pinjaman kepada RTM tersebut.

b. Tahap Kedua: Penguatan Modal Usaha

Sumber pemodalannya berasal dari APBD Kabupaten Jember baik dengan status hibah maupun pinjaman bergulir, pinjaman dari APBD Provinsi Jawa Timur serta donasi dari institusi maupun perorangan yang peduli. Dalam panduan Pembinaan Pokmas tahun 2008 menyebutkan bahwa pada awal tahun 2005 kegiatan PUM-RTM dibiayai oleh APBD Kabupaten Jember sebesar Rp. 100 juta dan penyediaan modal usaha dalam bentuk hibah sebesar Rp 50 juta. Pada tahun 2006 kegiatan PUM-RTM dibiayai oleh APBD sebesar Rp 1,1 M dan penyediaan modal usaha dalam bentuk hibah sebesar Rp 590 juta. Sedangkan pada tahun 2007 kegiatan PUM-RTM dibiayai oleh APBD sebesar Rp 1,5 M dan penyediaan modal dalam bentuk pinjaman lunak atau bergulir sebesar 685 juta. Pada tahun 2008 kegiatan PUM-RTM dibiayai oleh APBD sebesar Rp 705 juta dan penyediaan modal dalam bentuk pinjaman lunak atau bergulir sebesar Rp 75 juta. Sehingga terdapat perbedaan dalam pola pembiayaan permodalan antara tahun 2005-2006 yang memperoleh bantuan hibah dengan tahun 2007-2008 yang memperoleh bantuan dalam bentuk pinjaman lunak atau bergulir yang harus dikembalikan dalam waktu 2 tahun sampai tahun 2016.

Pengurus LKMM bertanggung jawab atas keberlangsungan pembiayaan untuk usaha mikro sehingga harus dikelola secara profesional, demokratis, transparan, dan akuntabel dengan mengacu pada AD/ART yang telah disepakati bersama. Sedangkan kelompok masyarakat (PokMas) RTM bertanggung jawab atas pembelian pinjaman secara tepat waktu. Dengan kata lain, LKMM menyalurkan pinjaman kepada anggota yang tergolong dalam PokMas RTM.

Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang, 1 ketua, dan 4 anggota. Anggota yang dilayani oleh LKMM adalah pengusaha mikro perempuan RTM yang produktif.

c. Tahap Ketiga: Peningkatan Keterampilan

Tahap peningkatan keterampilan dilakukan setelah tahap penguatan institusi dan penguatan modal usaha. Pada tahap ini, LKMM telah menjalankan aktifitas simpan pinjam dan PokMas secara rutin mengadakan pertemuan mingguan. Para anggota PokMas yang telah mendapat pelatihan keterampilan dapat meningkatkan kapasitas usahanya secara lebih efektif karena telah didukung oleh institusi yang sehat. Untuk pelatihan keterampilan ini terdiri dari pengolahan makanan seperti memasak dan membuat kue, membuat tas, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang bersifat produktif seperti menjual barang-barang konveksi, kerudung, pakaian, dan lain sebagainya.

Ketiga tahap tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Aktivitas modal usaha dilakukan setelah penguatan institusi dilakukan dengan benar sedangkan tahap peningkatan keterampilan dilakukan setelah tahap penguatan institusi dan penguatan modal usaha dilakukan. PUM-RTM pada dasarnya ditekankan pada ibu-ibu produktif serta dilaksanakan dalam rangka perbaikan kualitas sumberdaya manusia dengan perbaikan pada bidang perekonomian. Asumsi dasar PUM-RTM adalah dengan melakukan perbaikan kualitas hidup melalui mendanai kegiatan ibu-ibu produktif sehingga tidak lagi bergantung pada hasil dari suami serta mampu memutus rantai kemiskinan dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

Kelurahan Jumerto merupakan salah satu kelurahan yang masuk wilayah Kecamatan Patrang sebagai penerima PUM-RTM. Di Kelurahan Jumerto terdapat 2 (dua) LKMM yang dibentuk oleh dinas koperasi yaitu LKMM Jumerto Lor dan LKMM Barokah. Pada tanggal 27 Oktober 2009 LKMM Barokah sudah berubah menjadi koperasi wanita (kopwan) dengan memiliki nomor badan hukum 518/724.BH/XVI.7/410/2009.

4.3 Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) di Kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang

Kelurahan Jumerto merupakan salah satu Kelurahan penerima program PUM-RTM yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember. Kelurahan Jumerto pertama kali menerima program PUM-RTM pada tahun 2006 di Dusun Krajan dan pada tahun 2010 di Dusun Jumerto Lor. Berikut alamat LKMM di Kelurahan Jumerto.

Tabel 4.6 Alamat LKMM di Kelurahan Jumerto

No	Nama LKMM	Alamat LKMM	
		Kecamatan	Desa/kel
1	LKMM Barokah	Patrang	Jumerto
2	LKMM Jumerto Lor	Patrang	Jumerto

Sumber ; data LKMM Kecamatan Patrang Tahun 2011

Kelurahan Jumerto memiliki 2 (dua) LKMM yang menerima bantuan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember yaitu LKMM Barokah dan LKMM Jumerto Lor. Dalam pelaksanaannya LKMM Jumerto Lor mengalami banyak permasalahan, bahkan modal awal yang diberikan di salahgunakan untuk keperluan lain. Sedangkan pada LKMM Barokah dalam pelaksanaannya mengalami peningkatan baik modal maupun anggota kelompok sehingga institusi yang sebelumnya berupa LKMM sekarang berubah menjadi koperasi wanita pada tahun 2009. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sie Dinas Koperasi dan UMKM Jember bapak Agus Edi Santoso pada hari Rabu 16 Agustus 2017 pukul 10.24 WIB.

“disuatu desa/kelurahan hanya ada satu kopwan *mas* dimana kopwan tersebut dipilih dari LKMM yang terbaik di satu lingkungan, sedangkan Kelurahan Jumerto memiliki LKMM Barokah yang aktif, terdapat perputaran modal, kegiatan pertemuan masih jalan, pembukuan masih tertib, itu yang membuat LKMM Barokah menjadi Koperasi Wanita dan mempunyai badan hukum pada tahun 2009 *mas* sedangkan LKMM Jumerto Lor

setelah menerima bantuan tahun 2010 banyak yang menyalah gunakan untuk kepentingan lain, karena menganggap program ini hanya bantuan hibah sehingga tidak wajib untuk dikembalikan”

Selain melakukan wawancara dengan pihak dinas, peneliti juga melakukan wawancara dengan penerima program untuk mencari informasi terkait LKMM Barokah yang sudah menjadi Koperasi Wanita dan LKMM Jumerto Lor yang sudah mati di Kelurahan Jumerto. Wawancara pertama dengan ketua Koperasi wanita Barokah yaitu Ibu Latifa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB.

“dulu tertib *mas* kalau pinjam ketika waktunya tagihan yaa bayar, pengurusnya juga aktif *mas* ndak ngilang, pembukuan administrasi juga tertib. Sehingga Pokmas terus nambah dan pada tahun 2009 Dinas Koperasi dan UMKM Jember merubah institusi LKMM menjadi koperasi wanita *mas*”

Berbeda dengan LKMM Jumerto Lor yang hanya aktif 1 tahun mulai 2010 sampai 2011. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurul Hotima selaku Koordinator LKMM Jumerto Lor hari 17 Agustus 2017 pukul 14.12 WIB.

“LKMM Jumerto Lor hanya bertahan 1 tahun *mas*, yaa salah satunya banyak yang nganggep uang hibah jadi gaa wajib dikembalikan *mas* “

Dari hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa anggota dan pengurus di LKMM Barokah saling bertanggung jawab atas kewajiban yang dimiliki. Anggota dalam pengembalian pinjaman tertib mengembalikan pada waktunya sedangkan pengurus juga selalu aktif dalam mengelola keuangan di LKMM Barokah. Berbeda dengan LKMM Jumerto Lor banyak anggota yang tidak bertanggung jawab dengan modal yang dipinjamnya. Banyak yang membawa kabur modal karena beralasan modal tersebut merupakan bantuan hibah dari pemerintah. Sehingga berdampak pada tidak aktifnya LKMM karena tidak adanya modal pinjaman yang dikembalikan.

1. LKMM Barokah

LKMM Barokah terbentuk pada tahun 2006 dengan struktur kepengurusan yaitu Bapak Juriyono sebagai Koordinator, Bapak Supi sebagai Kasir dan Bapak Sumalin sebagai Juru Buku. Pada tahun 2007 Bapak Supi menggantikan Bapak Juriyono sebagai koordinator di LKMM Barokah dikarenakan Bapak Juriyono sibuk mengurus toko peracangan miliknya sehingga tidak bisa membagi waktu untuk melanjutkan menjadi pengurus. Sedangkan pengganti Bapak Supi sebagai Kasir diserahkan pada istrinya yaitu Ibu Latifa. Struktur kepengurusan berubah lagi setelah LKMM Barokah menjadi Kopwan Barokah pada tahun 2009. Koordinator yang dulunya dipegang Bapak Supi sekarang berganti pada Ibu Latifa, Sekertaris Ibu Afton dan Bendahara Ibu Susi. Terdapat 101 Pokmas yang sudah terbentuk dan 498 peminjam di LKMM Barokah sampai tahun 2009 sebelum menjadi Kopwan. Pada tahun 2006 ada perlakuan khusus dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember dimana semua LKMM yang dibentuk tahun 2006 mendapat modal sebesar Rp 56.000.000,00 terutama pada LKMM Barokah. Tujuannya agar LKMM nanti dapat berkembang dan berhasil serta berubah menjadi Kopwan. Seperti yang disampaikan Oleh Bapak Agus Edi selaku Kepala Sie Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember pada Hari Senin 21 Agustus 2017 pukul 09.30 WIB.

“dalam peraturan PUM-RTM modal awal yang seharusnya diberikan kepada tiap LKMM itu sebesar Rp 25.000.000 untuk dikembangkan, akan tetapi pada tahun 2006 ada perlakuan khusus *mas*, tiap LKMM mendapat bantuan sebesar Rp. 56.000.000 dan menjadi Koperasi Wanita semua salah satunya LKMM Barokah di Kelurahan Jumerto pada tahun 2009”

2. LKMM Jumerto Lor

LKMM Jumerto Lor terbentuk pada tahun 2010 dengan struktur kepengurusan yaitu Ibu Nurul Hotimah sebagai Koordinator, Ibu Siti Fatimah sebagai Kasir, Ibu Heny Purwanti sebagai Juru Buku. Terdapat 7 pokmas dan 35 peminjam pada LKMM Jumerto Lor. Dalam perkembangannya LKMM Jumerto Lor hanya berjalan 1 tahun, dikarenakan banyak anggota menganggap dana hibah sehingga tidak wajib dikembalikan dan tidak ada tanggung jawab dari pengurus

pada anggota yang menyalahgunakan modal yang diberikan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus Edi selaku Kepala Sie Dinas Koperasi dan UMKM Jember pada Hari Senin 21 Agustus 2017 pukul 10.12 WIB ,

“LKMM Jumerto Lor ini terbentuk tahun 2010 *mas* dengan struktur kepengurusan Ibu Nurul Hotimah sebagai Koordinator, Ibu Siti Fatimah sebagai Kasir, Ibu Heny Purwanti sebagai Juru Buku. Ada 7 Pokmas dan 35 peminjam di data Dinas Koperasi tapi ada permasalahan di Jumerto Lor entah pengurus atau masyarakatnya yang nakal ada yang bilang masyarakatnya menganggap ini dana hibah jadi dana bagi-bagi tanpa harus dikembalikan ke pengurus LKMM, di Jumerto Lor juga hanya bertahan setahun setelah itu tidak ada perkembangan dan laporan ke Dinas”

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Heny Purwanti sebagai Juru Buku LKMM Jumerto Lor pada hari Senin, 21 Agustus 2017 pukul 15.15 WIB.

“disini dulu jadi LKMM yaa tahun 2010 *dek*, ada Bu Nurul sebagai Koordinatornya sama Ibu Siti Fatimah sebagai Kasir tapi yaa ndak tau jugaa dulu macet gara-gara apa ,soalnya masyarakat banyak yang ngomong kalok itu hibah dari pemerintah yaa akhirnya ndak dikembalikan”

Dari hasil wawancara tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pada Kelurahan Jumerto terdapat 2 (dua) LKMM yaitu LKMM Barokah dan LKMM Jumerto Lor. LKMM Barokah telah berubah menjadi Kopwan pada tahun 2009 sedangkan LKMM Jumerto Lor hanya bertahan 1 tahun karena tidak ada perkembangan.

Tabel 4.7 Sejarah LKMM di Kelurahan Jumerto

Keterangan	LKMM Barokah	LKMM Jumerto Lor
Tahun terbentuk	Tahun 2006	Tahun 2010
Dana awal	Rp 56.000.000,00	Rp 25.000.000,00
Kepengurusan	Ada pergantian pengurus baik pada saat menjadi LKMM maupun setelah menjadi Kopwan	Tidak ada pergantian kepengurusan karena mati
Jumlah Pokmas	Terdapat 101 Pokmas dan 498 peminjam sebelum Kopwan	Terdapat 7 Pokmas dan 35 peminjam sampai 2011
Status	Aktif pada saat ini berupa Kopwan	Mati

4.4 Proses Pengelolaan Program PUM-RTM Di Kelurahan Jumerto

Kegiatan PUM-RTM dilaksanakan dalam dari 3 (tiga) tahap yang terdiri dari a) penguatan institusi, b) penguatan modal, c) peningkatan keterampilan. Ketiga aktivitas tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

4.4.1 Tahap Penguatan Institusi

Penguatan institusi dilaksanakan melalui 9 langkah kegiatan yang merupakan prosedur baku sebagai tahap pemberdayaan untuk mencerdaskan RTM, membangun kerjasama kelompok serta mengembangkan sistem yang akan disepakati bersama. Pada aktivitas ini terdapat 2 (dua) institusi yang akan dibentuk yaitu institusi ekonomi dalam bentuk LKMM dan institusi sosial dalam bentuk kelompok masyarakat (Pokmas).

Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat Miskin adalah lembaga keuangan informal pra koperasi yang mengelola simpan pinjam yang melayani pengusaha mikro perempuan dari keluarga miskin dengan pola tanggung renteng. LKMM dikelola oleh orang-orang yang dipercaya oleh Pemerintah Kabupaten dan oleh keluarga miskin melalui seleksi ketokohan dan kerelawanan dan terutama yang memiliki cacat sosial paling sedikit serta menunjukkan itikad dan keberpihakan

pada keluarga miskin terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan wilayah kerja dusun atau lingkungan. Pengurus LKMM ini berjumlah 3 orang seluruhnya adalah perempuan. Pengurus LKMM terdiri dari Koordinator, Kasir, Juru Buku. Karena LKMM melayani anggota dalam satu wilayah Dusun atau lingkungan maka keanggotaan LKMM ditata secara berkelompok dan setiap kelompok terdiri dari 5 orang yang domisilinya berdekatan.

Tujuan dari penguatan institusi ini yaitu memberikan pemahaman akan pentingnya sebuah organisasi yang sehat berangkat dari tujuan didirikannya serta dapat berjalan secara berkelanjutan. Adapun beberapa syarat dikatakan institusi itu berjalan baik atau bisa dikatakan kuat adalah :

1. Memiliki kepengurusan lengkap dari ketua, sekertaris, bendahara.
2. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Memiliki tata cara dan prosedur pinjaman untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin.
4. Memiliki buku-buku administrasi yang dapat menunjang operasional LKMM
5. Mengadakan pertemuan-pertemuan kelompok.
6. Mengadakan pelatihan anggota Pokmas di bidang kelembagaan dan usaha (Dinamika kelompok dan refleksi kemiskinan)
7. Bertambahnya anggota Kelompok Masyarakat (PokMAs)

Pada awal pembentukan LKMM Barokah pada tahun 2006 Dinas Koperasi dan UMKM Jember mencari tokoh relawan baik perempuan maupun laki-laki yang diharapkan mampu menjadi pelopor dan agen pembaharuan serta memiliki tingkat cacat sosial yang sedikit. Bapak Juriyono, Bapak Supi dan Bapak Sumalin merupakan tokoh masyarakat yang pada saat itu menjadi ketua RT di Dusun Krajan Jumerto yang diharapkan mampu menjadi pelopor sehingga Dinas Koperasi dan UMKM Jember menjadikan mereka sebagai pengurus LKMM di Dusun Krajan Jumerto. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus Edi selaku Kepala Sie Dinas Koperasi dan UMKM Jember pada Hari Senin 21 Agustus 2017 pukul 10.15 WIB sebagai berikut,

“kegiatan PUM-RTM dilaksanakan melalui 3 tahapan yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya salah satunya tahap penguatan institusi yang tujuannya memberikan pemahaman akan pentingnya sebuah organisasi yang sehat berangkat dari tujuan program serta dapat berjalan secara berkelanjutan dan beberapa syarat bisa dikatakan institusi itu berjalan baik atau kuat antara lain memiliki struktur kepengurusan, memiliki AD/ART, memiliki tata cara atau prosedur peminjaman, memiliki buku-buku administrasi mengadakan pertemuan dan pelatihan bersama anggota, serta bertambahnya Pokmas. Awal tahun 2005-2006 dalam memilih pengurus LKMM dari Dinas memang belum ada isu gender karena memang sebagai percobaan dan murni untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin, pengurus LKMM baik laki maupun perempuan tergantung pada saat grounded, apabila adanya laki-laki ya gpp *mas* seperti di Jumerto ada Bapak Juriyono, Supi, Sumalin yang menjadi pengurus LKMM Barokah ”

Setelah LKMM terbentuk pengurus bersama Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember mendaftar nama-nama peserta kegiatan yang dianggap mampu atau mempunyai keinginan untuk usaha. Setelah muncul nama-nama peserta Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember menanyakan pokok permasalahan yang menyebabkan masyarakat masih miskin, sehingga menemukan rumusan masalah pada masyarakat sasaran. Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember memberikan gambaran program bahwa masyarakat diwajibkan pada saat meminjam dana pinjaman harus berkelompok maksimal 5 orang yang memiliki ketua kelompok pada masing-masing kelompoknya. Tujuannya agar ada pemimpin dalam kelompok tersebut dan berfungsi sebagai supervisor atas kelompoknya. Sedangkan sasaran program adalah RTM usia produktif kaum perempuan yang memiliki usaha atau pernah berusaha dan berencana membuka usaha baru atau RTM yang belum berpengalaman usaha tetapi memiliki motivasi tinggi untuk merintis usaha.

Pada LKMM Barokah tahun 2006-2009 terdapat Pokmas berjumlah 101 kelompok dan memiliki 498 anggota sebelum menjadi Kopwan tahun 2009. Akan tetapi dalam Pokmas tersebut tidak hanya perempuan yang meminjam melainkan juga laki-laki serta ada juga yang memilih meminjam secara individu daripada kelompok karena dicurangi oleh ketua kelompoknya. Padahal dalam pedoman sasaran program PUM-RTM yaitu perempuan dan harus berkelompok. Seperti

yang disampaikan Bapak Supi selaku ketua LKMM Barokah pada hari Kamis, 24 Agustus 2017 pukul 15.20 WIB,

“disini kalau minjam harus kelompok *mas* tiap kelompok maksimal ada 5 orang tapi ada juga yang minjam sendiri *mas* karena pernah dibawa kabur uangnya sama ketuanya ngga disetorkan kepengurus, ada juga yang ngaku disuruh ketua kelompoknya ngambil uang di pengurus karena ketuanya sakit lalu tidak dibagikan pada kelompoknya karena tau kalau uang hibah *mas* itu yang buat masyarakat minjem sendiri-sendiri. Jumlah Pokmas tahun 2006-2009 ada 101 serta peminjam 498. Rincinya pada tahun 2006 ada 12 Pokmas 60 peminjam, 2007 ada 32 Pokmas 157 peminjam, tahun 2008 ada 28 Pokmas 140 peminjam dan tahun 2009 ada 29 Pokmas 141 peminjam *mas*. Disini yang minjem juga tidak hanya perempuan *mas* tapi laki-laki juga karena kita sungkan kalau gak minjami takutnya nantik ada konflik *mas* yang penting pinjaman itu dikembalikan nantinya *mas*”

LKMM Barokah dalam memberikan pinjaman kepada Pokmas tidak memiliki AD/ART atau peraturan lainnya. Syarat yang diberikan pengurus LKMM hanya mengisi identitas pada buku pinjaman serta tanda tangan peminjam. Pengambilan pinjaman hanya ketua kelompok saja yang berhak mengambilnya karena ketua kelompok yang bertanggung jawab atas pinjaman tersebut. Pengurus LKMM Barokah memberikan batas pengembalian sampai 10 minggu tiap minggu sekali harus setor pada hari selasa. Untuk mempermudah dan membantu dalam administrasi pengurus LKMM Barokah mempunyai buku besar yang berisi jumlah Pokmas, nama-nama kelompok, pinjaman awal, kekurangan pengembalian serta kwitansi pengambilan dan pelunasan pengembalian. Pertemuan kelompok dan pelatihan anggota kelompok hanya dilakukan pada awal-awal terbentuk pada tahun 2006. Berikut merupakan wawancara dengan Ibu Latifa sebagai Kasir dari LKMM Barokah pada hari Kamis, 24 Agustus 2017 pukul 16.00 WIB,

“syarat yang diberikan pengurus kepada Pokmas hanya mengisi identitas pada buku pinjaman *mas* gaa ada yang lain yaa karena pengurus sudah kenal sama masyarakat *mas* itupun cuman ketua kelompok saja, cowok atau cewek disini boleh pinjam soalnya biar ga ada konflik *mas* asalkan dikembalikan gpp pinjam, pengurus tidak melihat apa punya usaha apa ngga yang penting

nanti dikembalikan saja *mas* biar uangnya bisa muter terus *mas* semua juga dicatet di buku besar nama-nama yang pinjem, berapa pinjaman awal, kekurangan pengembalian di catat sudah sama pengurus. Kalau pertemuan dan pelatihan dulu sering *mas* awal-awal pembentukan dulu tapi sekarang masyarakat juga sibuk jadi ngga sempet untuk datang kayak dulu *mas*”

Pernyataan tersebut sama seperti yang disampaikan Ibu Ripin selaku anggota kelompok LKMM Barokah pada hari Senin, 28 Agustus 2017 pukul 09.00 WIB

“saya dulu kalau pinjam ngga ada syarat tertentu *mas* ya cuman ngisi nama saya di buku pinjaman pengurus itu pun juga cuman ketua kelompok dan tiap minggu di hari selasa harus nyicil pengembalian *mas* kan batasnya sampai 10 minggu dulu memang ada pelatihan dan pertemuan anggota saya juga ikut tapi sekarang gaa ada *mas* saya juga sibuk jualan dirumah *mas*”

LKMM Jumerto Lor terbentuk pada tahun 2010, akan tetapi berbeda dengan LKMM Barokah yang struktur kepengurusannya diperbolehkan laki-laki, karena pada tahun 2005-2006 memang untuk pemicu program serta pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak mewajibkan perempuan. Pada LKMM Jumerto Lor struktur kepengurusannya diwajibkan perempuan karena melihat tujuan awal adanya PUM-RTM untuk memberdayakan perempuan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus Edi selaku Kepala Sie Dinas Koperasi dan UMKM Jember pada Hari Senin 21 Agustus 2017 pukul 10.45 WIB sebagai berikut,

“jadi Dinas Koperasi dan UMKM Jember dalam menentukan pengurus di Jumerto terutama di Jumerto Lor yaa mencari tokoh masyarakat pada setiap lingkungan/dusun akan tetapi pada Lingkungan Jumerto Lor Dinas mengutamakan perempuan karena melihat tujuan awal program memang untuk pemberdayaan perempuan berbeda dengan LKMM Barokah yang pengurusnya laki-laki karena memang pada tahun 2005-2006 untuk memicu masyarakat untuk mau usaha dan sebagai contoh untuk masyarakat lainnya”

Pengurus LKMM Jumerto Lor dalam proses pinjaman anggota tidak memiliki peraturan tertentu hanya mewajibkan memiliki kelompok dan mengisi pada buku pinjaman. Masyarakat yang meminjam secara individu tidak diperbolehkan oleh pengurus. Anggota kelompok juga harus berisi perempuan

semua tidak diperbolehkan ada yang berisi laki-laki. Buku administrasi yang ada di LKMM Jumerto Lor sudah hilang karena memang program ini sudah lama pada tahun 2010 dan LKMM Jumerto Lor hanya bertahan 1 tahun. Pelatihan dan pertemuan antara pengurus dengan anggota juga hanya pada awal setelah pembentukan LKMM. Seperti yang disampaikan oleh Koordinator LKMM Jumerto Lor Ibu Nurul Hotimah pada hari Senin, 21 Agustus 2017 pukul 14.05 WIB.

“memang dulu pengurus tidak mempunyai peraturan buat yang pinjam *mas* cuman masyarakat harus berkelompok dan mengisi daftar di buku pinjaman tapi kelompoknya yaa harus perempuan semua *mas* gaa boleh ada laki-lakinya kalau buku-buku administrasi dulu lengkap *mas* tapi saking lamanya bukunya gaa keurus *mas* apalagi cuman bertahan sampai 2011 kalau pertemuan antara pengurus dan anggota pernah *mas* tapi yaa cuman awal-awal dulu setelah LKMM dibentuk setelah itu tidak ada pertemuan lagi yaa kalau mau tanya-tanya yaa langsung nemuin pengurus *mas*”

LKMM Jumerto Lor memiliki 7 Pokmas dengan 35 peminjam pada tahun 2010. Jumlah tersebut tidak ada perkembangan lagi karena memang LKMM Jumerto Lor hanya bertahan sampai tahun 2011. Masyarakat diwajibkan berkelompok dan beranggotakan perempuan sepenuhnya apabila ingin meminjam pinjaman. Pengurus memperbolehkan anggota meminjam asalkan mempunyai usaha yang jelas. Apabila tidak mempunyai usaha pengurus LKMM Jumerto Lor tidak memperbolehkan masyarakat meminjam. Hal ini disampaikan oleh Kasir LKMM Jumerto Lor Ibu Siti Fatimah pada hari Senin, 21 Agustus 2017 pukul 14.20 WIB.

“masyarakat yang minjam disini yaa harus taat sama peraturan yang ditetapkan pengurus *mas* harus berkelompok dan harus perempuan, semua yang pinjam asalkan punya usaha sama pengurus diperbolehkan *mas* tapi kalau tidak punya usaha yaa ga boleh *mas*”

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Dewi anggota LKMM Jumerto Lor pada hari Kamis, 24 Agustus 2017 pukul 16.34 WIB

“iyaa *dek* dulu minjamnya harus berkelompok dan harus perempuan semua tapi pengurus juga pilih-pilih kalau mau minjamkan yaa cuman yang punya usaha yang boleh pinjem kalau

gaa punya usaha yaa ga boleh *dek* kalau saya yaa usaha warung *dek*”

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Heny Purwanti selaku Juru Buku LKMM Jumerto Lor pada hari Kamis, 24 Agustus 2017 pukul 16.40 WIB.

“yaa kalau pinjam memang harus yang punya usaha *mas* saya dulu saja mau pinjam gaa boleh sama Bu Nurul yaa karena saya pinjam untuk bayar utang *mas* ga buat usaha jadi gaa dibolehin”

Dari wawancara diatas penulis mendiskripsikan mengenai penguatan institusi LKMM di Kelurahan Jumerto secara lebih sederhana melalui tabel berikut ,

Tabel 4.8 Penguatan Institusi

Bentuk Penguatan Institusi	LKMM Barokah	LKMM Jumerto Lor
Kelengkapan Struktur Organisasi	- Lengkap tetapi koordinator berganti dari Bapak Juriyono menjadi Bapak Supi serta Kasir dari Bapak Supi menjadi Ibu Latifa	-Lengkap
Mempunyai AD/ART	-Tidak mempunyai	-Tidak Mempunyai
Memiliki Syarat dan Prosedur Pinjaman	-Tidak memiliki	-Tidak memiliki
Mempunyai buku administrasi	-Lengkap Memiliki Buku Besar, Buku Tabungan Peminjam, Buku Kas masuk dan keluar, serta kwitansi	-Tidak mempunyai (hilang)
Mengadakan pertemuan pengurus dengan anggota	-Pada awal setelah pembentukan LKMM	-Pada awal setelah pembentukan LKMM
Jumlah Pokmas	Tahun 2006 12 Pokmas 60 peminjam Tahun 2007 32 Pokmas 157 peminjam Tahun 2008 28 Pokmas 170 Peminjam Tahun 2009 29 Pokmas 141 peminjam	Tahun 2010 7 Pokmas 35 peminjam

4.4.2 Penguatan Modal

Sumber permodalan LKMM berasal dari APBD Kabupaten Jember baik dengan status hibah maupun pinjaman bergulir, pinjaman dari APBD Provinsi Jawa Timur serta donasi dari institusi maupun perorangan yang peduli. Pengurus LKMM bertanggung jawab atas keberlanjutan pembiayaan untuk usaha mikro sehingga harus dikelola secara profesional, demokratis, transparan dan akuntabel dengan mengacu pada AD-ART yang telah disepakati bersama. Sedangkan Pokmas RTM bertanggungjawab atas pengembalian pinjaman secara tepat waktu.

Pada tahun 2006 LKMM Barokah menerima bantuan modal sebesar Rp 56.000.000,00 dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember. LKMM yang dibentuk pada tahun 2006 mendapat perlakuan khusus dari Dinas Koperasi agar LKMM yang terbentuk nanti dapat berkembang dan berhasil serta menjadi Kopwan. Tidak ada dana tambahan lagi yang diberikan hanya sekali pada awal pembentukan. Akan tetapi LKMM Barokah setelah menjadi Kopwan Barokah mendapat bantuan modal lagi dari Dinas operasi sebesar Rp. 25.000.000,00 untuk dikembangkan pada tahun 2010. Hal tersebut dikatakan oleh Bapak Agus Edi selaku Kepala Sie Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten jember pada hari Rabu, 30 Agustus 2017 pukul 09.30 WIB,

“pada tahun 2006 ada perlakuan khusus *mas*, tiap LKMM mendapat bantuan sebesar Rp. 56.000.000 tujuannya agar LKMM tersebut menjadi Koperasi Wanita semua salah satunya LKMM Barokah di Kelurahan Jumerto pada tahun 2009 menjadi Kopwan. Setelah menjadi Kopwan pada tahun 2010 Kopwan Barokah mendapat bantuan modal lagi dari Dinas sebesar Rp. 25.000.000,00 untuk dikembangan lagi”.

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Bapak Supi selaku sebagai Koordinator LKMM Barokah pada tanggal Sabtu, 2 September 2017 pukul 14.00 WIB,

“memang dulu tahun 2006 LKMM Barokah dapet bantuan dari Dinas Koperasi Rp. 56.000.000,00 untuk dikembangkan tidak dapat tambahan lagi *mas* tapi setelah jadi Kopwan ada dana tambahan dari dinas lagi Rp. 25.000.000,00 *mas*”

Penguatan modal yang dilakukan pengurus LKMM Barokah dilakukan dengan banyak cara agar modal yang ada tetap bisa dikembangkan dan dirasakan oleh masyarakat. Tidak adanya peraturan atau jaminan yang diberikan pengurus menjadikan masyarakat semakin mudah meminjam modal dari LKMM. Bunga yang diberikan juga kecil sebesar 0.5% agar tidak terlalu memberatkan anggota. LKMM Barokah dalam meminjamkan modal tidak mengacu pada pedoman PUM-RTM, seperti harus berkelompok banyak masyarakat yang meminjam secara individu diperbolehkan. Selain itu laki-laki juga diperbolehkan meminjam asalkan modal tersebut dikembalikan sesuai kesepakatan waktu awal peminjaman. Hasil dari perputaran modal tersebut nantinya digunakan untuk dikelola dan dikembangkan lagi oleh pengurus untuk dipinjamkan kepada masyarakat dan setiap akan hari raya pengurus membagikan bingkisan untuk anggota serta untuk membeli keperluan kegiatan lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Sumalin selaku Juru Buku LKMM Barokah pada hari Sabtu, 2 September 2017 pukul 15.00 WIB,

“LKMM Barokah tidak mempunyai peraturan tertentu *mas* cuman ngisi identitas pada buku pinjaman saja kalau mau ngambil, yang penting tidak memberatkan masyarakat *mas* biar masyarakat banyak yang pinjem, masyarakat minjem sendiri juga diperbolehkan karena dulu memang banyak ketua kelompok yang cengel *mas* tidak disetorkan ke pengurus ada juga yang ngaku disuruh ketuanya ngambil gara-gara ketuanya sakit terus tidak dibagikan *mas*. yang pinjem juga ada yang laki-laki *mas* biar ga ada konflik nantinya biar ga panas-panasi ibu-ibu kalau itu uang hibah *mas* yang penting nanti dikembalikan biar dapat diputar terus modalnya *mas* hasil dari pengembalian nanti yaa diputer lagi sama pengurus kalau pas hari raya pengurus juga ngasih bingkisan ke anggota yang tertib bayarnya *mas* sama digunakan buat beli keperluan kegiatan *mas*”

Meskipun tidak ada jaminan untuk meminjam dengan bunga yang cukup ringan dan masyarakat meminjam secara individu baik perempuan maupun laki-laki masih saja banyak anggota dalam pengembalian mengalami banyak kemacetan bahkan sampai tidak membayar. Usaha yang dilakukan pengurus LKMM Barokah tidak hanya dengan cara mengingatkan secara lisan akan tetapi juga mendatangi anggota kerumahnya dengan menanyakan hambatan yang membuat usaha anggota macet agar anggota bisa membayar tagihan tepat waktu.

Perkembangan modal dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Pada tahun 2006 per Desember modal yang ada pada LKMM Barokah sebesar Rp 44.682.460, pada tahun 2007 per Desember sebesar Rp 70.083.500, pada tahun 2008 per Desember sebesar Rp 62.134.000 dan tahun 2009 sebelum menjadi koperasi wanita sebesar Rp 44.928.500. Seperti yang disampaikan oleh Koordinator LKMM Barokah Bapak Supi pada hari Sabtu, 2 September 2017 pukul 14.15 WIB

“tidak ada jaminan *mas* dalam meminjam modal disini bunga yang diberikan juga 0.5% sangat rendah tapi kok yaa masih saja banyak yang molor *mas* banyak yang macet alasannya gara-gara belum laku usahanya yaa usaha yang dilakukan pengurus yaa mengingatkan *mas* setelah diingatkan kok tidak ada tanggapan terus didatengi kerumahnya ditanya baik-baik kendalanya biar bisa bayar tepat waktu *mas* kalok perkembangan modal disini ya kadang naik kadang turun *mas* pada tahun 2006 per Desember modal yang ada pada LKMM Barokah sebesar Rp 44.682.460, pada tahun 2007 per Desember sebesar Rp 70.083.500, pada tahun 2008 per Desember sebesar Rp 62.134.000 dan tahun 2009 sebelum menjadi koperasi wanita sebesar Rp 44.928.500 yaa meskipun naik turun pokok masih ada perputaran modal *mas* biar anggota bisa pinjam buat usaha”

Tidak ada jaminan yang diberikan oleh pengurus bertujuan agar masyarakat tidak terbebani dengan syarat yang diberikan serta agar masyarakat banyak yang pinjam. Seperti yang disampaikan Ibu Deni selaku anggota LKMM Barokah pada hari Selasa, 5 September 2017 pukul 15.00 WIB,

“dulu kalau pinjam gaa ada jaminan kok *mas* kalau mau pinjam yaa pinjam, kan biar ga bebani yang pinjem *mas* syaratnya cuman ngisi nama pada buku pinjaman tok *mas* terus kalok sudah lunas pinjem lagi gpp *mas* sama pengurus”

Pada tahun 2010 LKMM Jumerto Lor menerima dana dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember sebesar Rp 25.000.000,00. Dana tersebut nantinya digunakan untuk dikembangkan pada anggota yang memiliki usaha. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember juga telah menetapkan sasaran utama yang diperbolehkan meminjam harus perempuan karena memang tujuan awal PUM-RTM untuk perempuan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus Edi

selaku Kepala Sie Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember pada hari Rabu, 30 Agustus 2017 pukul 09.45 WIB.

“LKMM Jumerto Lor terbentuk pada tahun 2010 *mas* dulu LKMM Jumerto Lor menerima bantuan dana sebesar Rp 25.000.000,00 untuk dikembangkan Dinas dulu menyarankan kalau ada yang pinjam laki-laki jangan diperbolehkan karena memang PUM-RTM ini untuk pemberdayaan perempuan sepenuhnya *mas*”

Hal tersebut diperjelas oleh Ibu Nurul Hotimah selaku Koordinator LKMM Jumerto Lor pada hari Selasa, 5 September 2017 pukul 15.35 WIB.

“iya memang LKMM Jumerto Lor pada tahun 2010 dapat bantuan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember sebesar Rp. 25.000.000,00 *mas* pak Agus juga menyarankan yang pinjem harus perempuan gaa boleh laki-laki gitu *mas*”

Pengurus LKMM Jumerto Lor dalam menguatkan modal menetapkan bunga pinjaman sebesar 1% untuk setiap Pokmas. Tidak adanya peraturan yang berbelit-belit bertujuan agar masyarakat banyak yang meminjam. Hasil dari bunga tersebut akan digunakan pengurus untuk dikembangkan lagi pada anggota. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Heny Purwanti selaku Juru Buku LKMM Barokah pada hari Selasa, 5 September 2017 pukul 16.00 WIB.

“kalau pengurus memang sudah netapin bunga pinjaman 1% *mas* agar tidak memberatkan masyarakat, peraturannya juga gaa terlalu sulit cuman harus berkelompok dan daftar pada buku pinjaman hasil dari pengembaliannya yaa buat diputer lagi *mas*”

Masyarakat hanya diperbolehkan meminjam pinjaman sekali setelah melunasi, masyarakat tidak diperbolehkan untuk meminjam lagi karena agar anggota lainnya juga dapat merasakan. Selain itu banyak anggota yang tidak mengembalikan pinjaman pada pengurus karena beranggapan dana hibah. Pengurus LKMM Jumerto Lor hanya menegur anggota yang melakukan tindakan seperti itu tidak ada tindak lanjut dari pengurus baik mendatangi kerumahnya atau melaporkan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Retno pada hari Selasa, 5 September 2017 pukul 16.20 WIB

“saya dulu minjem itu sekali *mas* itupun juga gaa banyak cuman 600 buat modal setelah lunas itu saya pinjem lagi gaa boleh *mas* kata pengurusnya biar masyarakat lainnya kebagian dan merasakan

juga *mas* tapi ada yang gaa ngembalikan *mas* yaa soalnya tahu kalok dana hibah gaa usah dikembalikan gitu pengurusnya loh santai *mas* cuman negur tok gaa diparani kerumahnya atau dilaporkan ke Dinas”

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat diketahui bahwa upaya untuk mengatasi kredit macet belum dilakukan dengan maksimal karena hanya sebatas mengingatkan dan datang ke rumah peminjam. Selebihnya dalam hal penambahan modal pada saat menjadi LKMM baik LKMM Barokah maupun LKMM Jumerto Lor tidak ada dana tambahan yang dilakukan oleh dinas mulai dari awal program dijalankan kecuali LKMM Barokah setelah menjadi Kopwan ada dana tambahan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember pada tahun 2010. Begitupun juga jaminan pinjaman, tidak ada jaminan yang dipatok untuk peminjam. Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendiskripsikan mengenai penguatan modal pada LKMM di Kelurahan Jumerto pada tabel berikut ini,

Tabel 4.9 Penguatan Modal LKMM di Kelurahan Jumerto

Upaya yang dilakukan	LKMM Barokah	LKMM Jumerto Lor
Dinas	-Tahun 2006 menerima bantuan Rp 56.000.000,00 -Tahun 2010 menerima tambahan Rp 25.000.000,00	-Tahun 2009 menerima bantuan Rp 25.000.000,00
Pengurus/kelompok	-Prosedur pinjaman boleh pinjam lagi asalkan sudah lunas -Upaya untuk anggota yang macet dengan cara menegur dan menemui anggota dirumahnya -Bunga pinjaman 0,5% -Hasil pengembalian digunakan untuk dikembangkan lagi dan memberi bingkisan pada hari raya bagi anggota yang tertib	-Prosedur pinjaman hanya boleh pinjam satu kali agar masyarakat lain dapat merasakan juga -Upaya untuk anggota yang macet dengan cara menegur dan mengingatkan saja -Bunga pinjaman 1% -Hasil pengembalian digunakan untuk diputar dan dikembangkan lagi

4.4.3 Pengembangan Keterampilan Pengurus dan Anggota LKMM

Tahap peningkatan keterampilan dilakukan setelah tahap penguatan institusi dan penguatan modal usaha. Pada tahap ini LKMM telah menjalankan aktivitas simpan pinjam dan Pokmas telah secara rutin mengadakan pertemuan mingguan. Para anggota Pokmas yang telah mendapat pelatihan keterampilan dapat meningkatkan kapasitas usahanya secara lebih efektif karena telah didukung oleh institusi ekonomi yang sehat. Pada tahap pengembangan keterampilan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember sangat berperan karena sebagai fasilitator untuk pengurus LKMM dan anggotanya. Tujuannya agar pengurus dan anggotanya dapat semakin berkembang usahanya serta semakin terampil dengan bidang usaha yang digeluti. Selain itu agar ada inovasi baru dengan memberikan pelatihan-pelatihan membuat aneka makanan dan minuman yang memiliki nilai daya jual dipasaran serta pelatihan tata buku sederhana untuk pengurus LKMM. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Agus Edi selaku Kepala Sie Dinas Koperasi dan UMKM Jember pada Hari Rabu, 30 Agustus 2017 pukul 09.46 WIB,

“selain penguatan institusi dan penguatan modal ada satu lagi kegiatan pokok dalam PUM-RTM yaitu pengembangan keterampilan *mas*. Yang dimaksudkan disini pengembangan keterampilan untuk pengurus dan anggota LKMM. pengembangan keterampilan yang menjadi fasilitator yaa dari pihak Dinas Koperasi *mas*, biasanya dari Dinas diberikan pelatihan yang berkaitan dengan berwirausaha seperti membuat roti, bakso, minuman yang diadakan di rumah pengurus LKMM *mas* tujuannya agar pengurus dan anggota memiliki kreativitas dalam berwirausaha tidak hanya usaha yang itu-itu saja melainkan memiliki inovasi baru yang nantinya produk tersebut dapat laku dipasaran *mas* selain itu juga dilakukan pelatihan tata buku sederhana untuk pengurus LKMM *mas*”

Pengembangan keterampilan tidak hanya Dinas yang menjadi fasilitator tapi juga oleh pengurus LKMM Barokah. Pengembangan keterampilan yang dilakukan pengurus tidak seperti yang dilakukan oleh Dinas seperti membuat makanan dan minuman melainkan dengan cara mengadakan game-game ringan atau *outbound* yang bertujuan untuk mempererat persaudaraan antara pengurus

dengan anggotanya. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Latifa selaku Kasir di LKMM Barokah pada hari Selasa 5 September 2017 pukul 10.15 WIB,

“tidak hanya Dinas *dek* yang mengadakan pengembangan keterampilan, tapi pengurus juga meskipun pelatihannya tidak berhubungan dengan pengembangan usaha akan tetapi untuk memperkenalkan anggota satu dengan yang lain biar akrab *dek* pengurus dan anggota juga biar semakin dekat biasanya mengadakan *game-game* ringan kayak *outbond* gitu *dek* kan rame jadi bisa ketawa bareng semakin akrab”

Akan tetapi Pengembangan keterampilan yang dulunya rutin dilakukan sekarang jarang dilakukan bahkan tidak pernah diadakan lagi karena masyarakat sibuk dengan kegiatannya masing-masing sehingga sulit mendatangkan anggota seperti awal baru terbentuknya LKMM Barokah. Masyarakat memilih untuk mengurus usahanya atau diam dirumah daripada mengikuti pengembangan keterampilan yang diadakan baik dari Dinas Koperasi maupun dari pengurus LKMM Barokah. Anggota LKMM Barokah beranggapan masyarakat tidak tertarik dengan acara pengembangan keterampilan salah satunya dikarenakan merasa acara tersebut bertujuan untuk menagih anggota yang belum lunas atau macet sehingga anggota tidak datang. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yana selaku anggota LKMM Barokah pada hari Selasa, 5 September 2017 pukul 11.00 WIB,

“kalau saya tidak ikut *dek* yaa karena ada urusan dirumah ngurusi usaha toko kecil ini kadang juga ngurusi anak saya kan masih kecil kalok ditinggal rewel *dek* tapi ada yang bilang juga kalok takut ditagih kalok ikut pelatihan tersebut *dek*”

LKMM Jumerto Lor tidak jauh berbeda dengan LKMM Barokah pelatihan keterampilan hanya ada pada awal setelah LKMM terbentuk. Pelatihan keterampilan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember seperti mengadakan pelatihan membuat roti, bakso dan pelatihan pembukuan yang tujuannya agar pengurus LKMM lebih paham tentang pembukuan kelompok. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurul Hotimah selaku Koordinator LKMM Jumerto Lor pada hari Selasa, 5 September 2017 pukul 14.12 WIB

“pelatihan keterampilan dulu ada *mas* awal setelah pembentukan LKMM itu dulu Dinas Koperasi yang mengadakan yaa seperti

pelatihan buat makanan kayak roti, bikin bumbu sama pelatihan pembukuan buat pengurus *mas* yaa biar pengurus bisa mengelola pembukuan kelompok kedepannya *mas*”

Pengurus LKMM Jumerto Lor tidak pernah mengadakan pelatihan keterampilan seperti yang dilakukan pengurus LKMM Barokah karena beranggapan anggota tidak akan tertarik karena sibuk dengan kepentingannya sendiri. Selain itu anggota juga akan beranggapan bahwa pelatihan keterampilan yang diadakan tujuannya hanya untuk menagih anggota yang tidak mengembalikan pinjaman tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah selaku Kasir LKMM Jumerto Lor pada hari Selasa, 5 September 2017 pukul 15.02 WIB

“ pelatihan keterampilan hanya dilakukan Dinas Koperasi *mas* dulu kalau pengurus sendiri tidak pernah *mas* percuma warga tidak akan tertarik dan lebih mementingkan urusannya sendiri daripada ikut pelatihan selain itu anggota juga nganggap pelatihan ini nanti ujung-ujungnya yaa nagih *mas* itu yang membuat pengurus tidak mengadakan pelatihan”

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Nina selaku anggota LKMM Jumerto Lor pada hari Selasa 5 September 2017 pukul 15.30 WIB

“iya ada memang dulu *mas* pelatihan buat roti gulung tapi Dinas Koperasi dulu bukan pengurus yaa cuman pelatihan bikin makanan gitu yaa masyarakat ga tertarik *mas* ada yang ngmong itu buat nageh anggota juga *mas* malah tambah semakin buat masyarakat gamau dateng *mas*”

Dari beberapa pernyataan terkait pengembangan keterampilan LKMM di atas, menunjukkan bahwa pengembangan yang bersifat keterampilan yang ada di Kelurahan Jumerto tidak cukup baik, karena hanya LKMM Barokah yang pernah mengadakan pelatihan keterampilan meskipun cuman sekali kepada anggota. Namun mereka mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas dan hasil mengikuti pelatihan tersebut masyarakat diberikan tentang tata cara penulisan pembukuan dan membuat makanan berupa roti. Selanjutnya, penulis mendeskripsikan mengenai pengembangan keterampilan LKMM di Kelurahan Jumerto secara lebih sederhana melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 4.10 Pengembangan Keterampilan LKMM di Kelurahan Jumerto

Upaya yang dilakukan	LKMM Barokah	LKMM Jumerto Lor
Dinas	-Pelatihan dilakukan oleh dinas kepada pengurus dan anggota berupa penjelasan LKMM, pembekalan manajemen, maksud dan tujuan LKMM, pemahaman dan pembagian kerja LKMM serta membuat roti dan bakso -pelatihan tata buku sederhana untuk pengurus LKMM	- Pelatihan dilakukan oleh dinas kepada pengurus dan anggota berupa penjelasan LKMM, pembekalan manajemen, maksud dan tujuan LKMM, pemahaman dan pembagian kerja LKMM serta membuat roti -pelatihan tata buku sederhana untuk pengurus LKMM
Pengurus LKMM	-Pelatihan yang dilakukan pengurus LKMM yaitu mengadakan <i>outbound</i> untuk mempererat antara pengurus dan anggota LKMM	- tidak ada pelatihan yang dilakukan pengurus kepada anggota LKMM

4.5 Pola Pemanfaatan PUM-RTM

Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) merupakan program yang digagas oleh Dinas Koperasi dan UMKM Jember pada tahun 2005. Adanya PUM-RTM diharapkan dapat mendorong upaya kemiskinan menjadi lebih bervariasi dan memberikan harapan-harapan akan program yang lebih kongkrit untuk mencapai tujuan dan sarasannya. Tujuan yang spesifik dari kegiatan PUM-RTM adalah untuk :

1. Meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan Rumah Tangga Miskin (RTM),
2. Menyediakan sumber permodalan untuk pengembangan usaha mikro,

3. Mewujudkan kemandirian dan kapabilitas komunitas dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi,
4. Memfasilitasi terbentuknya institusi ekonomi yang bernama LKMM (Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat) atau BANK GAKIN serta terbentuknya institusi sosial (Pokmas).

Sasaran PUM-RTM diprioritaskan pada RTM usia produktif, perempuan, menikah dan telah memiliki usaha atau pernah berusaha dan berencana membuka usaha baru atau RTM yang belum berpengalaman usaha tetapi memiliki motivasi tinggi untuk merintis usaha. Sedangkan lokasi yang diprioritaskan pada lingkup dusun/lingkungan untuk wilayah pelayanan LKMM dan pembentukan Pokmas.

Peneliti bermaksud untuk mengetahui output atau hasil dari adanya PUM-RTM tersebut tercapai atau tidak. Seberapa besar tujuan program yang tercapai serta bermanfaat bagi masyarakat atau membuat masyarakat semakin ketergantungan dengan adanya program-program yang diberikan oleh Pemerintah. Adapun output atau hasil yang tercapai pada Kelurahan Jumerto ,

4.5.1 LKMM Barokah

a. Pola Pemanfaatan Modal LKMM

Pada tahun 2006 Dusun Krajan Kelurahan Jumerto mendapat bantuan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember berupa PUM-RTM. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember membentuk PUM-RTM karena masyarakat kesulitan dalam mengakses permodalan. Sehingga masyarakat banyak yang meminjam modal pada rentenir. Dibutuhkan institusi atau lembaga yang mampu mengelola keuangan masyarakat agar masyarakat tidak meminjam pada rentenir terus menerus. Tahun 2006 LKMM Barokah terbentuk untuk mengatasi permasalahan tersebut. LKMM Barokah menerima bantuan dana sebesar Rp. 56.000.000,00 untuk dikembangkan. Setelah LKMM terbentuk pengurus dan Dinas Koperasi melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang program PUM-RTM. Setiap masyarakat yang ingin meminjam pinjaman diharuskan membentuk kelompok atau Pokmas dengan jumlah 5 orang tiap kelompok dan

mengajukan permohonan pinjaman pada pengurus LKMM Barokah. Dalam pelaksanaannya PUM-RTM menggunakan prinsip tanggung renteng dan pinjaman tersebut harus digunakan hanya untuk keperluan usaha. Dana pinjaman hanya boleh diambil oleh ketua kelompok dan pengurus memberikan pemahaman tentang aturan pengembalian pinjaman. Pengembalian pinjaman dilakukan tiap minggu dalam jangka waktu 10 minggu dengan bunga 0,5%. Sebelum tahap pencairan masyarakat ditanyakan kesediaan dengan penjelasan yang disampaikan pengurus LKMM Barokah. Pokmas di LKMM Barokah berjumlah 101 dengan 498 peminjam sebelum akhirnya menjadi Kopwan. Tahun 2006 12 Pokmas 60 peminjam, Tahun 2007 32 Pokmas 157 peminjam, Tahun 2008 28 Pokmas 170 peminjam, Tahun 2009 29 Pokmas 141 peminjam. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Latifa selaku Kasir LKMM Barokah pada hari Rabu, 13 September 2017 pukul 14.16 WIB,

“LKMM Barokah dulu tahun 2006 *dek* terbentuknya memang sebelum adanya LKMM masyarakat pinjemnya ya banyak kerentenir *dek* setelah menerima dana Rp. 56.000.000,00 pengurus dan Dinas Koperasi sosialisasi *dek* masyarakat boleh pinjem kalok kelompokan dan untuk usaha *dek* dan mengajukan permohonan pinjaman pada pengurus, kalok pokmas ini sistemnya kan tanggung renteng *dek* jadi tanggung jawab bareng-bareng pinjemannya kalok yang boleh ngambil cuman ketua kelompok saja *dek* disini, pengembaliannya yaa tiap minggu tapi dalm 10 minggu bunganya juga kecil cuman 0,5% *dek* sampek sebelum jadi Kopwan sebelum cair ya masyarakat ditanya bersedia apa ga dengan penjelasan pengurus *dek* kalok iya yaa dicairkan *dek*. Pokmas disini dulu ada 101 *dek* dengan 498 peminjam tahun 2006 12 pokmas 60 peminjam, tahun 2007 32 Pokmas 157 peminjam, tahun 2008 28 pokmas 170 peminjam, tahun 2009 29 pokmas 141 peminjam *dek*”

Akan tetapi anggota yang meminjam diperbolehkan juga meminjam tanpa adanya usaha karena pengurus berpikiran daripada masyarakat banyak yang pinjam direntenir hidupnya semakin susah. Asalkan dikembalikan baik yang mempunyai usaha atau tidak boleh meminjam. Bunga yang diberikan pengurus kepada anggota sebesar 0.5%. Hasil dari pengembalian modal nantinya akan digunakan pengurus untuk dikembangkan lagi dengan meminjamkan ke anggota lain dan memberikan bingkisan pada hari raya bagi anggota yang tertib

membayar. Hal senada disampaikan oleh Bapak Supi selaku Koordinator LKMM Barokah pada hari Rabu, 13 September 2017 pukul 14.18 WIB

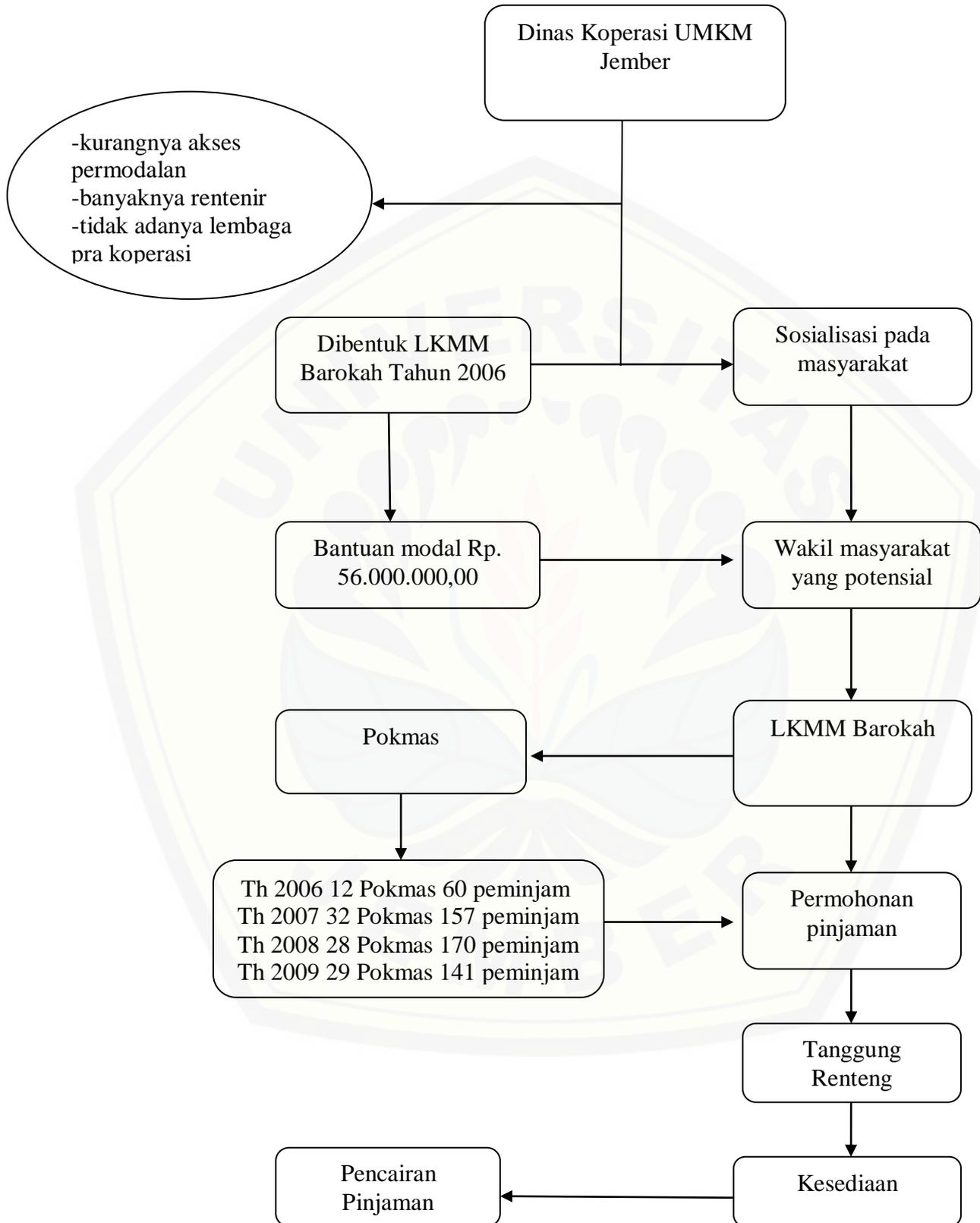
“pengurus mau memberikan pinjaman asalkan dikembalikan baik yang punya usaha atau tidak *mas* kasian daripada pinjem ke rentenir hidupnya kan tambah susah *mas* bunganya kan juga sedikit *mas* cuman 0,5% loh untuk hasil pengembaliannya yaa buat diputer lagi sama ngasih anggota yang tertib bingkisan di hari raya *mas*”

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ibu Ridwan selaku anggota LKMM Barokah pada hari Rabu 13 September 2017 pukul 14.30 WIB,

“memang dulu kalau pinjam yaa harus jujur *mas* punya usaha atau enggak, terus dibuat apa biar pengurus tau *mas*. Saya dulu pinjem *mas* saya punya usaha warung kopi *mas* bunganya juga rendah 0.5 persen cuman *mas*”

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Ripin selaku anggota LKMM Barokah pada hari Rabu 13 September 2017 pukul 14.45 WIB

“kalau pinjam di pengurus memang harus jujur *mas* waktu minjem ditanya soalnya, bunga dari pengurus cuman 0.5 persen *mas* yaa rendah lah kalau buat usaha kerupuk saya *mas* saya dulu juga dapet wafer pas hari raya dari pengurus *mas* lumayan buat nambah jajan lebaran”



Gambar 4.2 Proses Peminjaman di LKMM Barokah

b. Pola Pemanfaatan Modal Anggota LKMM Barokah

Pemanfaatan modal yang digunakan anggota LKMM Barokah yang dimaksudkan peneliti yaitu untuk mengetahui setelah menerima modal dari pengurus pola pemanfaatan modal yang digunakan untuk keperluan apa dan apakah memperoleh keuntungan serta apabila mendapat keuntungan digunakan untuk apa oleh peminjam. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ripin selaku anggota LKMM Barokah pada hari Rabu, 13 September 2017 pukul 14.50 WIB,

“uangnya yaa saya gunakan untuk usaha *mas* saya pinjam di pengurus gaa banyak tapi rutin *mas* 200 ribu saya pinjem terus saya setorkan nanti kalau habis lagi saya pinjem lagi *mas* buat usaha kerupuk saya meskipun untungnya tiap hari kadang cuman 30ribu kalok tiap bulan ya cuman 900ribu *mas* kadang bisa lebih bisa kurang *mas* cuman bisa buat modal sama makan saja tapi alkhamdulillah membantu *mas*”

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Yana selaku anggota LKMM Barokah pada tanggal hari Rabu, 13 September 2017 pukul 16.15 WIB,

“saya pinjem di pengurus gaa banyak *mas* 400 ribu tapi yaa rutin, kalau habis yaa pinjem lagi saya gunakan buat jualan sayuran di pasar *mas* ada hasilnya *mas* tapi yaa sedikit ga tentu *mas* biasanya tiap hari bisa 20ribu kalok tiap bulan yaa cuman 600ribu cukup buat modal sama makan saja dah”

Begitu juga seperti yang disampaikan oleh Ibu Sulik selaku anggota LKMM Barokah pada hari Sabtu, 16 September 2017 pukul 10.00 WIB,

“usaha saya kecil *dek* kalau pinjem ya 400 ribu buat beli dagangan kayak sampo, sabun, odol, mie yaa kayak gitu wes *dek* hasilnya juga kecil tiap hari kadang cuman 15ribu kadang biasanya bisa kurang bisa lebih kalok kejual *dek* kalok tiap bulan ya paling 450ribuan *dek* ga cukup buat keperluan lain cuman cukup buat modal sama makan tok *dek*”

Pemanfaatan modal yang digunakan anggota ternyata tidak semuanya untuk usaha akan tetapi ada juga yang menggunakan modal tersebut untuk keperluan lain seperti membeli pakaian, kasur bahkan ada juga yang digunakan untuk tambahan mengadakan pagelaran ludruk. Hal seperti ini yang membuat pengurus semakin jengkel dengan anggota yang keterlaluhan. Seperti yang

disampaikan oleh Bapak Supi selaku Koordinator LKMM Barokah pada hari Sabtu 16 September 2017 pukul 11.00 WIB,

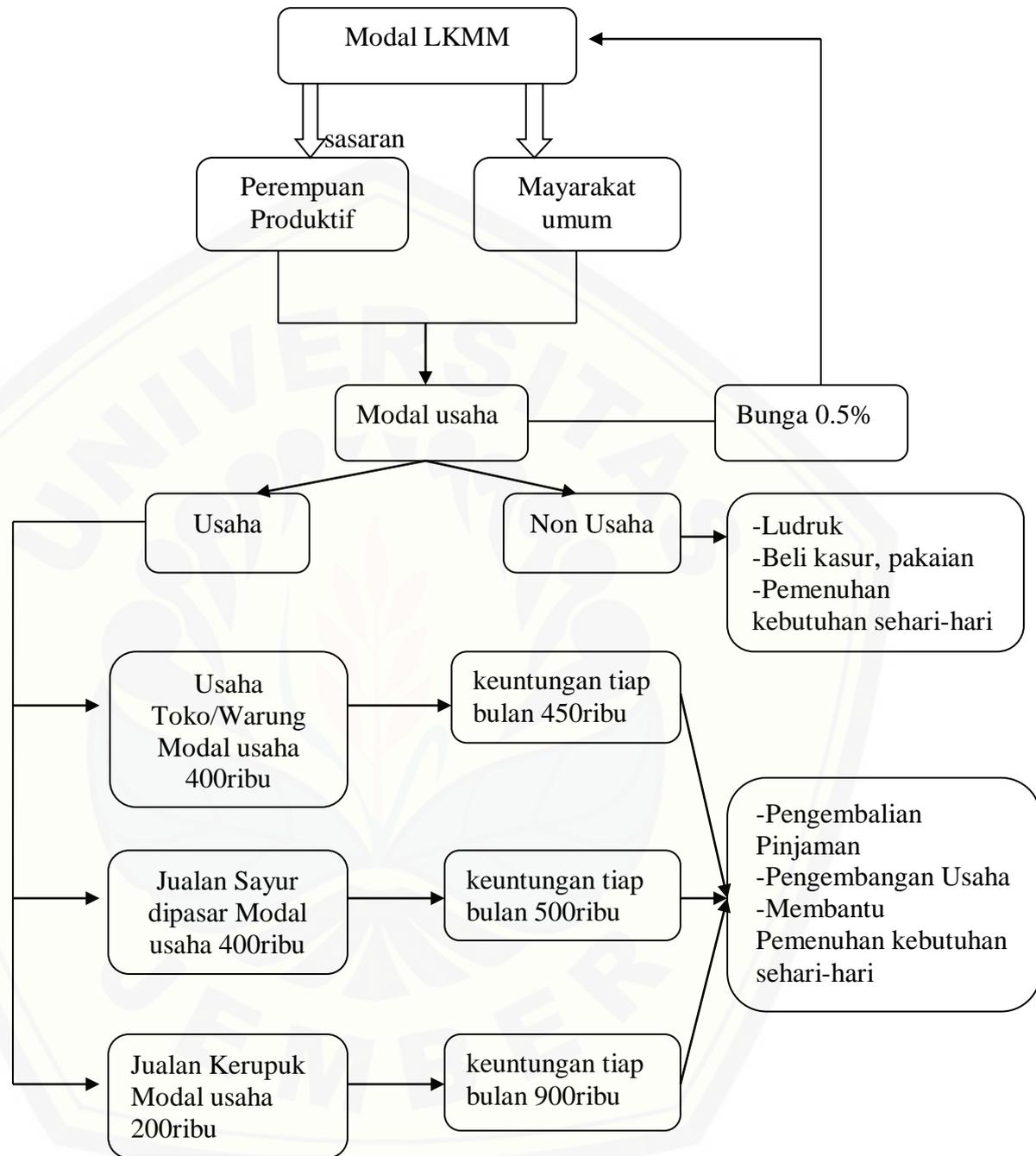
“anggota yang minjem digunakan untuk macem-macem *mas* ada yang buat usaha beneran ada juga yang buat usaha jadi-jadian maksudnya untuk keperluan lain *mas*. Dulu ada yang gunakan buat beli pakaian *mas* kasur bahkan nemene ada yang buat nanggap ludruk *mas* dulu ngakunya usahanya dirumah bangkrut terus pinjem 2 juta buat modal padahal pengurus netapin pinjaman *mas* 50 sampai 1juta tapi ini pinjamnya malah 2juta *mas*. Yaa namanya manusia yaa *mas* pngen bantu yaa diperbolehkan sama pengurus eh malah bohong *mas*”

Pada LKMM Barokah tidak hanya perempuan yang meminjam modal akan tetapi juga laki-laki diperbolehkan untuk meminjam asalkan pinjaman dikembalikan. Karena pengurus menginginkan semua merasakan manfaat dengan adanya PUM-RTM meskipun sasarannya perempuan. Seperti yang disampaikan oleh Bu Latifa selaku Kasir di LKMM Barokah pada hari Sabtu 16 September 2017 pukul 11.20 WIB,

“iya dsini cwo boleh pinjem *mas* yang penting nanti dikembalikan biar bisa diputer uang e kan enak *mas* kalau semua merasakan manfaatnya yang penting *mas* tidak terjadi iri-irian antar warga *mas*”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ahmad selaku anggota kelompok LKMM Barokah pada hari Sabtu, 16 September 2017 pukul 13.05 WIB,

“saya dulu tidak tau kalok ini cuman untuk perempuan *mas* yaa saya pinjam ke rumah Pak Supi 200ribu buat beli sembako *mas* lah gimana *mas* mau pinjem sapa lagi”



Gambar 4.3 Pola Pemanfaatan Pada LKMM Barokah

4.5.2 LKMM Jumerto Lor

a. Pola Pemanfaatan Modal LKMM

LKMM Jumerto Lor menerima bantuan dana PUM-RTM dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember pada tahun 2010 sebesar Rp. 25.000.000,00. Bantuan tersebut akan digunakan untuk dikembangkan pada anggota. Anggota yang diperbolehkan meminjam hanya perempuan yang mempunyai kelompok dan memiliki usaha. Masyarakat mengetahui adanya pinjaman dana dari LKMM Jumerto Lor pada saat pengurus LKMM sosialisasi dan menawarkan pada masyarakat untuk membuat Pokmas yang berisi perempuan semua. Masyarakat yang dipilih harus mempunyai usaha yang jelas dan mengajukan dana pinjaman sesuai dengan usaha yang dilakukan. Hanya ketua kelompok yang diperbolehkan mengambil dan mengembalikan pinjaman. Masyarakat diperbolehkan mengajukan permohonan pinjaman pada pengurus LKMM Jumerto Lor sesuai dengan usaha yang akan dilakukan. Setelah itu pengurus meneliti kelayakan usaha dengan dana pinjaman yang diajukan. Apabila layak berarti di dana dan apabila tidak layak dana pinjaman dikurangi. Dengan menggunakan prinsip tanggung renteng dalam pelaksanaannya dan dengan bunga pinjaman yang ditetapkan pengurus LKMM Jumerto Lor sebesar 1% tiap minggu dalam 10 minggu. Sebelum menerima dana pinjaman, pengurus menanyakan kesiadaan pada Pokmas dengan pertimbangan yang telah disampaikan pengurus. Hasil dari pinjaman tersebut akan digunakan pengurus untuk dikembangkan lagi pada anggota. Pada LKMM Jumerto terdapat 7 Pokmas dengan 35 peminjam. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Heny Purwanti selaku Juru Buku LKMM Jumerto Lor pada hari Senin, 18 September 2017 pukul 09.30 WIB.

“LKMM Jumerto Lor terbentuk tahun 2010 *mas* dulu dapet Rp 25.000.000,00 dari Dinas Koperasi dulu masyarakat tahu yaa dari kita *mas* pengurus LKMM sosialisasi suruh buat Pokmas yang anggotanya cwek semua tapi ga semua masyarakat kita kasih tau *mas* yang dianggap punya usaha saja yang boleh pinjem setelah itu yaa ngajukan permohonan pinjaman ke pengurus terus dilihat usaha sama pengajuan dananya sesuai nggak kalok gaa ya dikurangi *mas* kalok sesuai yaa dikasih lalu diberi pemahaman pengembaliannya itu tiap minggu dalam 10 minggu dengan bunga 1% *mas* sebelum pencairan masyarakat ditanya bersedia tidak *mas*

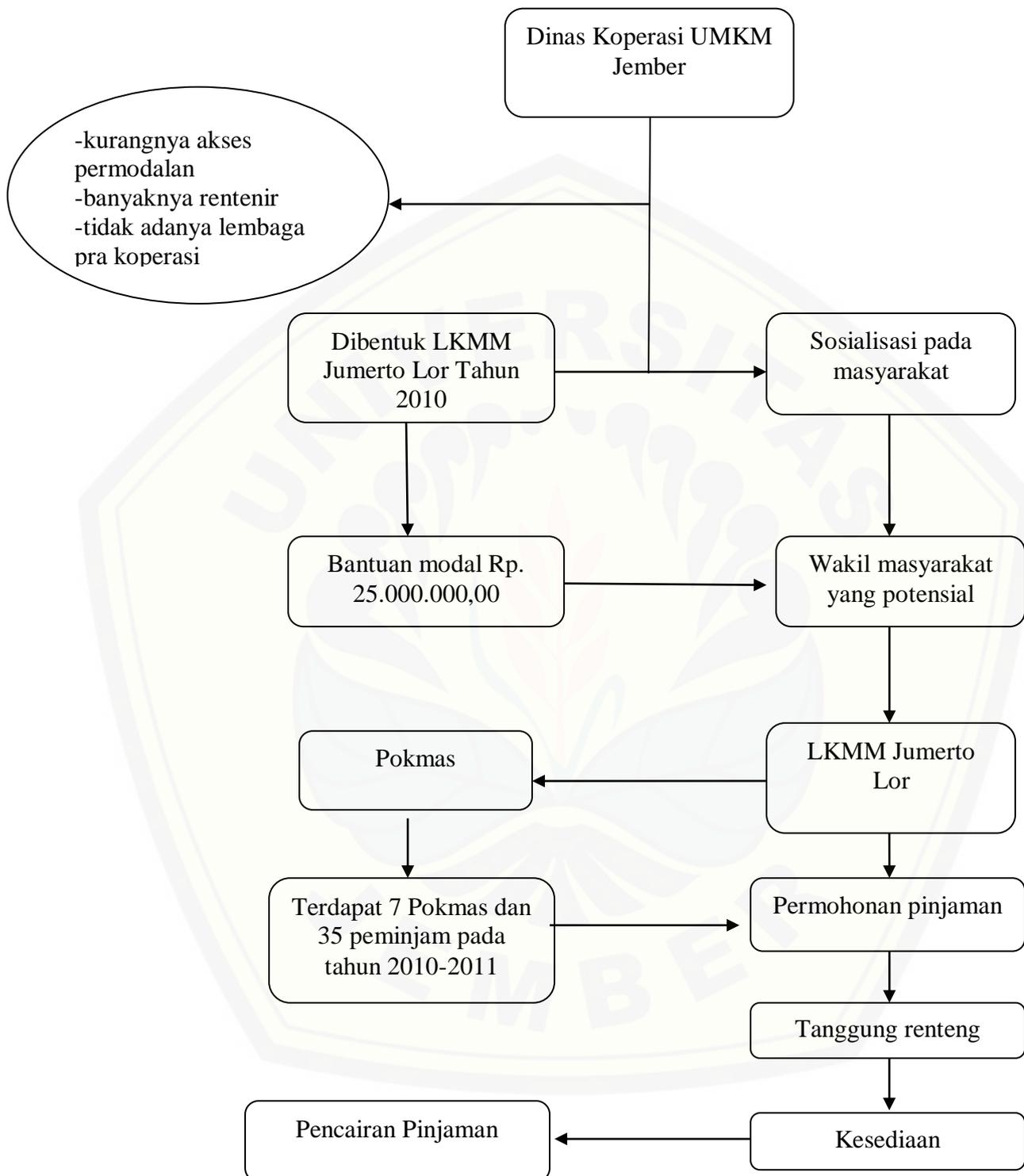
sama penjeasan dari pengurus tadi dan hasilnya nanti yaa buat dikembangkan di anggota lagi *mas* Pokmas di LKMM Jumerto Lor ada 7 *mas* dengan 35 peminjam”

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ibu Nia selaku anggota LKMM Jumerto Lor pada hari Senin, 18 September 2017 pukul 10.13 WIB

“kalau pinjem di pengurus cuman perempuan *mas* laki-laki gaa boleh harus punya usaha juga *mas* dan berkelompok kalok pinjem sendiri-sendiri gaa boleh *mas* saya dulu mau pinjem sendiri sebenarnya tapi ga boleh yaa terus bikin kelompok bunganya cuman 1% kok *mas* ”

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Kiki selaku anggota LKMM Jumerto Lor pada hari Senin, 18 September 2017 pukul 10.30 WIB.

“dulu pokok punya usaha sama punya kelompok dikasih *mas* biar buat usaha beneran atau egak penting syaratnya itu dari pengurus *mas* bunganya kecil cuman 1% memang”



Gambar 4.4 Proses Peminjaman pada LKMM Jumerto Lor

b. Pola Pemanfaatan Modal Anggota LKMM Jumerto Lor

Implementasi program yang dilakukan dalam memanfaatkan modal terkait digunakan untuk apa modal yang sudah diperoleh dan jika ada keuntungan, untung dari modal itu digunakan untuk apa.

Tabel 4.11 perkembangan peminjam dan modal di LKMM Jumerto Lor

	Peminjam	Modal Awal	sekarang
Perkembangan Pemanfaatan	Terdapat 7 Pokmas yang meminjam tetapi hanya satu Pokmas yang menggunakannya untuk kegiatan usaha yaitu Pokmas Mawar dan di berikan pada perorangan yaitu pada Ibu Retno untuk dilanjutkan	Modal awal Pokmas Mawar Rp 300 ribu	Tidak mengetahui karena setiap ada keuntungan langsung diputar buat modal usaha

Pada LKMM Jumerto Lor pada tahun 2010 terdapat 35 peminjam dengan memiliki 7 Pokmas. Dalam perkembangannya dari 7 Pokmas tersebut hanya 1 (satu) kelompok masyarakat yang menggunakan untuk usaha dan mengembalikan modal pinjaman pada pengurus yaitu Pokmas Mawar. Seperti yang disampaikan Ibu Nurul Hotima pada hari Senin, 18 September 2017 pukul 09.40 WIB.

“cuman 1 Pokmas yang aktif *mas* yaa Pokmas yang jualan rujak itu punya e Ibu Retno yang lainnya gatau pada dibuat apa *mas* tapi ada yang dibuat beli baju, buat tambahan uang sekolah anaknya, buat benahin motor gitu jawabannya waktu pas ditageh *mas* dan tiap ditagih alasannya sek belum ada buk gitu katanya”

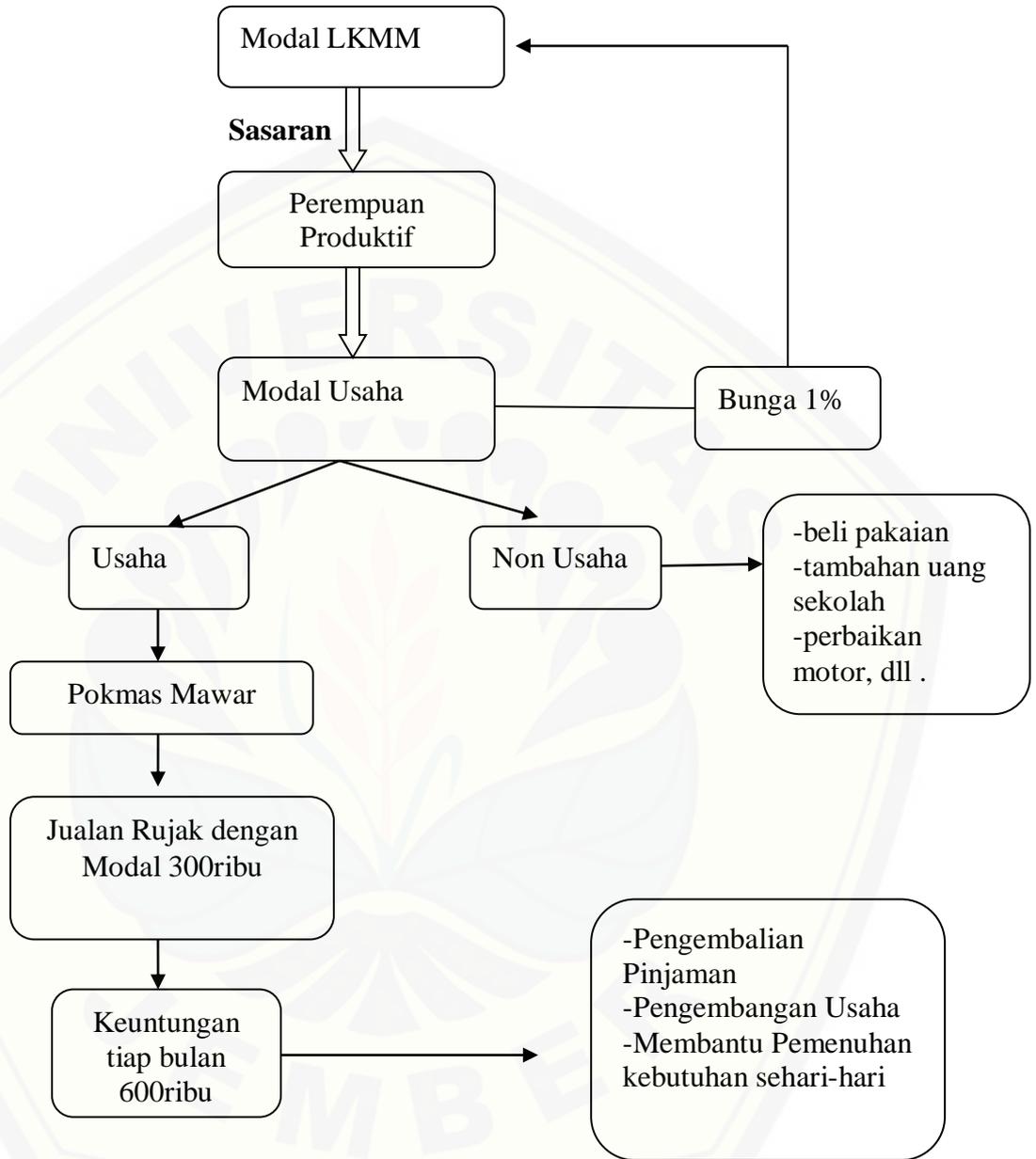
Pokmas tersebut memiliki usaha rujak dengan memiliki modal awal dari pengurus sebesar Rp 300 ribu. Dalam perkembangannya Pokmas Mawar hanya diperbolehkan meminjam pinjaman sekali karena sudah menjadi ketetapan pengurus LKMM Jumerto Lor. Hasil dari pinjaman tersebut digunakan untuk

modal dan makan sehingga usaha rujak yang awalnya berupa Pokmas menjadi perorangan karena hasil dari jualan rujak tidak cukup untuk dibagi 5 orang dan diberikan kepada Ibu Retno untuk melanjutkan usaha tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Retno selaku anggota LKMM Jumerto Lor pada hari Senin, 18 September 2017 pukul 14.15 WIB

“yaa buat usaha jualan rujak *dek* aslinya loh dulu kelompok *dek* yaa karena ga boleh pinjem lagi itu kelompoknya bubar gara-gara untungnya ga cukup dibagi orang 5 yaa akhirnya uang untung jualannya diberikan ke saya seadanya *dek* buat nerusin usaha rujaknya hasilnya yaa biasanya tiap hari dapet 20ribu kalok tiap bulan kadang yaa cuman 600ribu *dek* kadang bisa kurang bisa lebih *dek* saya jarang ngitung soalnya yaa cuman cukup buat makan sama modal lagi wong kelompok saya cuman pinjem 300 dulu *dek* saya pinjemnya juga dikit dulu kalok sekarang ya gatau *dek* jadi berapa ndak ngitung pokok cukup buat modal lagi”

Hal berbeda disampaikan oleh Ibu Alif selaku anggota LKMM Jumerto Lor pada hari Senin, 18 September 2017 pukul 15.01 WIB.

“saya dulu pinjem buat usaha *mas* tapi kata kelompok saya kok itu uang hibah *mas* yaa akhirnya dibagi-bagi gaa dibuat usaha pengurusnya aja juga nakal-nakal *mas* cuman sedikit masyarakat yang dapet pada gaa jujur”



Gambar 4.5 Pola Pemanfaatan Pada LKMM Jumerto Lor

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. Pada tahapan penguatan institusi program di Kelurahan Jumerto LKMM Barokah dan LKMM Jumerto Lor memiliki kelengkapan struktur organisasi tetapi yang masih aktif sampai sekarang hanya LKMM Barokah yang berubah menjadi Koperasi Wanita karena adanya perputaran modal yang dilakukan pengurus maupun anggota sedangkan LKMM Jumerto Lor sudah mati karena tidak ada perputaran modal yang dilakukan baik pengurus maupun anggota. LKMM Barokah dan LKMM Jumerto Lor juga tidak memiliki AD/ART dan tidak melakukan pertemuan yang dilakukan baik antara pengurus dengan anggota untuk membahas perkembangan usaha dan permasalahan usaha yang dihadapi. LKMM Barokah memiliki buku-buku administrasi secara tertib berbeda dengan LKMM Jumerto Lor yang tidak memiliki buku-buku administrasi karena hilang. LKMM Barokah dalam merekrut anggota tidak mengacu pada peraturan dari Dinas Koperasi yaitu harus perempuan dan berkelompok tetapi ada yang tidak berkelompok dan bukan perempuan tapi laki-laki sedangkan LKMM Jumerto Lor dalam merekrut anggota sesuai dengan ketentuan Dinas Koperasi yaitu perempuan dan berkelompok tapi hanya diperbolehkan meminjam satu kali. Pada LKMM Barokah Pokmas yang terbentuk dari tahun 2006-2009 yaitu sebesar 101 Pokmas dengan 498 peminjam, sedangkan pada LKMM Jumerto Lor memiliki 7 Pokmas dengan 35 peminjam pada tahun 2010-2011.
2. Tahap penguatan modal bahwa dana yang dikucurkan pada awal program berjalan ternyata tidak sama, pada LKMM Barokah menerima bantuan dana sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2006 sebesar Rp 56.000.000,00 dan tahun 2010 sebesar Rp 25.000.000,00 berbeda dengan LKMM Jumerto

Lor hanya sekali mendapatkan bantuan dana yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp 25.000.000,00. Usaha yang dilakukan pengurus dalam mempermudah proses pinjaman yaitu dengan tidak adanya jaminan yang ditetapkan oleh pengurus. Pada LKMM Barokah perkembangan modal usaha mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006 per Desember modal yang ada pada LKMM Barokah sebesar Rp 44.682.460, pada tahun 2007 per Desember sebesar Rp 70.083.500, pada tahun 2008 per Desember sebesar Rp 62.134.000 dan tahun 2009 sebelum menjadi koperasi wanita sebesar Rp 44.928.500. Perkembangan modal yang ada pada LKMM Barokah mengalami kenaikan tertinggi yaitu pada tahun 2007 sebesar Rp 70.083.500. Hal ini dikarenakan pada tahun 2007 jumlah Pokmas dan peminjam juga mengalami peningkatan yaitu dengan 32 Pokmas dan 157 peminjam. Sedangkan LKMM Jumerto Lor tidak mengalami perkembangan karena hanya bertahan 1 tahun setelah menerima bantuan.

3. Tahap pengembangan keterampilan di Kelurahan Jumerto hanya dilakukan pada awal terbentuknya program yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi yaitu dengan mengadakan pelatihan tentang tata buku sederhana untuk pengurus LKMM dan melakukan pelatihan membuat makanan seperti roti untuk pengurus dan anggota LKMM sedangkan pengembangan keterampilan yang dilakukan oleh pengurus hanya dilakukan oleh LKMM Barokah yang mengadakan pengembangan keterampilan berupa *outbond* yang tujuannya untuk mempererat antara pengurus dengan anggota.
4. Pada Pola pemanfaatan PUM-RTM di Kelurahan Jumerto dibagi menjadi 2 yaitu;
 - a. Pola pemanfaatan yang dilakukan oleh LKMM

Pola pemanfaatan yang dilakukan LKMM Barokah dalam memberikan moda usaha ditujukan pada perempuan maupun laki-laki baik kelompok maupun individu tidak mengacu pada ketentuan dari Dinas Koperasi dengan menetapkan bunga pinjaman 0,5% dalam 10 minggu berbeda dengan LKMM Jumerto Lor yaitu ditujukan pada perempuan produktif dan berkelompok dengan pinjaman 1% dalam 10 minggu.

b. Pola pemanfaatan oleh anggota LKMM

Pada LKMM Barokah modal pinjaman ada yang digunakan untuk keperluan usaha seperti toko/warung, jualan krupuk, jual sayur dipasar dll. Sehingga hasil atau keuntungan yang didapat sebagian digunakan untuk modal usaha lagi dan sebagiannya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, makan, dll. Tetapi ada juga untuk kegiatan selain keperluan usaha seperti untuk membeli kasur, pakaian, tambahan acara pementasan ludruk dll. Pada LKMM Jumerto Lor modal pinjaman banyak digunakan untuk keperluan non usaha seperti tambahan uang sekolah, membeli pakaian, perbaikan motor dll. Hanya satu kelompok yang menggunakan untuk keperluan usaha yaitu untuk berjualan rujak. Keuntungan yang didapat digunakan untuk modal usaha lagi dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka ada beberapa saran untuk proram PUM-RTM yang ada di kelurahan Jumerto Kecamatan Patrang, yaitu sebagai berikut ;

1. Dinas Koperasi lebih aktif mengontrol baik berupa keuangan ataupun kegiatan yang dilakukan sehingga LKMM bisa lebih sehat dan lebih berkembang dalam mengadakan kegiatan.
2. Perlu adanya pelatihan dan pendampingan kewirausahaan yang dilakukan Dinas Koperasi secara intensif kepada penerima manfaat program untuk meningkatkan kualitas produk dan pendampingan dalam manajemen usaha serta untuk mengurangi resiko usaha yang merugi.
3. Adanya penambahan modal usaha pada LKMM yang berprestasi. Ukuran berprestasi bukan semata mata dilihat dari angsuran yang lancar tapi seberapa tepat sasaran program dilakukan.
4. Menutup atau mengambil alih hak LKMM jika ditemukan LKMM yang sudah tidak bisa diperbaiki dalam hal pengelolaan dan penentuan target sasaran.

Karena dengan dana yang dikucurkan memang untuk masyarakat miskin banyak dinikmati oleh yang bukan orang miskin.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, I.R. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Rajawali Pers.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.
- Anwas. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Bungin, Burhan. 2001. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta:Kencana.
- Cholisin, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat. Handout* yang disampaikan pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian tahun 2011 di Lingkungan Kabupaten Sleman pada 19-20 Desember 2011.
- Creswell, John. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. 2000. *Public Policy Analysis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Islamy, M.I. 1986. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Korten, David C. 1984. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maipita, Indra. 2014. *Mengukur Kemiskinan dan distribusi Pendapatan*: Yogyakarta. UPP
STIM YKPN
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perpektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Marzuki. 2006. *Pemikiran dan Strategi Memberdayakan Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia*. Jakarat: Wacana Media.
- Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA PUSDAKARYA
- Mutaqien, A. 2006. *Menuju Indonesia Sejahtera*. Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia

- Mutrofin. 2007. *Pengantar Metode Riset evaluasi Kebijakan, Program, Proyek*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*: Jakarta. PT GRAMEDIA
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*: Jakarta. PT GRAMEDIA
- Noor, Henry. 2015. *Ekonomi Publik*. Jakarta: PT Indeks
- Patton. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR
- Subagyo, dkk. 2013. *Memutus Rantai Kemiskinan Perempuan*. Malang: Intimedai
- Surjono, A dan Nugroho, T. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Banyumedia Publishing.
- R, Soetrisno. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Yogyakarta: PHILOSOPHY PRESS, Badan Kerjasama Fakultas Filsafat UGM
- Sumodiningrat, G. 2004. *Mewujudkan Kesejahteraan bangsa*: Jakarta. PT Gramedia
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PTRefika aditama
- Soetomo. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- Soerjono Soekanto, 1981. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan Ketujuh, Penerbit. Universitas Indonesia-Press, Jakarta:1981.
- Usman dan Akbar.2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik:Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Kusumanegara, S. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava
Media

Internet:

<http://www.BPS.go.id>

<http://www.jpip.or.id/artikelview-345.html>

<http://umkm-jember.web.id/index.php/component/content/article/36-headline/7-upaten-jember-nominator-innovative-government-award-2010>

Panduan

Petunjuk Pelaksanaan LKMM Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember